Choirul Fuad Yusuf

KONFLIK BERNUANSA AGAMA

Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997 - 2005

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Konflik Bernuansa Agama

Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997 - 2005

Choirul Fuad Yusuf

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Penulis:
Choirul Fuad Yusuf

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997 - 2005

Editor:
Prof. Dr. Imam Tholkhah, MA., APU

vi + 276 halaman; 14,8 x 21 cm

Penerbit:
Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Lt. 18 Jakarta

Desain & Layout: Arif Syibromalisi

Cetakan I, Desember 2013

ISBN : 978-602-8766-74-6

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT LITBANG LEKTUR DAN KHAZANAH KEAGAMAAN

Agama merupakan perangkat sistem nilai dan norma yang berasal dari Tuhan yang diyakini pemeluknya. Sebagai sistem, agama memiliki fungsi untuk melakukan penataan kehidupan manusia, paling tidak kehidupan ummat pemeluknya. Karena itulah, agama memegang peran penting bagi kehidupan manusia sejak awal sejarahnya hingga kini, walau di abad peradaban sekular sekalipun seperti kita saksikan dewasa ini. Begitu pentingnya, agama kerap kali menjadi isu penting yang merambah pada pelbagai aspek kehidupan -- sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dan aspek lainnya. Agama mengisi kehidupan menjadi lebih bermakna. Tak terelakkan, agama menjadi salah satu unsur utama dari stuktur kehidupan kehidupan manusia. Agama menjadi penyeimbang orientasi dan tatanan kehidupan ummat manusia.

Lebih jauh, agama sebagai sistem relasi, dalam kenyataannya, merupakan *"integrating factor"* terbentuknya integrasi masyarakat yang memiliki keyakinan, orientasi, tata ajaran (nilai, norma), ritus, dan *mode of conduct* yang sama. Namun, sebaliknya, agama kerap juga menjadi *"disintegrating factor"* ketika terjadi pergesekan dan perjumpaan antar tata ajaran yang berbeda yang disertai dengan *truth-claim* oleh

masing-masing agama. Dalam konteks inilah, maka konflik berbasis agama, dalam kenyataannya, merupakan fenomena historik yang tak dapat dihindari kehadirannya sejak awal peradaban hingga dewasa ini di pelbagain penjuru dunia.

Melihat karakteristik dan fungsi agama di satu pihak, dan tingkat kemajemukan agama dan keyakinan di Indonesia ini, maka upaya pemetaan (penggambaran realitas obyektif) ikhwal konflik bernuansa agama menjadi penting dilakukan. Paling tidak, pemetaan konflik bernuansa agama di Indonesia, diharapkan memiliki manfaat penting dalam beberapa hal. *Pertama*, riset pemetaan ini, diharapkan bisa menggambarkan atau memotret bagaimana kondisi tata hubungan umat beragama di wilayah Indonesia yang majemuk ini. *Kedua*, pemahaman tentang faktor penyebab, modus, dan dampak konflik, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi sumber atau pemicu konflik seperti yang telah terjadi. *Ketiga*, pemahaman terhadap peta konflik di berbagai daerah ini, diharapkan dapat dijadikan masukan berharga sebagai bahan pembuatan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan konflik bernuansa agama. Dengan kata lain, hasil *Pemetaan Konflik Bernuansa Agama* dapat dijadikan untuk penyusunan strategi untuk mencegah, mengatasi, atau menanggulangi konflik berbasis agama, dalam upayanya memelihara bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya kini dan ke depan.

Untuk itulah, sekali lagi, penerbitan buku *Peta Konflik Bernuansa Agama Berbagai Daerah Indonesia* menjadi penting untuk dibaca, dicermati, dan dijadikan pelajaran bagi generasi kini dan mendatang. Dan, tentu saja, tak lupa, dihaturkan banyak terima kasih atas kontribusi berbagai pihak sehingga buku hasil pemetaan ini bisa terbit.

Jakarta, Desember 2013

Choirul Fuad Yusuf

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan bangsa majemuk dan multikultural, yang terdiri dari ribuan pulau dengan latar belakang ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama dan kepercayaan yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pluralisme dan multikulturalisme yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan potensi dan beban sekaligus. Di satu pihak, kemajemukan yang dimiliki dapat merupakan kekayaan bangsa yang sangat potensial bagi pencapaian cita-cita bangsa sebagai negara besar dan kuat. Namun demikian, di pihak lain, kemajemukan dan perbedaan dapat menjadi faktor disintegratif bagi keutuhan bangsa. Untuk itulah, sudah barang tentu, kekayaan bangsa yang berupa kemajemukan dan perbedaan latar belakang perlu ditata, dikelola atau di-*manage* secara baik, tepat, dan proporsional, agar tetap terintegrasi dalam NKRI.

Pada penghujung memasuki abad XXI muncul berbagai fenomena krisis sosial yang secara linear mengarah pada proses disintegrasi sosial di Indonesia. Meski sesungguhnya fenomena ini telah mulai menampakkan diri ke permukaan waktu jauh sebelumnya, namun agaknya fenomena tersebut yang kini banyak menggumpal menjadi berbagai bentuk konflik sosial tampak menonjol sejak 1997-an.

Diawali dengan konflik antar ras berupa penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan nonpribumi bulan Mei 1998 di Jakarta, yang disusul daerah-daerah, konflik antar kelompok beragama berupa pembakaran Gereja (Peristiwa Ketapang, Jakarta) dan pembakaran Mesjid di Kupang yang menyebar ke Ambon (Januari 1999), dan Ujung Pandang (1 April 1999), disusul konflik antar suku berupa pembunuhan/perkelahian di Sambas Kalimantan Barat pada 1999 dan bentuk konflik sosial lainnya, seperti konflik antar daerah dan Pusat (Aceh, Riau, Irian Jaya), konflik Poso, Maluku Utara, konflik antar partai dsb.

Konflik sosial yang meletus, sebenarnya, berakar pada sumber sangat kompleks, tumpang tindih, berkelindan dan sangat sulit diidentifikasi secara jelas dan akurat faktor-faktor penyebabnya. Emil Salim, mengkategorikan konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya merupakan bentuk konflik "dwiminoritas" dan "triminoritas", lantaran terbentuk atas himpitan dua atau tiga konflik seperti antar suku dan agama, atau antar ras, suku, dan agama sekaligus.[1]

Terlepas dari apa bentuk (modus) konflik yang terjadi, faktor penyebab dan fungsinya bagi terbentuknya proses sosial, ternyata konflik berkepanjangan tidak hanya berakibat semakin sulitnya dicarikan strategi pemecahannya tapi juga berdampak semakin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal inilah, hal terpenting harus disikapi

---

[1] Harian *Kompas*, Jakarta, September 1999.

Pemerintah dan masyarakat adalah mencari solusi paling tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi serta membangun kerukunan hidup masyarakat sehingga terbentuk NKRI yang kuat.

Berbagai strategi penguatan integrasi bangsa yang benar-benar "*integrated*" dan sekaligus memperkecil konflik-konflik sosial di Indonesia, memang, sudah banyak yang ditempuh. Salah satunya melelui pendekatan agama (*religious approach*) yang memokus pada upaya pemungsian agama pada proporsi yang tepat sebagai "*social integrator*" dalam perspektif luas. Namun demikian, konflik bernuansa SARA tetap saja terjadi. Oleh sebab itu, informasi atau data yang akurat, lengkap dan komprehensif tentang tata hubungan masyarakat, terutama komunitas beragama teramat diperlukan, guna merumuskan kebijakan dan program yang tepat. Dalam rangka itulah, pemetaan tentang hubungan antar umat beragama perlu dilakukan.[2]

---

[2]Penelitian tentang kerusuhan sosial bernuansa SARA,sebenarnya, sudah banyak dilakukan secara individual maupun kolektif. Misalnya, (1) *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM, bekerjasama dengan Departemen Agama 1997; (2) *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama,* Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1997; (3) *Kerusuhan Sosial di Pekalongan,* Puslitbang Kehidupan Beragama, tahun 1998; (4) *Tragedi Maluku Utara*, Tamrin Amal Tomagola, 2000; (5) *Kerusuhan Sosial Bernuansa Agama (Kerusuhan Poso),* Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003; (6) *Bara Dalam Sekam (Analisis Konflik Politik di Aceh-Riau-Ambon dan Irian Jaya),* LIPI, 2001. Namun demikian, data/informasi tersebut masih berserakan dan tersebar di berbagai tempat dan belum tersosialisasikan secara luas.

Fokus Kajian

Penelitian berjudul *Pemetaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* ingin menggambarkan bagaimana potret kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang sesuangguhnya. Secara rinci, penelitian memfokus pada penggambaran masalah : 1) kondisi geografik dan pemerintahan masyarakat, 2) kondisi demografik masyarakat, 3) kondisi sosial ekonomi masyarakat, 4) kondisi sosial-budaya masyarakat, 5) kondisi sosial-politik masyarakat, 6) kondisi sosial-keagamaan masyarakat, 7) hubungan antar kelompok agama mayoritas dan minoritas, 8) strategi pemeliharaan kerukunan, 9) kasus-kasus konflik yang terjadi, dan 10) persepsi dan aspirasi masyarakat tentang kerukunan di daerahnya. Dengan demikian, pada tataran metodologis, pemetaaan ini bermaksud untuk menggambarkan dan menghimpun berbagai informasi/data lapangan sehingga secara substantif mampu menggambarkan secara jelas dan utuh tentang realitas konflik dan integrasi sosial di tiap propinsi. Pada akhir pemetaan, diharapkan kajian ini dapat menghasilkan *Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*.

Namun, tentu saja, untuk mewujudkan karya monumental berupa potret kerukunan atau konflik sosial yang terjadi di seluruh Indonesia yang mampu memetakan relasi sosio-kultural bangsa Indonesia secara lengkap tidaklah sederhana. Berbagai kendala, baik keterbatasan waktu, fasilitas, dana maupun tenaga, ternyata muncul tanpa dapat dihindari. Oleh karena keterbatasan itulah, kajian ini akan

dilakukan secara bertahap yang memakan waktu 1-2 tahun. Dan, pada tahapan ini, hanya mengkaji tujuh wilayah propinsi dari 33 propinsi yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Nusa tenggara Timur, dan Priopinsi Maluku Utara.

Pemilihan ketujuh propinsi sebagai lokasi penelitian, sesungguhnya sangat sederhana. *Pertama*, ketujuh daerah tersebut dipandang merepresentasikan kategori daerah paskakonflik (*post-conflict*), sedang konflik (*on going conflict*), dan potensial ber-konflik (*potentially conflictual*), serta daerah terkategori aman (*non-conflictual area*). Diharapkan kajian ini, akan diperoleh sejumlah data, informasi yang akurat dan absah tentang fenomena konflik di berbagai daerah, yang kemudian dapat dijadikan pengalaman untuk membangun kesadaran perlunya menghindari konflik. Lebih jauh, dari kajian terhadap daerah paska konflik, diharapkan mampu merumuskan dan menyusun "desain", "model", atau strategi efektif program resolusi konflik (*conflict resolution*) , reduksi konflik (*conflict reduction*) dan pengembangan budaya damai (*peace-culture*) dalam upaya penguatan NKRI. Demikian pula, dari kajian terhadap daerah yang sedang berkecamuk konflik atau potensial konflik, akan diperoleh data/informasi tentang sejauhmana derajat intensitas hubungan konfliktual yang sedang dan akan terjadi. Selain itu, kejian terhadap daerah yang potensial konflik, sudah barang tentu, diharapkan diperoleh masukan untuk penyusunan strategi efektif untuk

mencegah meletusnya konflik terbuka antar kelompok. Sementara kajian terhadap daerah yang relatif rukun, diharapkan diperoleh masukan untuk menyusunan model perukunan yang *replicable* di daerah lain.

Agar dapat diperoleh data atau informasi yang absah dan terpercaya, dalam kajian ini dipergunakan separangkat metoda yang tepat sesuai data yang diperlukan. Oleh karena itulah, sesuai kebutuhan data, pendekatan metodologi kualitatif dipergunakan. Paling tidak, dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam (*depth interview*), diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*), observasi, serta studi dokumentasi, diharapkan proses penelitian menghasilkan data atau informasi yang kaya (lengkap) untuk difahami, dianalisis, dan diinterpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

Ikhwal sumber data (informan) yang dijadikan mitra pengayaaan data adalah segenap informan yang dibutuhkan oleh data. Dalam kontek ini, kajian mempergunakan instansi pemerintah seperti : Kantor Statistik, Departemen Agama, Pemda, Dinas Pendidikan, Polsek, Koramil, dsb., tokoh masyarakat/tokoh agama, pakar/pengamat sosial-keagamaan, serta dokumen terkait. Selanjutnya, data yang terkumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses *coding, editing*, kategorisasi, tabulasi, dan interpretasi, penyimpulan sementara, *member-check,* dan penyimpulan akhir.

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

Kemajemukan dan konflik Sosial

Kemajemukan merujuk pada pengertian bermacam-macam. Menurut Fedyani (1986) kemajemukan (pluralitas) berarti terdapatnya keaneka-ragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya.[3] Unsur-unsur struktur sosial tersebut, secara sosio-kultural maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Implikasinya, kemajemukan dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan masyarakat (atau bangsa) yang dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya pesaingan secara sehat yang berakibat terjadinya kemajuan atau perubahan sosial yang dinamik. Arthur F. Bentley (1908) dalam hal ini menggaris-bawahi bawa "dinamika perubahan sosial sangat ditentukan oleh interaksi antar kelompok yang berbeda".[4] Namun dalam keadaan berbeda, kemajemukan tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga

---

[3] A. Fedyan Saefuddin, *Konflik dan Integrasi : Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit rajawali, Jakarta, 1986, h.ix.

[4] David L. Sill (Ed.), *International Encuclopedia of the Social Sciences, Vol 11* Simon & Schuster and Prentice Hall International, London, 1968, p.168.

asebagai pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga mewujud dalam *cooperation* dan *competition*

Konflik Sosial

Konflik memiliki pengertian yang beragam tergantung pada paradigma yang dipergunakannya. Secara sosiologik, konflik kerap diartikan sebagai pertikaian, perseteruan, atau pertarungan , yakni proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melemahkan piham lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma yang berlaku[5] *International Encyclopedia of the Social Sciences* (1968 : 232) mendefinisikan bahwa konflik sosial adalah perjuangan pencapaian nilai status, kekuasaan, atau sumber-sumber langka (*scarce resources*), dimana tujuan pihak yang berkonflik bukan semata untuk memperoleh tujuan/maksud yang diinginkan, namun juga bertujuan menetralisir, melukai, atau mengeliminasi pesaingnya.

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok (kolektivitas). Atau antar individu-individu dengan kelompok. Sebagai realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkontribusi daklam proses pemeliharaan kelompok atau kolektivitas serta memperkuat terbangunnya hubungan interpersonal. Weber, sosiolog Jerman, bahkan melihat pentingnya konflik sosial

[5] Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969, h.60.

dalam proses kehidupan. Menurutnya, konflik tak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Bahkan perdamaian itu sendiri sebenarnya tidak lain daripada suatu bentuk perubahan dalam bentuk konflik.[6] "*Conflict is a form of sociation*"[7]

Lebih rinci, para pendukung teori konflik, seperti Gorg Simmel, Lewis Coser, Ralf Dahrendorf, dan Max Gluckman, melihat konflik sebagai bentuk interaksi sosial, dalam kenyataannya, memiliki nilai positif dan fungsional bagi terbentuknya kelompok yang kuat. Dengan mengelaborasi karya Simmel, dalam buku terkenalnya *The Function of Social Conflict*, Coser menyebut beberapa fungsi mendasar konflik sosial dalam proses sosial, antara lain : (1) membangun kesatuan dan kohesi sosial, (2) membentuk unsur-unsur stabilitatif dan integratif, (3) memperjelas kekuatan-kekuatan relatif kelompok-kelompk yang bertikai, (4) membentuk mekanisme adaptasi dan pemeliharaan keseimbangan kekuatan (5) menyebabkan lahirnya asosiasi dan koalisi, (6) membantu mengurangi isolasi dan sekaligus mempersatukan individu atau kelompok yang bertikai, (7) sebagai katup pengaman untuk mengurangi frustasi dan agresi, serta (8) melahirkan situasi untuk konsensus.[8]

---

[6] Max Weber, *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, transled by Edward A. Shill and H.A Finch, The Free Perss, Illinouis, 1949, 26-27.

[7] Georg Simmel, *Conflict : The Web of Group Affiliations*, The Free Press Publications, Glencoe, Ill, 1955, p. 17

[8] Lihat : Choirul Fuad Yusuf, "Agama dan Integrasi Sosial ", Kata Pengantar pada *Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Bansgsa Di Masa Depan*, (Muchlios, ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999.

Terlepas dari apa bentukm konflik yang terjadi, faktor penyebab, serta fungsinya bagi terbentuknya prosesosial, namun hal terpenting untuk disikapi adalah bahwa konflik sosial apa pun bentuknya harus dicarikan solusinya. Konflik berkepanjangan tidak saja mengakibatkan semakin sulitnya dicarikan strategi solusinya, tapi juga berdampak semakin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu, resolusi konflik sosial merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membangun kembali integrasi sosial lebih kompak, solid, kuat, dan penuh harmoni dan kedamaian. Dengan demikian, integrasi sosial (=kerukunan), bagaimana pun merupakan sebuah tuntutan yang niscaya dalam penciptaan keseimbangan masyarakat.

Kerukunan : Konsep dan Signifikansi Sosialnya

Perkataan "rukun", secara etimologik, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila.[9] Kemudian, perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih.[10] Dalam bahasa Inggeris disepadankan dengan "*harmonious*" atau "*concord*".[11] Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan,

---

[9] Lihat : H.M. Ridwan Lubis, dkk. (Eds.), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung, 2004, h. 21.

[10] W.J.S. Poerwadarminta, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta, 1954.

[11] John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta, 1994, h.468.

kecocokan, atau ketidak-berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti : "*the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*".[12]

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (=unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.[13] Konflik, sebaliknya, diartikan secara berlawanan dengan kerukunan. Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, konflik kerap diartikan sebagai suasana hubungan yang ditandai oleh perseteruan, permusuhan, ketidak-cocokan, dan perselisihan. *Conflict is the overt struggle between individuals or groups in the society, or between state,*[14] atau antara kelompok kepentingan, partai politik, etnik, ras, kelompok agama, atau gerakan sosial lainnya.

Sebagai kondisi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat. Kerukunan dapat menjajdi katup pengaman (*safety valve*) bagi disintegrasi sosial. Kerukunan dapat

---

[12] W. Wallace (Ed.), *The Dynamics of European Integration*, Pieter, Inc., London, 1990, p.9.

[13] Ridwan Lubis dkk., ibid. h. 24-26.

[14] David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999, p.113.

mereduksi konflik, disamping secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*). Kerukunan, dengan demikian, berfungsi mengontrol, memelihara, menguatkan dan membangun "ikatan sosial" struktur masyarakat. Kerukunan mengontrol unsur untuk saling mengikat dan memelihara keutuhan bersama agar tetap eksis dan *survived.* Secara terinci, makna dan fungsi kerukunan dapat difahami dalam berbagai konteks dimensi kehidupan masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka adalah jelas bahwa perseteruan (konflik) apa pun basisnya merupakan faktor penyebab terbentuknya struktur suasana sebaliknya yaitu kondisi disharmoni, saling bermusuhan, saling tidak percaya, dan berakhir saling menghancurkan.

Pada dimensi komunikasional,[15] kondisi rukun (kerukunan)yang mempersyaratkan adanya interaksi resiprokal, hubungan karib, keintiman, kedamaian, dan ketenangan yang didasarkan pada sikap keterbukaan, kerjasama, sentuhan kasih, dan saling pengeriaan, pada gilirannya dapat membangun dan memperkuat integrasi sosial sekaligus mengurangi ketegangan dan konflik sosial. Kerukunan pada dimensi ini berfungsi sebagai "*conflict reduction*" dan juga *safety*

---

[15] Dimensi komunikasional berkaitan dengan proses komunikasi yang melibatkan unsur komunikator, komunikan, pesan, media dan efek.

valve terjadinya disintegrasi sosial. Konflik, sebaliknya berrfungsi sebagai "*harmony distruction*" atau "*distruction accelerator*".

Pada dimensi sosio-kultural,[16] kerukunan yang berwujud sebagai "integrasi budaya", "integrasi normatif", "integrasi konsensual", dan "integrasi fungsional" mempunyai banyak fungsi dalam penataan dan pencapaian tujuan hidup masyarakat. *Pertama*, pada dimensi ini, kerukunan menumbuh suburkan terjadinya pola interaksi untuk penguatan lembaga pengaturan (*body of normatif elements*) yang dapat menata perilaku komunitas dalam sistem yang konsisten.

Bagan 1 : Proses Terbentuknya Kerukunan
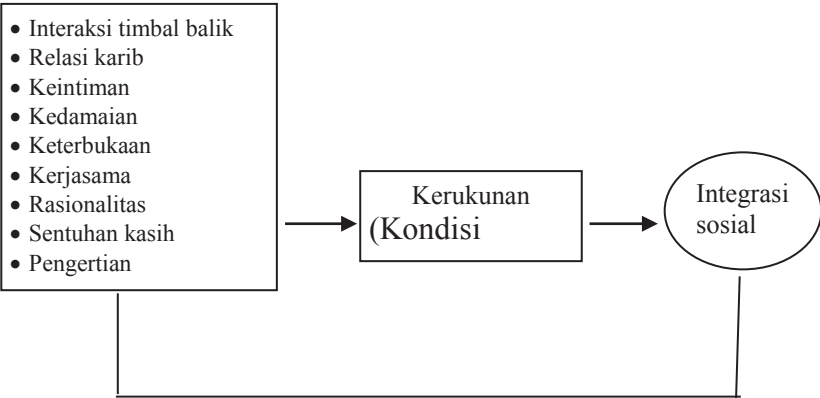
[16] Dimensi sosio-kultural berkaitan dengan aspek penciptaan dan pemberlakuan norma dan nilai dalam sistem sosial.

Kedua, kerukunan menyebabkan terjadinya struktur situasi kondusif dimana pelaku interaksi (antar berbagai pihak terkait) berprilaku sesuai dengan kebutuhan sistem norma yang ada. *Ketiga,* kerukunan membangun suasana yang memudahkan terbangunnya konsensus dan kesepakatan yang efektif terhadap keyakinan, nilai atau tindakan. Lewat proses transmisi preskripsi dan proskripsi serta sikap saling berbagi perasaan, keyakinan dan tindakan, maka kerukunan dapat dibentuk secara mantap sekaligus mereduksi eskalasi kompetisi antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. *Keempat*, kerukunan pada dimensi sosio-kultural berfungsi mengakomodasi proses sinkronisasi antara tuntunan timbal balik pada tingkat prilaku lahiriah. Kerukunan atau integrasi dalam berbagai aspeknya--baik dalam perspektif mikro maupun makro--merupakan hal yang "*imperatively functional*". Kerukunan membangun struktur situasi yang kondusif terjadinya proses interaksi resiprokal yang mengarah pada keseimbangan sosial, kemapanan, stabilitas dan ketahanan sosial.

Menyadari pentingnya "kerukunan", maka ada beberapa hal yang perlu dikembangkan.

Bagan 2 : Integrasi Sosial
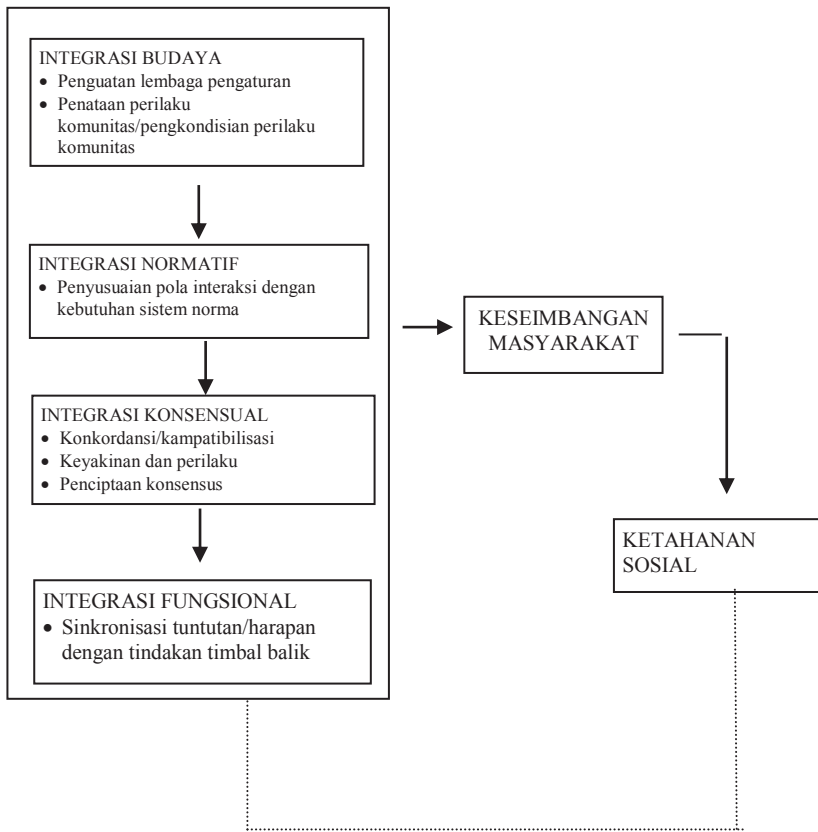
Pertama, pengembangan wadah kerukunan yang kuat. Wadah ini harus merupakan forum komunikasi kelompok-kelompok (interaktan) yang secara murni menghendaki kerukunan. Untuk itu, wadah harus memiliki kejelasan orientasi (visi dan misi) yang dapat diprogramkan.

Kedua, pengembangan sistem norma, atau perangkat pengaturan ikhwal norma dan nilai tentang ekspektasi serta

preskripsi dan proskripsi yang diperlukan. Sistem norma dan nilai yang dibangun niscaya harus merepresentasikan prinsip-prinsip kejelasan orientasi, relevansi dengan kebutuhan, keadilan bagi semua pihak, kebersamaan, dan kepraktisan. Dalam konteks inilah, pemeranan pemerintah dan masyarakat sangat menentukan derajat keberhasilan terbangunnya proses integraso sosial masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini, paling tidak mampu menjembatani dan memediasi kepentingan semau pihak yang berkepentingan atau bertikai.Pemerintah harus merupakan instrumen yang responsif untuk menjaga keseimbangan kelompok kepentingan yang bertikai, serta kebijakan publik harus dapat difahami sebagai *the free play of group pressures*.

Pustaka Rujukan

Achmad Fedyan Saefuddin, *Konflik dan Integrasi : Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit rajawali, Jakarta, 1986.

Choirul Fuad Yusuf, "Agama dan Integrasi Sosial ", Kata Pengantar pada *Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Bansgsa Di Masa Depan*, (Muchlis, ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999.

David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999.

David L. Sill (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 11* Simon & Schuster and Prentice Hall International, London, 1968.

John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta, 1994.

Max Weber, *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, translated by Edward A. Shill and H.A Finch, The Free Perss, Illinouis, 1949.

Ridwan Lubis, dkk. (Eds.), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969.

W. Wallace (Ed.), *The Dynamics of European Integration*, Pieter, Inc., London, 1990.

W.J.S. Poerwadarminta, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta, 1954.

BAB III
POTRET KEHIDUPAN BERAGAMA DI BERBAGAI DAERAH

Pada bab III ini, dipetakan bagaimana kondisi kehidupan beragama di sejumlah daerah di Indonesia. Diantara realitas yang dipetakan, adalah menyangkut kondisi kehidupan beragama pada umumnya, dan kasus-kasus peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya konflik bernuansa SARA. Sesuai kategori tipe kondisi kehidupan beragamanya, maka daerah-daerah yang dipilih adalah daerah yang merupakan representasi daerah konflik tinggi, konflik sedang, dan daerah aman. Untuk itu, 7 (tujuh) daerah provinsi dipilih untuk kajian pemetaan ini, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara—yang diuraikan secara per-provinsi berikut.

(I)
SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia. Provinsi ini, secara historik, merupakan provinsi yang memiliki wilayah yang luas (72.981,23 km2, yang terbagi ke dalam 33 kabupaten/kota. Tak kurang dari

419 pulau terdapat di wilayah provinsi ini, dan memiliki lebih dari 12 suku bangsa yang hidup di Sumatera Utara, yaitu suku: Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Nias, Minangkabau, Aceh Jawa dan Tionghoa dengan masing-masing kekayaaan budayanya : adat istiadat, bahasa, dsb.

Kondisi Geografik

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi berpenduduk terbesar setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Bahkan Medan, sebagai ibu kotanya, merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Di sebelah timur, wilayah Sumatera Utara berbatasan dengan Pantai Timur Sumatera dan di sebelah barat oleh Pantai Barat Sumatera. Propinsi ini juga dipisahkan oleh Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan, terletak di bagian barat Indonesia. Secara administratif, Propinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan propinsi Nangroe Aceh Darussalam di sebelah utara, dengan Negara Malaysia di selat Malaka di sebelah timur, Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Sumatera Barat di sebelah selatan, serta berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Propinsi, yang (pada tahun 2005) berpenduduk 12.883.375 jiwa, berkepadatan 187 jiwa per-km2 merupakan wilayah yang berlatar belakang suku, rasa, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang sangat beragam.

Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Sumatera Utara

Budaya suatu bangsa atau sukubangsa sangat menentukan pembentukan karakter dan prilaku bangsa atau suku bangsa bersangkutan. Tingkat atau derajat peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang di masyarakat nyata. Oleh sebab itu, peran budaya masyarakat dalam pembentukan kualitas masyarakat menjadi sangat penting dan determinatif bagi kelangsungan perdaban dabn eksistensi bangsa atau masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Sumatera Utara terbangun atas delapan etnis utama ditambah dengan beberapa etnik pendatang. Delapan etnik utama adalah suku Batak, Karo, Simalungun, Pesisir, Mandailing, Fak-Fak, Melayu dan Nias. Ke delapan etnik utama masyarakat Sumatera Utara ini hampir seluruhnya merupakan penganut dari lima agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Buddha.

Dalam rangka pemahaman terhadap "*cultural setting*" yang mendasari pola interaksi antar komunitas yang sama maupun interaksi lintas budaya, berikut digambarkan karakteristik dasar budaya masing-masing suku yang terdapat di Sumatera Utara.

Etnik Melayu

Etnik Melayu merupakan etnik di Suamatera Utara yang menyatakan dirinya sebagai penganut agama Islam.

Bahkan, dalam pandangan orang Melayu, Islam identik dengan Melayu. Oleh karena itulah, dilihat geografiknya, masyarakat beretnik Melayu banyak mendiami kota Medan dan kabupaten Langkat dan merupakan penganut Islam yang taat dalam menjalankan perintah-perintah agamanya.

Umumnya, masyarakat Melayu juga merupakan kelompok tradisional yang patuh secra konsisten melaksanakan ajaran agama yang diyakininya, serta berusaha melakukan konservasi dan pengembangan nilai, norma dan tindakan budaya Melayu. Maka tak heran jika masyarakat Melayu cenderung menjadi anggota, simpatisan dari Al Jami'atul Washliyah, suatu organisasi Islam yang berdiri di Medan pada tahun 1930-an.

Etnik Karo

Masyarakat Karo merupakan etnik Sumatera Utara yang pada umumnya menganut agama Kristen (Protestan) dengan denominasi utamanya adalah Gereja Batak karo Protestan (GBKP), selain terdapat pula penganut Islam, Katolik, dan Hindu. Namun demikian, masih terdapat pula masyarakat Karo yang mempercayai kepercayaan tradisional yang disebut *Pemena.* Masyarakat Karo memiliki sikap toleransi tinggi dalam melihat perbedaan agama yang dianut. Keragaman beragama atau berkepercayaan tidak menjadi faktor penyebab perseteruan. Akan tetapi, karena masyarakat Karo tercitra sebagai masyarakat penganut kristiani, maka masyarakat pemeluk agama Islam membuat identitas tersendiri dengan membentuk perkumpulan sendiri, yaitu :

Keluarga Muslim Karo (KAMKA). Dengan terbentuknya organisasi ini, maka secara sosio-psikologis, sebenarnya telah terbentuk suasana kompetitif yang potensial menjadi faktor integratif sekaligus disintegratif dalam masyarakat Karo.

Etnik Simalungun

Masyarakat Simalungun sedikit agak mengalami kesulitan untuk menunjukkan identitasnya di daerah ini. Hal ini disebabkan karena semakin dominannya pengaruh dua etnis besar, yaitu Batak dan Jawa. Oleh karena daerah ini berbatasan dengan tanah Batak, maka orang Batak banyak yang melakukan migrasi ke daerah ini. Demikian juga dengan banyaknya perkebunan karet, sawit, teh maupun coklat di daerah ini, tentunya banyak orang etnis jawa-lah yang paling banyak berperan dalam aktifitas perkebunan.

Dari sudut agama, masyarakat Simalungun utamanya menganut agama Kristen Protestan yang terkenal dengan gerejanya GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). Paling tidak, dari sudut pandang keagamaan, Simalungun kususnya Pematangsiantar, memiliki kedudukan penting karena di sana terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP dan juga sebagai Pusat, paling tidak, tiga gereja besar yaitu selain GKPS adalah GKPI dan HKI. Namun sekalipun Simalungun menjadi *melting pot* tiga etnis utama yaitu : Simalungun, Jawa dan Batak, demikian juga Kristen dan Islam, akan tetapi masyarakat di sana memiliki strategi sendiri untuk membangun harmoni sosial

Etnik Batak

Masyarakat Batak sekalipun wilayah utamanya adalah tanah Batak yaitu Tapanuli Utara ditambah dengan Toba Samosir, akan tetapi etnik dari wilayah ini memiliki keunikan tersendiri. Karena mobilitas sosial mereka sangat tinggi. Mereka melakukan migrasi keberbagai daerah yang berlanjut pada konversi keagamaan. Jauh sebelumnya mereka bermigrasi, misalnya ke daerah Asahan dan mereka melarutkan diri dengan kultur kemelayuan wilayah itu. Yang terjadi selanjutnya ialah, hilangnya marga dan terjadinya konversi agama ke Islam. Proses integrasi yang dikelompokkan sebagai *salad bowl* ini dapat dilihat hasilnya sampai sekarang, sungguhpun terkadang muncul kembali jati diri kebatakan dengan penyantuman marga, akan tetapi mereka sudah merasa memiliki kesadaran kemelayuan. Masyarakat Batak dikelompokkan sebagai penganut Kristen yang dominan di Nusantara yang menghimpun diri dalam HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).

Sungguhpun agama Kristen yang berkembang ke tanah Batak ini pada mulanya ditaburkan di Parausorat Sipirok, akan tetapi perkembangan agama Kristen lebih semarak di tanah Batak daripada di Sipirok. Daerah ini juga masih menyisakan kepercayaan tradisional seperti Parmalim yang terdapat di daerah Laguboti Balige. Tanah Batak juga dihuni oleh penganut Islam yang umumnya terdiri dari orang Minang. Orang-orang Batak yang menganut Islam yang umumnya terdiri dari orang Batak yang berkonversi ke Islam dan juga orang-orang dari etnis Minang. Orang-orang Batak

yang menganut agama Islam biasanya mengelompokkan diri ke dalam perkumpulan Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI)

***Etnik Pesisi*r**

Masyarakat Pesisir adalah mereka yang menghuni wilayah Pantai Barat Sumatera Utara mulai dari Barus sampai ke Natal. Umumnya mereka berasal dari etnik Batak yang ditandai dengan penggunaan sebuah marga di akhir namanya namun mereka telah mengalami konversi ke Islam. Sedang warga Pesisir yang di Natal sebagian berasal dari Minang. Oleh karena itu, kultur Pesisir dapat disebut sebagai gabungan Batak dengan Minang. Kultur Minang yang mereka gunakan adalah berjalannya tradisi *Sumando* (*Semenda*) pada masyarakat Pesisir. Cara ini tentunya sangat berbeda dengan kultur Batak yang menegaskan hegemoni laki-laki dalam sebuah bangunan keluarga. Masyarakat Pesisir pada umumnya telah menganut Islam dan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan upacara adat.

Etnik Mandailing

Masyarakat Mandailing pada dasarnya adalah sebutan kumulatif bagi etnis-etnis yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan yang sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Mandailing Natal. Etnis lain yang dimaksud adalah Angkola-Sipirok, Padanglawas. Yang menjadi ciri utama masyarakat Mandailing adalah sistem kekerabatan seperti pada masyarakat Batak yang terhimpun dalam Dalihan

Natolu, di mana mereka hidup sehari-hari di setiap kampung dibimbing oleh institusi *Hatobangon* sedang dalam prosesi upacara adat dipimpin oleh *wibawa panusunan bulung*.

Dari sudut keagamaan, masyarakat Mandailing umumnya menganut agama Islam. Orientasi pemahaman keagamaan masyarakat Mandailing dikelompokkan kepada Kaum Tua, mengingat kuatnya keinginan mereka di satu sisi menjadi agamawan yang baik dan di pihak lain menjadi orang Mandailing yang beradat. Di antara masyarakat penghuni daerah Mandailing ini juga terdapat penganut Kristen yang dahulunya mereka tergabung dalam gereja HKBPA (Huria Kristen Batak Prosestan-Angkola) dan sekarang menjadi GKPA (Gereja Kristen Protestan Angkola). Dari fakta di lapangan kelihatannya sekalipun di Mandailing ini terdapat perbedaan agama yang dianut, namun mereka dapat bertemu dalam terminologi adat sebagaimana yang terdapat di daerah Sipirok. Perbedaan agama yang dianut tidak menjadi penghalang bagi mereka melakukakn kerjasama untuk kepentingan bersama.

Etnik Fakfak

Masyarakat Fakfak adalah berada di Kabupaten Dairi, karena itu, penyebutan etnis ini sering digabungkan dengan Fakfak Dairi. Masyarakat Fakfak secara umum adalah penganut Kristen Protestan, sungguhpun di sana juga terdapat penganut Islam dan Katholik. Sebagaimana pada daerah-daerah lainnya, kemajemukan masyarakat di dalam anutan agama, akan tetapi juga adat sebagai orang Fakfak

dapat merelatifkan perbedaan anutan teologis itu. Karena sistem kekerabatan melalui adat, masyarakat Dairi hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam hubungan bertetangga, bekerja pada institusi yang sama, dan lain sebagainya secara alami.

Etnik Nias

Masyarakat Nias pada umumnya adalah penganut Kristen Protestan yang terhimpun dalam gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan). Selain dari itu juga terdapat penganut Katholik dan Islam. Masyarakat Islam di Nias umumnya berdiam di daerah pinggiran pantai. Dari segi etnik, masyarakat Islam disana tidak seluruhnya etnis Nias, tetapi adalah merupakan gabungan Nias, Minang dan Aceh. Sekalipun terdapat keragaman agama maupun etnik di Nias, akan tetapi daerah ini juga relatif hidup dalam suasana rukun sungguhpun bukan berarti mereka terbebas sama sekali dari potensi konflik. Agaknya perlu dipikirkan agar kecenderungan ekslusifisme teologis dapat dihindarkan pelan-pelan dari pandangan mereka.

Kehidupan Keagamaan

Pemeluk Agama, Rumah Ibadah, dan Perkembangannya

Propinsi Sumatera Utara, seperti diketahui, merupakan salah satu daerah wilayah Nusantara yang relatif sangat majemuk dilihat dari berbagai aspeknya : suku, agama, dan latar sosial-budaya lainnya. Dalam kaitannya dengan

kehidupan beragama, di Sumatera Utara terdapat dua kelompok penganut agama yang berimbang, yaitu antara Islam dan Kristen (dulu Kristen Protestan). Tabel 1 berikut menggambarkan komposisi pemeluk agama yang berimbang antara kedua penganut agama wahyu tersebut, disamping tingkat pertumbuhannya sejak tahun 1995 hingga 2005.

Tabel 2 : Pemeluk Agama dan Pertumbuhannya Tahun 1995-2005

No	AGAMA	1995	2000	2005	KET
1	Islam	7.345.006	7.557.564	7.625.009	Naik 1,89 %
2	Kristen	2.582.613	3.351.885	3.814.685	Naik 21,79 %
3	Katolik	456.258	598.688	786.918	Naik 17,28 %
4	Hindu	24.270	22.621	50.864	Naik 59,03 %
5	Buddha	250.034	397.508	605.899	Naik 55,71 %
6	Lainnya	85.481	27.134	-	
	Jumlah	10.723.662	11.955.400	12.883.375	

Sumber : ***Data Keagamaan***, Kanwil Departemen Agama, Sumatera Utara, 1995-2005 dan ***Statistik Agama Tahun 2000***, BPS, Jakarta, 2000.

Tabel tersebut di atas, menggambarkan jelas bahwa selama lima belas tahun, jumlah penganut semua agama mengalami kenaikan secara signifikan. Derajat pertumbuhan dari yang tertinggi hingga terendah terjadi secara berurutan , yaitu oleh Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Hal tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan keagamaan oleh pemerintah—dalam hal ini Departemen Agama RI--serta

aspirasi masyarakat/umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah dan penyiaran agama tidak memperoleh kesulitan berarti dari pihak tertentu. Hal ini terbukti pula dari tingkat perkembangan pendirian rumah ibadah yang terjadi selama beberapa tahun.

Terlihat jelas dari tabel 2, pertumbuhan rumah ibadah pada tahun dari tahun 2000 hingga 2005 sangat menggembirakan. Rumah ibadat Buddha, Katolik, dan Kristen mengalami pertumbuhan sangat signifikan, masing-masing mencapai tingkat pertumbuhan 49,03 % , dan 17,29 % dan 9,37 %. Bagi masyarakat Kristen, bahkan, gereja semi-permanen, gereja darurat dan gereja sewa/kontrakan belum termasuk jumlahb tersebut. Padahal, jumlahnya mencapai lebih dari 4.500 buah yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Sementara, Islam dan Hindu mengalami penurunan, dikarenakan beberapa faktor seperti rusak karena musibah, dan lain-lain.

Tabel 2 :
Perkembangan Pendirian Rumah Ibadah
Tahun 2000-2005

NO	AGAMA	TAHUN 2000	TAHUN 2005	KETERANGAN
1	Islam	17.075	13.868	Meliputi Mesjid, Mushala dan Langgar
2	Kristen	8.522	9.321	Jumlah Gereja Permanen. Belum termasuk Semi Permanen (2693 buah), Darurat (1554), dan Gereja Sewa Kontrakan (244 buah).

3	Katolik	1.752	2.055	Meliputi : Gereja, Kapel, dan Gereja Darurat.
4	Hindu	118	52	Meliputi : Kuil, Pura, dan Sanggar. Tidaki termasuk Sanggah Pribadi.
5	Buddha	310	491	Meliputi : Vihara, Cetya, Kelenteng.
6	JUMLAH			

Sumber :

Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2004 dan Rencana Kerja Tahun 2005, Bidang Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, Kanwil Dep. Agama Sumatera Utara, Medan, 2005.

Berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama di satu pihak dan rumah ibadat yang tersedia, adalah jelas bahwa rasio ketersediaan rumah ibadat dengan pemeluk sebagai penggunanya pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3 . Tabel ini menunjukkan bahwa setiap sebuah rumah ibadah bagi muslim--baik berbentuk mesjid, mushala, maupun langgar--rata-rata dipergunakan oleh 549 pemeluknya. Bagi umat Kristen, sebuah gereja besar dipergunakan

oleh 409 pemeluk, sebuah gereja Katolik dipergunakan rata-rata oleh 382 pemeluk, Hindu oleh 978 jiwa, serta Buddha oleh 1234 pengikut. Dengan demikian, tingkat kepadatan rumah ibadah secara berurutan adalah Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen. Dalam hal ini, dilihat dari keleluasaan beribadatnya, tampak bahwa umat Kristen (Protestan) cenderung paling leluasa, apalagi jikalau ditambah dengan gereja semi-permanen, gereja darurat dan gereja sewa kontrakan yang berjumlah 4.491 buah atau hampir separuh dari jumlah gereja permanen (9.321 buah).

Tabel 3 :
Rasio Pemeluk Agama dan Rumah Ibadatnya
Pada Tahun 2005

NO	AGAMA	PEMELUK	R.IBADAT	RASIO
1	Islam	7.625.009	13.868	549
2	Kristen	3.814.685	9.321	409
3	Katolik	786.918	2.055	382
4	Hindu	50.864	52	978
5	Buddha	605.899	491	1234
6	Lainnya	-	-	-
	JUMLAH	12.883.375	25.767	501,76

Organisasi Sosial-Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Ummat

Di wilayah propinsi Sumatera Utara, terdapat sejumlah besar organisasi keagamaan, baik organisasi kemasyarakatan berbentuk kesamaan minat, profesi, kepemudaan, kewanitaan, maupun organisasi berorintasi pada pengembangan doktriner. Tercatat pada tahun 2001, berdasarkan pada Ditsospol Propinsi Dati I Sumatera Utara, organisasi massa berbasis agama adalah sebagai berikut.

Ormas Islam yang terdapat di Sumatera Utara meliputi : Al Ittihadiyah, Al Jami'atul Al Washliyah, Muslimat Al-Washliyah, Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA), Himpunan mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH), Angkatan Putri Al-Wahliyah (APA), Ikatan Putra Al-Washliyah (IPA), Gerakan pemuda Islam (GPI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Ikatan Guru Al Washliyah (IGA), Jami'atul Islamiyah , Jam'iyah Batak Muslim Indonesiaq (JBMI), Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaraoh Indonesia (JATMI), Keluarga Besar Muslim Karo (KBMK), Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama, Katan Da'I Muda Indonesia (IDMI), Forum Komunikasi Da'I Muda Indonesia (FKDMI), Ikatan Sarjana Wanita Muslim Indonesia (ISWAMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majlis Dakwah Islamiyah (MDI), Majelis Muslimin Indonesia (MMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan remaja

Muhammadiyah (IRM), Badan Komunkasi Pemuda Remaja Mesjid (BKPRMI), Badan Kordinasi Muballigh Indonesia (BAKOMUBIN), Badan pembinaan Perpustakaan Mesjid Indonesia (BPTKI) Persatuan tarbiyah Islamiyah (PERTI), Ittihadul Muballighin, Persatuan Pengamal Thariqat Islam (PPTI), Persatuan Karya Ulama (SATKAR ULAMA), Syarikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), Lembaga Kebudayaan Seni Islam (LEKSI), Majelis Budaya Melayu Indonesia, (MABMI), Pembinaan Imasn Tauhid Indonesia (PITI), Ikatan Persaudaraan haji Indonesia (IPHI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pengajian Al Hidayah, Ikatan Wanita Pendakwah Indonesia (IWAPENI), Wanita Islam (WI), Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal-Jamaah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan mahasisdqwa Islam (HMI), Kesatuan Pemuda Muslim Indonesia (KPMI), Badan Kontak Majlim Taklim (BKMT), Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembinaan Islam Rohani (FOKKUS BABINROHIS), Badan Pembinaan Taman Kanak-Kanak Islam, Ikatan Persaudaraan Qori/Qoriah/Hafizh/Hafizhah (IPQOH), Lembaga Retorika Islam (LRI), Ikatan Pemuda Mahasiswa Deli, Keluarga Muslim Karo (KAMKA), Majelis Kerjasama Pakpak Muslim (MIKPAI), Himpunan Mahaiswa Mandailing (HIMA), Pendidikan Intensif Agama Islam (PIAI), Lembaga Pendidikan dan Dakwah (FKLD), Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A), Angkatan Muda Islam

Indonesia (AMII), Yayasan Bina remaja Indonesia, Yayasan Amal Sosial Al-Barokah, Yayasan Pendidikan Syafiyatul Amaliyah, Lembaga Kajian Filsafat Islam (LKFI), Mathla'ul Anwar, Persatuan tarbiyah Islamiyah (PTI), PW Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Persatuan Islam (PERSIS), dan Persatuan Islam Sumatera Utara (PISU).[17]

Ormas Kristen & Katolik yang terdaftar di Sumatera Utara diantaranya adalah Huria Kristen Protestan (HKIP), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Gereja Pantekosta, Gereja Kristen Pantekosta (GKP), Gereja Kristen Indonesia Sumut (GKI) Sumut, Gereja Masehi Pentakosta damai (MASPENDAMAI) Gereja Pentakosta Kudus Indonesia (GEPKIN), Gereja Pentakosta Sion Indonesia (GPSI), Gereja Pentakosta Kristus (GPK), Gereja Pentakosta Sumatera Utara (GPSU), Gereja Sidang Rohulkudus Indonesia (GSRI), Gereja Injil Sepenuh Indonesia (GISI), Gereja Methodist Wesly (GJMW), Gereja Mision Batak (GMB), Gereja Kristen Lutheran Indonesia (GKLI), Gereja Protestan Persekutuan (GPP), Gereja Jemaat Allah Indonesia (GJAI), Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Gereja Siloam Injili (GSI), Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Angiolua Fa'owoso Yesus Nias (AFY), Gereja Methodist Indonesia (GMI), Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI), Gereja Persekutuan Kristen (CCA), Gereja

---

[17] Sumber : ***Data Lembaga Dakwah/Ormas Islam Tingkat I Propinsi Sumatera Utara 2004-2005***, Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Depag Sumatera Utara; dan ***Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2000***, Ditsospol Sumatera Utara.

Penyebaran Injil Indonesia (GPII), Gereja Pentakosta Sion Indonesia (GPSI), Gereja Merdeka Protestan Indonesia (GMPI), Gereja Protestan Persekutuan (GPP), Gereja Elim di Indonesia (GEDI), Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI), Gereja Injil Kristus Indonesia (GIKI), Gereja Kristen Pakpak dairi (GKPPD), Banua Nina Kariso Protestan (BNKP), Orahua Niha Kariso Protestan (ONKP), Gereja Angorahuafa'awosa Kho Geheha (AFG), Gereja Angolua Masehi Indonesia NIAS (AMIN), Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI), Gereja Allah di Indonesia (GADI), Gereja Merdeka Protestan indonesia (GMPI), Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA), Gereja Kristen Anugerah (GKP-ANUGERAH), Gereja Bethel Rohulkudus (GBR), Gereja Alkitab Presbyterian Protestan (GAPPI), Gereja Kristen Indonesia Protestan (GKIP), Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup (GPI-SAH), Jemaat Kristen Rasuli (GKR), Persekutuan Kristen Antar Universitas, dll.[18] Selain itu, di Sumatera Utara terdapat pula organisasi/lembaga sosial-keagamaan Kristen yang dikelola oleh Yayasan/Induk Gereja di Sumatera Utara yang aktif dalam pengembangan masyuarakat terutama umatnya. Diantaranya adalah : Yayasan Sortaria, Yayasan perseklutuan Pengusaha, Yayasan Perkabaran Injil Agave Menara Plasa, Yayasan Samaria, Yayasan Pekabaran Injil Bukit Jaitun, Yayasan Medan Praise Center, Perkumpulan persekutuan Pekabaran Injil Maranatha (PPIM), Yayasan Sola Gratia, Yayasan Bethesda Indonesia, Yayuasan Pelayanan Kristen Betsaida, Yayasan Pelayanan

[18] Sumber : Pembimas Katolik, Kanwil Departemen Agama, Sumatera Utara, data tahun 2004.

Kasih Eklesia, Yayasan Pelayanan Oikumene, Yayasan Persekutuan Kristen Antar Universitas, Yayasan pemberitaan Alkitab, Yayasan Iman Indonesia, Yayasan pendidikan Gereja Methodis Indonesia, Yayayan Pelayanan Kasih Petra, Yayasan Perkabaran Injil Soli Deo Gloria, Yayasan medan Ceria, Yayasan Pekabaran Injil Tubuh Kristus, Yayasan Misi Amanat Agung, Yayasan Ratu Ester, Yayasan Persekutuan Doa dan Penelaahan Alkitab Sumut, Yayasan Elim, Yayasan Persekutuan Doa matius, Yayasan Lembaga Penginjilan, Yayasan Ikatan keluarga Pengacara/Penasehat Hukum Immanuel, Yayasan Amanat Agung Medan, Yayasan Persekutuan Perkabaran Injil Hosana Sumatera utara, Yayasan Peduli Bangsa, Yayasan Isa Almasih, _Persektuan Doa Kuasa Roh Kudus Bercampur Api, Yayasan Panti Asuhan Anak dan Panti Jompo Internasional Yesus Kristus, dan Yayasan Misi Remaja.[19]

Yayasan-yayasan keagamaan atau lembaga sosial-keagamaan tersebut umumnya menyelenggarakan kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan misionaris dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas keimanan dan komunitas Kristiani.

Di lingkungan Katolik, demikian pula, terdapat sejumlah besar yayasan yang bergelut dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Tak kurang dari 62 buah lembaga sosial keagamaan Katolik yang tumbuh berkembang di Propinsi Sumatera Utara, yang

---

[19] Data pada Pembimas Kristen, Kanwil Depag Propinsi Sumateera Utara.

berkiprah di bidang karya sosial (21 buah) dan kesehatan (41 buah). Dalam bidang karya sosial, misalnya, : Yatim Piatu (6 buah), Tuna-netra (3 buah), Tuna-rungu (1 buah), Panti Jompo/Manula, Anak terlantar (2 buah), dan lainnya 8 buah. Sedang lembaga sosial berkecimpung dalam bidang karya kesehatan yang dimiliki Katolik hingga tahun 2004 adalah : BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) sebanyak 4 buah, Rumah Sakit (2 buah, Rumah bersalin (4 buah), Balai pengobatan (29 buah), Rumah sakit Kusta (sebuah), Puskesmas 1 buah.[20]

Sementara di lingkungan masyarakat Hindu dan Buddha terdapat sejumlah Ormas Hindu dan Buddha yang beraktifitas di bidang pengambangan kemasyarakat dan peningkatan kualitas keagamaan di lingkungan komunitasnya. Ormas tersebut diantaranya adalah Majlis Agama Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI), Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Yayasan Pandita Sabha Dharma Ekayana (NSI), Majelis Agama Buddha Theraavada Indonesia (Magha Budhi), Majelis Agama Buddha Tantrayana Indonesia (MADHA TANTRI), Majelis Eka Dharma Indonesia (MEDI), Parisada Buddha Dharma Niceren Syosyu Indonesia (PBD-NSIO) Sumatera Utara, Perwakilan Ummat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatara Utara, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara, Selain itu, sejumlah himpunan penganut kepercayaan yang berkiprah dalam bidang

[20] **Sumber** : Kasi/Penyelenggara Bimas Katolik Kanwil Depag Sumatera Utara.

Keuskupan Agung Medan.

pengembangan dan pemeliharaan kepercayaan mereka, diantaranya adalah (1) Pungguan Parmalim Bale Partongan Huta Tinggi Lagu Boti, (2) Paguyuban Ngesti Tunggal, dan (3) Persatuan Warga Teosofi Indonesia (PWTI) Sumatera Utara.[21]

Namun demikian, dari sejumlah besar organisasi kemasyarakatan dan keagamaan tersebut yang terdapat di Sumatra utara, menurut Kasubdit Pembinaan Umum dan pembinaan masyarakat Sumatera Utara, terdapat 5 (lima) ormas besar yang bertahan serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keagamaan di Sumatera Utara adalah Huria Kristen batak Protestan (HKBP), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Washliyah, dan Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI). Meski demikian, Gereja-gereja Kristen lainnya, seperti Gereja Pantekosta, Gereja Injili, serta sejumlah besar lembaga sosial-keagamaan yang berada di bawah binaan Gereja Kristen maupun Katolik juga semakin kuat pengaruh dan kontribusinya bagi perubahan sosial di masyarakat Sumatera Utara.

Dalam bidang pendidikan, yang merupakan bidang sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia, di Sumatera Utara juga tumbuh berkembang sangat pesat lembaga-lembaga pendidikan agama dan kegamaan serta lembaga pendidikan umum yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan.

---

[21] Sumber : Data dari Pembimas Hindu dan Buddha, Kanwil Departemen Agama , Sumatera Utara, tahun 2004.

Dalam lingkungan masyarakat Islam, selain terdapat sejumlah besar madrasah, baik negeri maupun swasta, sejak jenjang pendidikan tingkat Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah, yang tersebar di semua wilayah kabupaten atau kota, juga terdapat sejumlah besar pondok pesantren yang mencapai lebih dari 200-an buah yang tersebar di Sumatera Utara. Di pondok pesantren ini, selain mengajarkan pendidikan agama untuk "*tafaqquh fid dien*", [22]juga dari jumlah pondok pesantren ini terdapat 31 Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program wajib belajar (Wajar) 9 tahun.[23]

Di lingkungan umat Kristiani, terdapat sejumlah besar lembaga pendidikan, baik pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan menengah dan atas serta tingkat perguruan tinggi.

---

[22] *Tafaqquh fiddien* adalah bentuk pendidikan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan keagamaan Islam. Dengan kata lain, tujuan *tafaqquh fiddien* adalah mencetak ahli (orang yang faham) tentang agama islam.

[23] ***Laporan Kepala Bidang Pekapontren dan Penamas***, Kanwil Depag Sumut, 2005..

Tabel 4
Pendidikan di Lingkungan Umat Kristen
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Sumatera Utara[24]

No.	Jenjang	Seko -lah	Jumlah Murid	Junmlah Guru	Keterngan
1	Sekolah Minggu	-	-	7.066	Tak ada data, hampir semua gereja Kristen ada Sekolah Minggu.
2	SD	1027	152.556	486	Selain, 286.157 murid Kristen di 8387 SDN, oleh 3570 guru Kristen tetap dan tidak tetap.
3	SLTP	1129	83.393	636	Selain 98.259 murid Kristen pada 626 SLTP Negeri, diasuh oleh 548 guru (tetap dan tidak tetap)
4	SLTA	642	103.226	554	Belum termasuk 92.823 pada 461 SLTA Negeri, oleh 437 guru tetap dan tidak tetap.
5	PT	-	-	-	Tidak tdpt data jelas.
6	Jumlah				

Sumber :

[24] Berdasarkan ***Laporan Pembimas Kristen Kanwil Depag Sumatera Utara, 2004***

Demikian pula, masyarakat Katolik Sumatera Utara memiliki sejumlah besar lembaga pendidikan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5
Pendidikan di Lingkungan Umat Katolik
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Sumatera Utara[25]

No.	Jenjang	Jml. Sek	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Keterangan
1	Sekolah Minggu/TK	38	1115	38	Tak ada data, hampir semua gereja Katolik ada Sekolah Minggu.
2	SD	80	8303	79	Ditambah 47472 murid Katolik belajar di 4514 SD Negeri, diajar oleh 867 guru (Katolik) tetap negeri.
3	SLTP	66	16485	64	Selain 22692 murid belajar di 483 SLTP, oleh 37 guru tetap negeri
4	SLTA	35	5615	35	Selain 12289 murid di 203 SLTA Negeri, oleh 9 guru Katolik.

[25] Dianalisis berdasar ***Laporan Pembimas Katolik, Kan wil Depag, Sumut, tahun 2004***.

5	PT	16	632	6	Jumlah ini hanya sekolah Alkitab, tidak termasuk universitas untuk umum yang diselenggarakan oleh yayasan Katolik
	Jumlah	235	32150	222	

Hal yang sama, umat Hindu juga menyelenggarakan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama Hindu. Tercatat sebanyak 25 *pasraman*[26] di seluruh Sumatera Utara. Di kota Medan terdapat 9 buah pasraman, yaitu pasraman : Raksa Buana, Raksana, Ganesa, Kaliamman dan lima buah pasraman Shree Mariamman; Kota binjai memiliki 2 buah pasraman Shree Mariamman, Kabupaten Deli Serdang 6 buah, yaitu pasraman : Dharma Raksasa, Persadanta, Ermuti Jadi Buah, Syiwa, Shri Tandayudhabani, dan Shree Mariamman; Kabupaten Karo 3, yaitu pasraman Sitelu Sada, Desa Siwaloh, Dharma Pratama; Kabupaten Langka 3 buah, yaitu pasraman Widya Lokanata dan Siwan, serta Kabupaten Asahan (Pasraman Sri Murugen), Kabupaten Labuhan Batu (Pasraman Jagadhita, dan Kota Pematang Siantar 1 buah (Pasraman Jagadhita Toba).

[26] Sejenis “pondok pesantren”, dalam Islam. Pasraman merupakan model pendidikan keagamaan, dimana cantrik (murid)nya dipondokkan (di-*boarding*). Pasraman bertujuan untu mengkader, mencetak pamuka agama—atau orang yang memberi pelayanan kepada ummat Hindu.

Berdasarkan data tersebut di atas tentang jumlah pemeluk, lembaga sosial-keagamaan dan lembaga pendidikan masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan buddha), terlihat jelas bahwa masyarakat Sumatera dilihat dari latar sosial dan pendidikan sangat majemuk. Lembaga-lembaga sosial-keagamaan atau pun pendidikan di daerah ini tumbuh subur tanpa hambatan berarti dari kelompok yang berbeda. Walau, tentu saja, dalam kontek kemajemukan dan perkembangan organisasi/lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, secara komunikational, sering terjadi kompetisi yang tajam dalam rangka kepentingan kelompoknya.

Dari berbagai hal yang telah disebutkan di atas, yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama di wilayah Sumatera Utara ini,masih terdapat beberapa unsur lain yang dapat mengarah kepada terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama.

Pertama, masih kuatnya nilai budaya lokal masyarakat (*local culture*)[27]. Masyarakat Sumatera Utara terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai rasa kekerabatan/kekeluargaan tinggi. Masyarakat mempunyai rasionalitas yang tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pihak yang menginginkan Sumatera Utara kacau. Hal ini terbukti dengan banyaknya kejadian-kejadian yang mengarah kepada SARA, bom yang diledakkan di geraja salah satu contoh. Selain itu pada pemilihan umum yang baru lalu terbukti hasil perolehan

---

[27] Tata nilai, norma, tradisi (adat-istiafat) dan karya lokal lainnya yang berlaku di masyarakat lokal, masyarakat setempat, atau pada komunitas suku tertentu.

surat dari partai-partai baru tidak memadai karena masyarakat masih belum tahu sejauhmana kelebihan-kelebihan partai baru dibanding dengan partai-partai lama.

Kedua, terjadinya proses pembauran antar etnis baik pendatang maupun etnis asli umatera Utara yang cukup intim antar satu dengan yang lain khususnya yang berada di daerah-daerah perkotaan.

Ketiga, terjadinya asimilasi sebagai akibat dari perkawinan atau asimilasi antar penduduk sehingga menimbulkan kekerabatan yang lebih dekat lagi.

Keempat,tumbuhnya sikap saling membutuhkan, hal ini terjadi pada lingkungan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan lain-lain.

Kelima, mencairnya kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat, dimana kesenjangan sosial-ekonomi antar pribumi tidak terlalu lebar/besar. Walau diakui bahwa masih terdapat kesenjangan sosial-ekonomi antar pribumi dengan etnis Tionghwa.

Keenam,Budaya saling menghormati antara satu dengan yang lain baik antar suku maupun antar agama.

Ketujuh, pemerintah yang cukup adil memperlakukan semua unsur masyarakat dan agama.

Kedelapan, pemerintah dan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat bekerjasama dalam menangkal masuknya provokator dari luar daerah, dengan sistem tidak mudah menerima isu-isu sebelum mengklarifikasi terlebih dahulu

sesuai dengan ajaran agama dan segera mengadakan jumpa pers untuk meredam gejolak jika terjadi suatu peristiwa.

Adapun hal-hal yang dianggap memiliki potensi konflik di wilayah Sumatera Utara adalah :

Pertama, tumbuhnya egoisme keagamaan yang sempit. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan antar umat beriman bahkan terjadi juga di dalam umat seiman.

Kedua, rendahnya pemahaman keagamaan yang umumnya masih berkisar pada tataran simbolik. Pemahaman pada tataran simbolik ini tentunya berdampak pada bahwa perbedaan simbolik akan dipandang sebagai perbedaan esensi.

Ketiga, terdapatnya beberapa sekte dalam agama tertentu yang memaksanakan kehendak bahkan mengajak orang yang telah beragama untuk mengikuti agamanya dengan berbagai cara, misalnya melalui perkawinan, bantuan-bantuan dan sebagainya.

Keempat, masalah perjudian yang belum tertangani dengan baik bahkan ada kesan mendapat perlindungan dari oknum aparat.

Kelima, budaya minum-minuman keras oleh sebagian masyarakat tertentu yang tanpa mengindahkan lingkungan.

Keenam, terdapatnya adat Batak yang "buruk" saat terjadi musibah kematian keluarga. Mereka berkumpul membunyikan terompet dan lainnya selama beberapa hari secara terus menerus tanpa memperhatikan tetangga sekitar.

Ketujuh, penggunaan pengeras suara di masjid-masjid yang kurang memperhatikan ketentuan yang telah diatur pemerintah (Menteri Agama).

Kedelapan. pendirian rumah ibadah yang masih belum memperhatikan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini dari pihak Kristen menuntut agar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dicabut. Ada kasus seorang Kristen mengontrak rumah milik seorang muslim kemudian rumah tersebut dijadikan tempat ibadah oleh pemilik rumah diprotes dan menjadi masalah karena yang mengontrak tidak terima dan merasa bahwa dia berhak menggunakan sekehendaknya bahkan mempersilahkan untuk diajukan ke pengadilan.

Di Tapanuli Tengah ada kasus beberapa orang pemuda Kristen dengan sengaja memakai peci haji dan masuk ke tempat-tempat maksiat, sehingga menimbulkan kesan perilaku orang muslim tidak baik.

Kasus-Kasus SARA

Terdapat sejumlah kasus SARA (kasus terkait dengan Suku, Agama, Ras, dan Agama) yang muncul dalam waktu sepuluh tahun terakhir di Propinsi Sumatera Utara. Namun demikian, jumlah yang pasti tidak dapat diperoleh namun diperkirakan lebih dari 40 kasus. Pada tahun 2000 saja kasus-kasus yang bernuansa SARA, baik yang berupa bom meledak,

maupun ancaman berupa teror bahwa akan diledakkan bom di suatu tempat, menurut data yang dihimpun oleh BAKUM SU sebanyak 19 kali. Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4

Peristiwa peledakan Bom dan Aksi Teror/Kekerasan di Medan Tahun 2000

No	Bulan	Peristiwa	Tempat kejadian	Korban
1.	28/5	Bom meledak saat ibadah pagi	Gereja GKPI padang Bulan Medan	23 luka ringan dan 3 luka parah
2.	28/5	Bom ditemukan siap meledak	Lingkungan gereja HKBP Sudirman Medan	Tidak ada
3.	28/5	Bom ditemukan siap meledak	Ruang Konsistori Gereja Kristus Raja Jl. MT. Haryono	Tidak ada
4.	29/5	Bom meledak pagi hari	Restoran Miramar Medan	4 orang luka-luka
5.	2/6	Ditemukan bahan peledak aktif berbentuk roket	Showroom motor di Lubuk Pakam	Tidak ada
6.	17/8	Bom meledak	Pinggiran sungai babura	Tidak ada

7.	20/8	Bom meledak	GKII Bunga Kenanga	Tidak ada
8.	27/8	Bom meledak malam hari	Bengkel Sepeda	Tidak ada
9.	27/8	Bom meledak	Di depan rumah Pendeta GMI J. Sitorus	1 orang anak Pendeta luka
10.	14/9	Ancaman bom lewat telepon	Medan Plaza	Tidak ada
11.	15/9	Ancaman bom lewat telepon	Pusat Pasar petisah	Tidak ada
12.	17/9	Penembakan terhadap mobil Pdt Benyamin Munthe (GKII) yang sedang berjalan	Jl. Mojopahit Medan	1 meninggal super pendeta
13.	3/10	Ancaman bom melalui telepon	Universitas Sumut	Tidak ada
14.	29/10	Penembakan terhadap mobil Penatua Gereja GBKP marga subakti	Di Jalan Sekitar Padang Bulan	Penatua marga surbakti luka
15.	12/11	Bom meledak saat perayaan HUT PGI di Hall Pardede	Persimpangan Jl. Syailendra dn Jl. Matraman	2 orang tua
16.	14/11	Ancaman bom	Rumah keluaga Tarigan Beru Sulingga	Tidak ada

17.	21/11	Ancaman bom menimbulkan kepanikan	Universitas Sisingamaraja	Tidak ada
18.	22/11	Ditemukan 2 bom aktif	Di dalam Bus Makmur	Tidak ada
19.	23/11	Ancaman bom menimbulkan kepanikan	Universitas HKBP Nonmensen Medan	Tidak ada

Sumber : BAKUM Sumatera Utara.

Dari beberapa kasus yang terjadi di atas, terlihat tidak melibatkan massa. Namun, kasus-kasus ini cenderung merupakan usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu yang biasa disebut provokator untuk menyulut massa menjadi bentrok antar penganut agama karena terlihat dari sejumlah kejadian dilakukan ditempat-tempat atau terhadap pihak-pihak yang menyandang simbol agama seperti gereja dan pendeta.

Kerusuhan SARA terakhir hanya berkaitan dengan kasus kerusuhan massa yang terjadi 4 April 2001 lalu, yang mengakibatkan satu meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka, dikenal sebagai "Kasus Muara Sipongi". Kasus ini diawali oleh protes warga terhadap warung remang-remang yang disinyalir menyediakan wanita-wanita penghibur para sopir yang sedang melepas lelah.

Kronologis kejadiannya sendiri adalah sebagai berikut: Pada akhir Maret 2001, warga Kecamatan Muara Sipongi mendatangi lokasi warung remang-remang yang disinyalir dilindungi oknum polisi. Ini mereka lakukan sebagai langkah

terakhir, setelah mereka memprotesnya berkali-kali namun tidak digubris. Sesampainya di lokasi warga semakin emosi setelah mendapatkan Kepala Desa Kota Beringin dan Anto sedang asyik berada di lokasi. Warga melampiaskan emosinya dengan membakar warung-warung maksiat itu, dan karena dianggap menghalangi, maka anggota warga bernama Syahdan dan Anto menjadi sasaran amukan massa yang marah.

Karena tidak dapat menerima perlakuan massa terhadap diri mereka, Syahdan dan Anto hari itu juga melaporkan kejadiannya kepada Kapolsek Muara Sipongi. Atas laporan itu beberapa orang polisi ditugaskna menuju ke Pinyongek untuk melakukan penyelidikan. Dalam perjalanan ke Pinyongek petugas langsung dihadang oleh warga, terjadilah adu mulut bahkan diantara polisi yang bertugas itu ada yang membentak warga bahkan mengeluarkan tembakan ke udara, tentu saja warga merasa tersinggung dan karena telah tersulut emosi warga langsung mengeroyok keempat polisi yang bertugas sehingga dua diantaranya yang tidak dapat meloloskan dari terkena pukulan dan bahkan sampai kepala dan kening robek dan sempat menginap di rumah sakit.

Atas kejadian pemukulan terhadap kedua polisi itu, muspika dan tokoh masyarakat sempat mengadakan musyawarah dan dinyatakan Kapolsek Muara Sipongi, Ipda R. Ginting bahwa kedua belah pihak telah berdamai, anak buahnya akan menjadi tanggungan atasannya. Rupanya, aparat ingin menangkap penduduk yang diduga melakukan

penganiayaan terhadap polisi, sehingga Kapolres Tapanuli Selatan yang sekaligus masih merangkap Kabupaten Mandailing Natal memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para pelaku penganiayaan.

Selasa, 3 April 2001 pasukan polisi yang dipimpin oleh Iptu D. Aruan (Wakasat Sabhara) dan Iptu I. Siregar (Kanit Restik) menyisir Desa Pinyongek. Rumah-rumah penduduk digeledah, bahkan ada warga yang dikejar sampai ke persawahan. Sebagian tokoh masyarakat Pinyongek sudah memperingatkan polisi agar tidak berlaku kasar terhadap warga, namun polisi tidak mengurungkan niat mereka. Akhirnya polisi menangkap empat orang warga Pinyongek dengan tuduhan menganiaya polisi yang sedang bertugas. Warga tidak dapat menerima penangkapan terhadap kawan mereka, yang pada keesokan harinya warga bergerak ke Mapolsek Muara Sipongi untuk membebaskan rekan-rekan mereka, sehingga terjadilah bentrokan antara polisi dengan warga yang mengakibatkan satu meninggal dan belasan lainnya luka-luka.

Atas peristiwa ini, banyak kalangan termasuk Bupati dan Ketu DPRD Tk. II Mandailing Natal mengecam dan menyesalkan terjadinya kasus ini, bahkan meminta Kapolri mencopot Kapolres dari jabatannya. Kepala Kanwil Departemen Agama yang kebetulan putra daerah dan bebera masyarakat asal Mandailing Natal menyesalkan terjadinya peristiwa ini dan mengadakan kunjungan ke tempat kejadian perkara serta memberikan bantuan.

Terhadap terjadinya bentrok itu sendiri masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapat serangan terlebih dahulu. Dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa warga telah menyerang Mapolsek, sedangkan dari pihak warga mengatakan bahwa belum sampai ke Mapolsek, seorang korban menuturkan bahwa sengaja dalam barisan mereka menaruh wanita di barisan depan untuk meredam emosi kedua belah pihak. Namun sesampai di Mapolsek mereka dihadang oleh Barikade polisi yang menghadang mereka dan ketika negosiasi tengah berjalan tiba-tiba terdengar kaca dan kantor Mapolsek. Tidak jelas siapa yang melempar, namun karena petugas telah siap siaga, langsung bereaksi dan mengeluarkan tembakan dan terjadilah bentrokan.

Pembinaan Kerukunan oleh Pemerintah

Masyarakat sumatera Utara sebagaimana telah diungkapkan di atas, adalah masyarakat yang majemuk baik dari segi agama maupun etnis budaya. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam bidang agama (kerukunan hidup umat beragama).

Kehidupan keagamaan di Propinsi Sumatera Utara secara umum berjalan cukup baik, terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan serasi. Namun demikian kehidupan keagamaan perlu terus dibina, dikembangkan dan diawasi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan diantara umat beragama itu sendiri.

Dampak dari berbagai krisis yang melanda bangsa kita, timbul berbagai tindakan-tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak dan cenderung bebas tanpa batas. Hal tersebut sangat rentan terhadap timbulnya konflik baik antar agama maupun antar etnis. Untuk itu pemerintah daerah telah menetapkan sasaran pembangunan di bidang agama diarahkan kepada antara lain :

Pertama, mendorong peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, mewujudkan kerukunan hidup masyarakat dan kehidupan keagamaan yang harmonis dan masyarakat tidak mudah dihasut, diadu domba dengan memunculkan masalah SARA serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Ketiga, meningkatkan pengamalan ajaran agama termasuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

Dalam rangka pembangunan nasional diperlukan ketenangan dan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, termasuk mantapnya kerukunan hidup umat beragama. Kemantapan kerukunan hidup umat beragama mutlak diperlukan, oleh karena itu, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kemantapan kerukunan hidup umat beragama pada tahun 2000 hingga awal 2001 ini, telah dilaksanakan secara terkoordinir antara

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatra Utara, Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Sumatera Utara (FKPA-SU) dan Lembaga Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Sumatera Utara (LPKUB-SU) beberapa kegiatan diantaranya :

1. Penyuluhan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu dan kota Sibolga.
2. Dialog kerukunan guru-guru antar agama se-Sumatera Utara.
3. Pertemuan dan Silaturahmi tokoh-tokoh antar agama se-Sumatera Utara.
4. Dialog kerukunan muballigh dan atau pengkhotbah antar agama se-Sumatera Utara.
5. Membuat surat Edaran tentang bulan suci Ramadhan 1420 Hijriyah.

Selain kegiatan pembinaan yang telah disebutkan di atas juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Sumatera Utara (FKPA-SU) yang pendanaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan pertemuan antara pimpnan majelis-majelis agama dengan Muspida Sumatera Utara di Gedung Testak PTPN II.

2. Melaksanakan pertemuan secara berkala dengan majelis-majelis agama bertempat di kantor majelis-majelis agama secara bergantian.
3. Pertemuan silahturahmi FKPA dan tokoh-tokoh pemuda antar agama di Wisma Maryaman.
4. Pertemuan silaturahmi FKPA dengan tokoh-tokoh perempuan antar agama.
5. Pertemuan dengan para Rektor Perguruan Tinggi Agama se Sumatera Utara di GKBP Sibolangit.
6. Seminar sehari tentang konsep kemajemukan umat beragama menuju Indonesia Baru.
7. Sumatera Utara Berdoa dilaksanakan di Lapangan Banten Medan.
8. Silaturahmi dalam bentuk *coffe morning* FKPA dengan Ketua DPR RI Ir Akbar Tanjung di Hotel Tiara Medan.
9. Melakukan diskusi-diskusi multikultural yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan saling pengertian diantara tokoh-tokoh agama juga telah diterbitkan buku Ensklopedi Kerukunan Hidup Umat Beragama berupa pedoman praktis yang penyusunannya diserahkan kepada LPKUB Medan dan buku tersebut disebar luaskan melalui majelis-majelis agama.

Dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini cukup banyak pihak yang mengakui keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemda Sumatera Utara maupun oleh Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Sumatera Utara (FKPA-SU). Peristiwa yang menggemparkan pada tahun 2000 yaitu ledakan bom di berbagai tempat termasuk rumah ibadah di Medan dan adanya ancaman bom terhadap tokoh-tokoh agama yang kesemuanya cukup mengejutkan dan mengusik ketenangan umat beragama.

Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan persepsi atas peristiwa peledakan bom tersebut, seluruh tokoh dan pemuka agama beserta Pempropsu dan Muspida berkumpul bersama untuk merumuskan solusi terbaik bagi terwujudnya keamanan, persatuan dan kesatuan dengan disepakatinya pernyataan bersama masing-masing pemuka agama supaya umat beragama tidak terpancing dengan kejadian dimaksud.

Telah timbul kesadaran yang tinggi dari pemuka agama (ulama, pendeta, pastor, bikku dan pendita) maupun para tokoh agama dan cendekiawan dalam memotivasi umat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan di Sumatera Utara, sehingga umat beragama telah menyadari benar akan peran dan tanggung jawabnya dalam mengisi pembangunan dimana pada hakekatnya pelaksanaan dan sukses pembangunan itu berada di tangan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Dari serentetan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan temuan sebagai berikut.

Pertama, salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan "Politik Kerukunan" seperti pembentukan Majelis-majelis agama, membentuk wadah kerukunan antar umat beragama dan mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan tokoh agama melalui dialog-dialog dan kontak-kotak pribadi.

Kedua, telah berkembang pula bentuk-bentuk mekanisme sosial yang diprakarsai oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah ketidak rukunan baik itu internal suatu agama atau antar umat beragama, istilah yang digunakan disebut "pola kerukunan" yang fungsional untuk suatu wilayah geografis tertentu.

Ketiga, dari mekanisme sosial yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat tampaknya belum cukup handal untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang melibatkan simbol-simbol agama tanpa mengabaikan faktor-faktor non agama sebagai pemicu lainnya.

Keempat, sebagai upaya serius untuk mencegah timbulnya ketidak rukunan/konflik maka pemetaan masalah

keagamaan secara menyeluruh baik yang menimbulkan kerukunan maupun ketidak rukunan perlu dilakukan.

Keempat, Propinsi Sumatera Utara merupakan wilayah ke empat terbesar penduduknya di Indonesia setelah Propinsi Jawa barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu propinsi ini terkenal dengan kemajemukannya baik dilihat dari segi agama, budaya maupun etnis. Oleh karena itu, wilayah ini sangat rentan terhadap konflik, khususnya konflik antar umat beragama.

*Kelima, p*otensi konflik yang berkaitan dengan langsung dengan masalah agama pada umumnya menyangkut etika berkomunikasi, yaitu tata cara beribadah masing-masing pemeluk agama yang ada dan berkenaan dengan penyebaran agama yang dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

*Keenam, p*otensi konflik lain yang dirasakan adalah belum sepenuhnya terbuka kesadaran sebagian pemimpin-pemimpin agama untuk dapat menerima kenyataan kemajemukan kita, hal ini masih dapat dirasakan adanya sebagian pemimpin-pemimpin agama yang masih memaksakan kehendak tanpa perduli terhadap ketersinggungan dari pihak lain dalam menyampaikan pesan-pesan agamanya.

*Ketujuh, p*engetahuan multikultural umat beragama baru sebatas orang-orang tertentu dan baru sebatas pengakuan bahwa ada penganut agama lain selain agamanya sendiri belum sampai pada pengetahuan tentang ajaran

agama orang lain dan bahkan pengetahuan tentang ajaran agama sendiri masih sangat minim.

*Kedelapan, t*erbentuknya Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Sumatera Utara (FKPA-SU) yang diprakarsai oleh Tokoh-tokoh/pemuka/majelis agama yang mendapat dukungan penuh oleh pemerintah daerah dirasakan oleh semua pihak sangat membantu dalam meredam gejolak-gejolak yang timbul akhir-akhir ini dan bahkan dapat lebih mengeratkan hubungan antar pemeluk agama yang akhirnya dapat menumbuhkan kerukunan hidup antar umat beragama di Sumatera Utara.

*Kesembilan, s*alah satu faktor penyebab ketidak-berhasilan para provokator dalam menjalankan aksinya untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai wilayah konflik dengan aksi teror bomnya adalah bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki sistem kekerabatan dan persaudaraan, dan rasionalitas yang cukup tinggi sehingga tidak muda terprovokasi, selain hubungan antar pemuka/tokoh-tokoh agama se-Sumatera Utara cukup baik melalui dialog-dialog dan silaturahmi yang mereka lakukan sebagaimana yang telah menjadi program bersama dalam Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama Sumatera Utara (FKPA-SU)

Implikasi

Kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan kehidupan beragama khususnya, secara sosio-

kultural maupun sosio-politik, ditengarai dengan sejumlah besar karakteristik kemajemukan eknik, ras, agama, status sosial-ekonomi, dan sejumlah besar kepentingan individu dan kelompok. Kondisi sosial seperti ini, pada tingkat perlakukan tertentu dapat menjadi suatu potensi besar bagi pengembangan Sumatera Utara sebagai daerah yang memiliki ketahanan dan daya resistensi kuat dari faktor-faktor disintegratif dan destruktif. Sebaliknya, kondisi konkret realitas kehidupan masyarakat Sumatera Utara seperti ini juga merupakan wilayah yang relatif sangat rentan terhadap proses disintegrasi sosial. Kecenderung-kecenderungan terjadinya konflik sosial—apapun bentuk dan motifnya—dapat saja terjadi jika tidak diberikan perlakuan (*social treatment*) yang tepat dan memadai sesuai tuntutan dinamika perkembangan masyarakat.

Saran

Berpijak pada kesimpulan dan analisis implikatif di atas, berikut ini dipaparkan sejumlah saran.

Pertama, perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi program/kegiatan dialog, pertemuan dan sejenisnya dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat luas. Wadah-wadah kerukunan yang sudah terbentuk baik wadah yang diprakarsai oleh Pemerintah maupun masyarakat perlu didorong atau difasilitasi sehingga lebih fungsional dan kontributif bagi pengembangan masyarakat.

Kedua, diperlukan upaya penegakkan hukum secara maksimal. Upaya ini, bagi daerah berpenduduk besar dan berlatar kemajemukan seperti ibukota Sumatera Utara yang nota bene merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, sangat diperlukan. Ketertiban, kedisiplinan dan keadilan hukum menjadi program yang harus diwujudkan secara memadai dalam upaya mencegah munculnya berbagai bentuk konflik sosial.

Ketiga, perlunya pengembangan budaya dan kearifan lokal yang kontributif bagi penguatan integrasi masyarakat, baik integrasi kultural, integrasi normatif, maupun integrasi politik yang mengarah pada penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(CFY).**

Pustaka Rujukan

Data Lembaga Dakwah/Ormas Islam Tingkat I Propinsi Sumatera Utara 2004-2005, Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Depag Sumatera Utara; dan ***Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2000***, Ditsospol Sumatera Utara.

Pembimas Katolik, Kanwil Departemen Agama, Sumatera Utara, *Data Tahun 2004*.

Pembimas Kristen, Kanwil Depag Propinsi Sumateera Utara, *Data Tahun 2004*.

Pembimas Hindu dan Buddha, Kanwil Departemen Agama , Sumatera Utara, *Data Umat Buddha Tahun 2004*.

Laporan Kepala Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Depag Sumut, 2005..

Laporan Pembimas Kristen Kanwil Depag Sumatera Utara, 2004

(II)

SUMATERA BARAT

Kondisi Geografik

Propinsi Sumatera Barat terletak pada 0'54' LU dan 3'30' LS, serta 98'36 BT dan 101'53' BB. Luas wilayah 42.2229,64 Km2. Secara administratif,. Propinsi Sumatera Barat, terbagi ke dalam 9 wilayah kabupaten dan 6 kotamadya/kota. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Solok, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Sedang keenam wilayah Kota, meliputi: Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. Selain terbagi atas 9 kabupaten dan 6 kota, Propinsi Sumatera Barat juga terbagi atas 120 kecamatan, 1766 desa, dan 398 kelurahan.

Sementara jumlah Nagari sebanyak 516 buah. Diantara jumlah desar tersebut, sebanyak 688 buiah desa terkategori desa miskin. Berdasarkan data tersebut, secara sosio-

ekonomik, sepertiga desa/keluarah di wilayah Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah desa miskin.

Berdasarkan data kependudukan terakhir, Sumatera Barat berpenduduk 4.241.605 jiwa, dengan sebaran penduduk terbanyak di Kota Padang mencapai 713.242 jiwa, disusul Kabupaten Pasaman 513.674 jiwa, dan Kabupaten Solok, 438.975 jiwa. Sementara tersedikit penduduknya adalah Kota Padang Panjang (40.139 jiwa), Kota Solok (48.120 jiwa), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (60.697 jiwa).

Namun demikian, dilihat dari perbandingan antara luas daerah dan penduduknya, maka Kota Bukit Tinggi merupakan daerah terpadat penduduknya dengan tingkat kepadatan hampir 4000 jiwa per Km2. Sedang, daerah terjarang pendudukannya adalah Kabupaten Sijunjung dengan tingkat kepadatan hanya mencapai 50 jiwa per Km2, di bawah rata-rata Sumatera Barat yang mencapai 107 jiwa per Km2.

Tabel 1 :
Penduduk Sumatera Barat Berdasar Agama yang Dipeluk
Tahun 2004

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain
01	Kota Padang	713.242						
02	Kab.Pariaman	432.790						
02	Kota B.Tinggi	91.983						
04	Kab.Pes Selatan	391.347						
05	Kab.Agam	414.972						
06	Kab.Lima Puluh Kota	311.773						
07	Kab. Tn.Datar	327.114						
08	Kab.Sijunjung	307.810						
09	Kab. Solok	438.975						
10	Kota Solok	48.120						
11	Kab. Pasaman	513.674						
12	Kota Pd.Panjang	40.139						
13	Kota Sawahlunto	50.868						
14	Kot Payakumbuh	97.901						
15	Kab. Mentawai	60.897						
		4.241..605	4.147.436	49.371	38.767	238	4.998	795

Sumber : Kanwil Departemen Agama Prop. Sumbar

Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sumbar

Pendidikan masyarakat Sumatera Barat cukup memprihatinkan. Dari keseluruhan penduduk berusia 10 ntahun ke atas, 3,79 % tidak pernah sekolah, 30,52 % belum tamat sekolah, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mencapai 16,78 %, tamat SLTA 11,73 %, SMK 5,64 %, Diploma I dan II (0,67 %), Diploma III/Akademi (1,02 %), Universitas/D-IV (1,89 %), serta Paskasarjana (S2 dan S3) sejumlah 0,03 %. Data tersebut menunjukkan bahwa dilihat segi pendidikan, sebagian besar berpendidikan rendah (mencapai 79,22 %) yaitu penduduk yang berpendidikan santara belum sekolah, tidak tamat hingga SLTP. Sementara, penduduk berpendidikan tinggi mencapai 3,61 % meliptui penduduk berpendidikan sejak Diploma hingga paskasarjana.

Adapun matapencaharian penduduk Sumatera Barat, sangat bervariasi. Hal inin karena masyarakat Sumatera Barat tersebar di daerah perkotaan dan pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan, mereka bekerja sebagai pegawai (negeri atau swasat), jasa dan pedagang. Sedang penduduk pedesaan sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan. Secara statistikal, sumer mata pencaharian penduduk Sumatera Barat terdiri dari : pertanian, kehutanan, perburuah, dan perikanan (48,25 %), perdaganag dan rumah makan (21,39 %), jasa (14,78 %), industri (6,32 %), dan lainnya sebesar (9,26 %). Dengan demikian, adalah jelas bahwa sektor pertanian, perdagangan, serta jasa merupakan sumber mata pencaharian dominan dalam masyarakat Sumatera Barat.

Di Propinsi Sumatera terdapat sejumlah etnik, seperti Minangkabau, Melayu, Jawa, Batak, Nias, dan lainnya. Meskpiun demikian, boleh disimpulkan dari berbagai segi, buadaya Minangkabau (selanjutnya disebut Minang) sangat dominan dalam masyarakat di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini karena sebagian besar penduduk masyarakat Sumbar berasal dari etnik Minang. Oleh karena itulah, karena hampir seluruh masyarakat Minang beragama Islam maka budaya yang berkembang dan berlaku di masyarakat Sumbar adalah budaya Islam atau yang cenderung dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, tergolong masyarakat taat beribadat dan menjalankan perintah agama yang dianutnya. Islam sebagai agama menjadi roh dari adat Minang. Filosofi Minang, "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" bukanlah sekedar slogan budaya namun benar-benar merupakan orientasi, dasar nilai, dan tekad orang Minang untuk mewujudkan agama yang dianutnya.[28]

Implikasi kultural dari filsafat Minang yang relijius tersebut, memosisikan Islam inheren dengan adat itu sendiri. Secara substantif, jarang ajaran Islam bertentang dengan adat. Bahkan Islam merupakan dan diposisikan sebagai sumber nilai, dan sumber inspirasi pengembangan adat Minang itu sendiri. Oleh karena itulah, Islam mewarnai, mempengaruhi,

---

[28] Ilham Nasution (2000), dalam Dr. Ismail , "*Potensi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Kinali, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat*", makalah dipresentasikan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 29 September 2005, di Jakarta.

bahkan menjadi roh kehidupan masyarakat Minang pada hampir semua aspek kehidupan—politik, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

Dalam aspek politik, misalnya, terlihat bahwa pola kepemimpinan di Minangkabau terdiri dari tiga pola kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adat, agama, dan pemerintah. Dalam kepemimpinan adat terdapat dua tipe kepemimpinan adat (nagari). Di Agam, terdapat "*Budi Caniago*", sedang di Tanah datar dan Lima Puluh Kota terdapat adat Koto Pilian. Secara hirarkis, kepemimpinan adat terdiri dari *penghulu pucuk, penghulu suku, (andiko),* dan *tungganai* atau *mamak kepala waris*. Untuk memerintah suku diangkat pembantu-pem,bantunya, yaitu seorang Manti (untuk mengurusi pemerintahan), dulubalang (untuk menjaga keagamaan), malim (untuk urusan agama) bersama-sama dengan penghulu suku. Keempat orang/pembantu ini disebut "*Urang Nan Ampe Jinih*" (orang berfungsi empat jenis). Demikian pula, kepemimpinan agama terdapat pimpinan nonformal yang disebut "*Angku Ampe*" yang meliputi *Malim, Imam, Khatib, dan Bilal*. Kesemuanya bertugas memberikan pelayanan kebutuhan penduduk sebagai penganut agama Islam. Dan, pola kepemimpinan nagari hingga kini, masih berjalan berdasarkan PERDA No.13/1983.

Dalam aspek budaya, demikian pula, masyarakat Minang sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Dalam budaya Minang, misalnya, seluruh adat istiadat dilindungi oleh ninik mamak, pucuk adat sebagai pemangku adat itu sendiri. Cucu kemekanan dari ninik mamak haruslah memeluk agama

Islam. Di luar Islam bukan lagi masyarakat Minang. Demikian pula, Islam sebagai ajaran wahyu berpengaruh terhadap aspek budaya lainnya. Prilaku budaya masyarakat Minang, sejak dari wawasan, cara persepsi, model tindakan, kriteria baik-buruknya sesuatu, tradisi kesenian, gaya hidup maupun tradisi budaya lainnya ternyata sarat dengan nilai ajaran Islam. Pada tataran kultural, Islam merupakan identitas bagi masyarakat Minang. Bagi orang Minang yang keluar dari Islam maka sama artinya dengan keluar dari kaumnya atau keluar dari adat Minang. Keluar dari Islam berarti bukan orang Minang lagi. "Di luar Islam, bukan lagi masyarakat adat Minangkabau".

Dari perspektif sosiologik, kelompok etnik Minang, menurut Navis (1984),[29] merupakan etnik yang terbuka, dinamik, dan memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Bagi masyarakat Minang, perubahan merupakan hal yang alami, bahkan suatu keniscayaan. Prinsip adat "sakali aia gadangf, sakali tapian barubah" (sekali air besar, sekali tepian berubah) merupakan filosofi Minang dalam menyikapi fenomena perubahan. Namun demikian, perubahan bagi masyarakat Minang tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar adat atau ajaran agama yang diyakini keluhurannya.

Masyarakat Minang, dalam relasinya dengan kelompok etnik lain, memandang bahwa sejumlah etnik yang terdapat di Sumatera Barat memiliki karakteristik kultural

---

[29] A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Aksara, jakarta, 1984, h.19.

yang positif. Misalnya, menurut orang Minang, masyarakat etnik Jawa memuiliki sifat rajin, jujur, gigih, pandai bergaul, sabarm disiplin, dan berani. Sementara ciri khas yang dilebelkan pada masyarakat etnik Batak-Mandailing adalah peminum/pemabok, kasar serta suka bertengkar, tidak sopan dan tidak "sabaran". Akan tetapi, sesungguhnya, menurut mereka orang etrnik Batak-Mandailing memiliki hati yang "baik". Kekasaran/kekerasan prilaku yang dimiliki cenderung merupakan watak atau karakteristik tipikal yang berasal dari tanah kelahirannya.

Sebaliknya, menurut orang Batak-Mandailing, orang Minang adalah etnik paling banyak memiliki sifat negatif. Sebagian besar orang batak mandailing menilai orang Minang memiliki sikap licik, pelit, tidak dapat dipercaya dan mau menang sendiri. Namun demikian, orang Batak menilai orang Minang memiliki sifat positif, terutama memiliki sifat rajin, gigih, pandai bergaul, sopan, sabar, dan rajin. Terhadap etnik lain, seperti Jawa, etnik Batak Mandailing melihat orang Jawa memiliki paling banyak sifat positif, misalnya memiliki sifat : jujur, pandai bergaul, sabar, sopan, ramah, selain juga rajin, pemurah, penolog, gigih, dan disiplin serta tidak mudah tersinggung. Kelompok etnik Mandailing memandang kelompok Jawa paling banyak memiliki karakteristik kultural yang positif.

Berdasarkan gambaran etnografik tersebut, dalam masyarakat Sumatera Barat, secara sosiometrik, ternyata masyarakat Jawa cenderung lebih diterima dalam kelompok mayoritas yaitu etnik Minangkabau. Kerjasama dan interaksi

dialogal dan saling menguntungkan antara mayoritas Minang dan minoritas Jawa terjalin secara baik di tengah masyarakat Sumbar. Sebaliknya, interaksi antara mayoritas Minang dengan Batak umumnya—baik Mandailing, Karo, maupun Toba kurang menunjukkan keakraban yang mendalam.

Kehidupan Beragama Masyarakat

Pemeluk, Sarana, dan Organisasi Keagamaan

Mayoritas penduduk Sumbar beragama Islam. Islam merupakan identitas bagi masyarakat Minang. Bagi orang Minang, keluar atau tidak memeluk agama Islam berarti bukan orang Minang. Ajaran Islam ,dengan demikian, merupakan pedoman hidup bagi masyarakat etnik Minang disamping adat. Begitu kuat pengaruh agama terhadap adat Minang, menyebabklan sering mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang ajaran Islam dan mana yang aturan adat. Sehingga seringkali terdapat norma adat yang sebetulnya cenderung bertentangan dengan Islam, namun masyarakat tidak mampu melihatnya, atau memandangnya tidak berbeda. Filsosof, "*adat besandikan syarak, syarak besandikan kitabullah*" benar-benar diyakini sepenuhnya sehingga dianggap mereka tidak ada pertentangan atau perbedaan normatifnya.

Dari keseluruhan jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2004 sebesar 4.241.605 jiwa, maka 4.147.436 jiwa atau mencapai 97,77 % menganut agama Islam. Selebihnya,

yang hanya kurang dari 2,5 % merupakan penganut agama lain, yaitu Kristen (1,16 %), Katolik (0,91 %), Hindu (0,005 %), Buddha (0,11 %) serta sebesar 0,018 pemeluk di luar kelima agama tersebut, diantaranya pengikutn Khonghucu, dll. (Lihat : tabel 1). Namun jika kita bandingkan jumlah pemeluk agama pada tahun sebelumnya, sebenarnya secara statistikal, sejak tahun 1995 agama Kristen (protestan), Katolik, Hindu dan Buddha mengalami kenaikan persentase jumlah pemeluknya. Apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun jauh sebelumnya.

Dinamika perubahan jumlah pemeluk agama dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Perkembangan Pemeluk Agama di Sumbar
(1990-2004)

NO	Agama	1990-1995	1995-2000	2000-2004	Keterangan
1	Islam	(-) 0,24 %	(-) 0,09 %	(-) 0,12 %	Penurunan
2	Kristen	(+) 0,15 %	(+) 0,09 %	(+) 0,12 %	Kenaikan
3	Katolik	(+) 0,09 %	(+) 0,01 %	(+) 0,05 %	Kenaikan
4	Hindu	(+) 0,01 %	(-) 0,01 %	(+) 0,001 %	Penurunan
5	Buddha	(-) 0,01 %	(+) 0,14 %	(-) 0,20 %	Penurunan
6					

Sumber : Kanwil Departemen Agama Sumbar

Berdasarkan tabel 2 di atas, data menunjukkan bahwa Islam mengalami penuruan terus menerus sejak tahun 1990. Dua agama besar lainnya, yaitu Kristen Protestan dan katolik mengalami kenaikan sejak tahun 1990 hingga kini. Sementara, Hindu dan Buddha mengalami perkembangan pemeluk yang fluktuatif, walau angka terakhir menunjukkan penurunan yang tajam, sejak masing-masing memiliki jumlah 764 pemeluk Hindu, dan 7.944 pemeluk Buddha pada tahun 2000, namun pada tahun turun menjadi masing-masing 238 dan 4.998 pada tahun 2004. Pergeseran jumlah pemeluk agama pada masing-masing agama, hingga kini belum diketahui penyebabnya secara jelas.

Adapun jumlah rumah ibadah bagi masing-masing agama di Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Pada tahun 2004, di Sumatera Barat terdapat 14.980 rumah ibadat bagi orang Islam, yang terdiri dari Mesjid, Langgar dan Mushala. Bagi umat Kristen terdapat 198 rumah ibadat meliputi Gereja Permanen, Semi-permanen, dan Gereja Darurat. Umat Katolik memiliki 107 buah Gereja, Kapel, dan Gereja Darurat. Sedangkan Hindu memiliki sebuah Pura, dan bagi umat terdapat 164 buah yang terdiri dari 20 Vihara, 104 Cetya, dan 40 Kelenteng. Dilihat dari persebarannya, rumah ibadat bagi umat Islam terdapat di semua kabupaten. Sementara, rumah ibadat Kristen sebagian besar terdapat di Kabupaten Kepulauan mentawai (158 buah), di Kota Padang 10 buah, dan Kabupaten Pasaman 5 buah. Daerah lain, seperti : Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kab.Solok, Kab.Pariaman, Kab.Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Sawahlunto Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang,

dan Payakumbuh yang belum memiliki gereja satupun—terdapat 1 hingga dua buah gereja. Bagi umat Katolik, dari 107 gereja yang dimiliki sebagian besarnya, 74 buah (70 %) terdapat di Kab. Kepulauan Mentawai . Selebihnya, 30 % tersebar di Kab. Pasaman, Kota Padang, Bukittinggi dan lainnya selain 6 kabupaten yang belum memiliki gereja, yaitu : Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Agam, Tanah Datar, dan kabupaten Lima puluh Kota. Sedang bagi umat Hindu terdapat sebuah Pura dan 2 buah Vihara bagi umat Buddha yang terletak di Kota Padang, ibukotya Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat, sebagai daerah propinsi yang relijius, tumbuh sejumlah besar organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Di kalangan Islam, Muhammadiyah merupakan organisasi tebesar di daerah Syumatera Barat. Hampir 80 % umat Islam merupakan anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Organisasi sosial keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan Tarbiyah Islamiyah juga tumbuh di daerah ini. Selain itu, masih terdapat pula organisasi sosial keagamaan yang dibina organisasi massa non-mazhab tapi dipimpin oleh kelompok keagamaan atau gerakan sosial keagamaan tertentu, seperti : Majlis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), LDII, Ahmadiyah, Jamat Tabligh, dan sejumlah besar gerakan sosial yang terdaftar di Direktorat Sosial-Politik Propinsi Sumatera Barat, seperti : Forum Penegakkan Syariat Islam (FPSI), Forum Aksi Pemurtadan Anti Pemurtadan (FAKTA),

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Paga nagari, Tasawuf Islam Center Indonesia (TICI), Pusat Advokasi Hukum dan HAM (FAHAM), Buda Kandung, Ikatan Keluarga Minang Riau, BK3AM, Yagemuwa, GeSOR, Gebu Minang, Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Studi Untuk Revitalisasi Akidah Umat (SURAU), Tim Antiisipasi KUB (TAKAUB), Aliansi Muslimah Peduli (AMALI), Pemuda Muhammadiyah, Remaja Muhammadiyah, Pemuda tarbiyah, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII), dll.

Di kalangan pemeluk Kristen, terdaftar dua organisasi sosial-keagamaan di Direktorat Sosial-Politik Sumatera Barat, yaitu Persatuan Wa nita Kristen (PWK) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), selain organisasi gereja di lingkungan agama Kristen Protestan, baik yang beraliran Lutheran seperti Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP), BNKP, Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP), Calvinis seperti Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), maupun Pantekosta seperti gereja-gereja yang tergabung dalam Gereja Pantekosta Indonesia (GPI), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII), dan GPPS, Gereja Bethel Indonesia (GBI), Adventis (MAHK Padang), dan Kharismatik (GISI).

Potensi Kerukunan dan Konflik

Kondisi hubungan antar umat beragama di Sumatera Barat, dilihat dari beberapa segi, terkategori semu. Kategori ini

didasarkan pada kenyataan bahwa, secara lahiriyah, hubungan antar umat beragama yang terdapat di daerah Sumbar (antar Islam, Krisnten, Katolik, Hindu, dan Buddha) belum menunjukkan kondisi yang kondusif, komunikatif, dan integratif dalam arti sebenarnya. Walau, dilihat dari sekuritas, kondisi hubungan sosial-keagamaan masyarakat Sumatera Barat relatif nyaman dan aman, namun demikian masih terdengar isyu-isyu yang mengarah pada suasana disharmoni umat beragama. Sikap saling curiga dan saling mengklaim kebenaran kelompoknya masih santer sejak dekade lalu hingga kini.

Di kalangan Islam terdengar santer kegiatan Kristenisasi yang dilakukan melalui beberapa cara. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini dan waktu sebelumnya seakan membenarkan tuduhan umat Islam terhadap umat Kristen dan Katolik. Demikian pula, isyu Kristenisasi juga muncul dari kelompok umat Buddha dan Hindu. Sebaliknya, umat Kristen dan Katolik juga menuduh bahwa telah terjadi Islamisasi, terutama pada masyarakat Mentawai yang sebagian besar penganut kedua agama tersebut. Terhadap tuduhan ini--yang pertama kali dilontarkan oleh Vatikan—pihak umat Islam menganggap masyarakat Mentawai sebagian belum memeluk agama sebagaimana yang difasilitasi pemerintah. Oleh karena itu, semua agama berhak untuk berdakwah atau menyebarkan agamanya.

Silang tuduh ini, yang sudah berlangsung relatif lama, merupakan fenomena "api dalam sekam", yang potensial menjadi faktor pemicu konflik lebih meluas. Peristiwa

Kristenisasi yang berkembang dan dituduhkan kelompok Islam terhadap kelompok Kristen, baik Kristen Protestan dan Katolik, sejak beberapa tahun terkakhir hingga kini, melahirkan berbagai efek dalam masyarakat.

1. Terciptanya polemik "panas" antara pihak Muslim di satu pihak dan pihak Kristiani tentang kebenaran kasus Kristenisasi di Sumatera Barat. Dialog, pertemuan, dan kegiatan sejenis sering ditempuh untuk meredam polemik yang berkembang. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut masih belum menghasilkan hasil memuaskan – dalam arti tidak mampu memberikan keyakinan pada semua pihak untuk menghentikan polemik tersebut;

2. Terbangunnya suasana interaksi yang tidak kondusif, bahkan cenderung konfliktual. Karena pemberitaan kasus-kasus yang berbau "Kristenisasi", muncul gerakan-gerakan protes sosial yang dilancarkan oleh sejumlah organisasi sosial keagamaan maupun lembaga adat Minang. Tak kurang sejumlah organisasi/lembaga keagamaan, misalnya organisasi : Forum Aksi Anti Pemurdatan (FAKTA), Forum Penegakkan Syariat Islam (FPSI), Aliansi Muslimah Peduli (AMALI), dan organisasi Adat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan organisasi di bawah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Majleis Ulama Indonesia (MUI) secara serius melancarkan protes, ajakan hingga kutukan, dan ajakan untuk berjihad melawan kelompok pelaku Kristenisasi. Selain itu, di media massa, muncul sejumlah

artikel yang melakukan pembahasan, kritik, dan kutukan serupa. Judul-judul menggiriskan dan provokatif bagi pembaca baik berupa berita maupun artikel lepas di media massa tentang respon terhadap Kristenisasi di Sumatera Barat, seperti : "Sumbar, Incaran Kristenisasi di Sumatera Barat" (*Singgalang*, 13-10-2003), "Sepuluh Triliun untuk Program Kristenisasi di Sumbar", "Umat Islam Mesti Waspada (*Mimbar Minang*, 11-08-2003), "Sudah Saatnya Tokoh Islam Bersatu", "Tingkatkan Kualitas dan Kemandirian Untuk Antisipasi Kristenisasi (03-10-2003), "Rakyat Melarat, Rentan Murtad", "Non-Muslim Bukan, Bukan Kemenakan", "Lawan Pemurtadan" (*Singgalang*, 21-10-2003), dan lainnya.

3. Menguatnya budaya saling curiga, dan rendahnya sikap saling percaya. Pada hal sikap-sikap ini merupakan dasar dari terbangunan kerukunan atau integrasi antar umat beragama. Sikap-sikap seperti ini, disamping mempersulit terbangunnya perdamaian, harmoni, dan interaksi yang resiprokal dan dialogal antar umat beragama, tapi pada gilirannya mengembangkan dan mempertajam sutuasi konflik yang terjadi.

Efek isyu Kristenisasi di Sumatera Barat, yang kian berkembang, apalagi ditambah dengan realitas penurunan persentase umat Islam di satu pihak dan kenaikan umat Kristen dan Katolik di pihak lain, menjadikan Sumatera Barat bagai "Api dalam Sekam". Dan, sudah barang tentu, pada tingkat interaksi tertentu, kondisi seperti ini pada gilirannya dapat menjadi pemicu konflik terbuka antar umat beragama

Selain isyu-isyu Kristenisasi yang munjukkan adanya tata hubungan antar umat beragama yang berbeda kurang kondusif, perseteruan internal diantara umat beragama yang sama juga terjadi cukup memanaskan suasana Sumatera Barat. Isyu Ahmadiyah yang dianggap mengajarkan ajaran sesat dan isyu ajaran sholat dua bahasa (bahasa Arab dan terjemahan Indonesia) versi Usman Roy yang terjadi dalam komunitas Islam serta beberapa gesekan kecil diantara umat Kristen Protestan merupakan biang konflik internal yang berandil memperkeruh interaksi antar umat beragama umumnya.

Untungnya, Sumatera Barat, secara kultural, memiliki sejumlah potensi konstruktif bagi terbangunnya keamanan, perdamaian, atau kerukunan. Paling tidak, potensi untuk menghindari perseteruan terbuka. Potensi-potensi kerukunan yang masih tumbuh subur di kalangan masyarakat Sumbar umumnya adalah sebagai berikut.

1. *Kuatnya Tata Nilai Budaya Kelompok Mayoritas*

Mayoritas penduduk masyarakat Sumatera Barat adalah etnik Minangkabau (Minang). Menurut berbagai sumber kepustakaan maupun para tokoh Minang, sesungguhnya kultur Minang sangat egaliter dan demokratis. Disebutkan bahwa budaya demokratis lebihb dahulu tumbuh di masyarakat Minang ketimbang di daerah lain di Indonesia. Pepatah Minang "*Bulek kato di mufakat, bulek air di pambuluh*" (=bulat kata di mufakat, bulat air di dalam buluh atau bambu) sesungguhnya memuat pengajaran

dan prinsip budaya Minang untuk menghargai musyawarah dan apapun hasil musyawarah haruslah ditaati dalam prakteknya. Demikian pula, pepatah "*Biduk nak rantiku, pandai menarah dan menelungkup, bersilang kayu dalam tungku, disana api makanya hidup*" yang mengibaratkan bahwa api dalam tungku bisa hidup bila diletakkan bersilang, atau mengandung makna denotatif bahwa budaya akan hidup jika dikembangkan melalui proses dialog dengan budaya lain. Pepatah ini juga mengandung arti tentang pentingnya musyawarah dalam pemutusan suatu perkara bersama.

Oleh karena itulah, jika terjadi suasana interaksi kurang kondusif antara umat beragama, lembaga Adat yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), yang terdapat di tingkat Nagari sampai Propinsi, turun tangan untuk ikut serta menyelesaikan atau menjadi mediasi dalam penyelesaian. Demikian pula tata nilai dan norma etnik lain yang hidup di Sumatera Barat, seperti etnik Jawa, dikenal masyarakat kondusif bagi penciptaan kerukunan hidup masyarakat di Sumatera Barat. Sikap-sikap tepo seliro, senang bermusyawarah, santun, peduli sosial, gotong royong, dan sikap positif lainnya merupakan potensi kerukunan yang kontributif bagi tetap terbinanya tata hubungan yang relatif kondusif di tengah hangatnya api dalam sekam. Sementara, suku lainnya, seperti Batak-Mandailing, Sumatera Selatan, Jambi, Nias dan ras Cina dalam beberapa segi kurang dominan pengaruhnya, sehingga

sulit untuk memerankan sebagai faktor disintegrator yang efektif dalam struktur kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

2 *Kesadaran Perdamaian dan Ketenangan Masyarakat*

Masyarakat Sumatera Barat, dikenal sebagai masyarakat perantau dan pedagang. Pemilikan kesadaran orang Minang sebagai mayoritas tentang pentingnya toleransi dan sikap adaptif terhadap lingkungannya, serta sikap penerimaan terhadap etnik lain sebagai bagian dari hidupnya merupakan potensi sangat besar bagi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama. Mereka menganggap bahwa interaksi sosial harus dijaga dengan baik. Interaksi harus dibangun diantara masyarakat majemuk. Oleh sebab itu, etnik lain pun harus mampu beradaptasi dengan masyarakat mayoritas untuk menjalin interaksi yang kondusif antar kelompok masyarakat yang berbeda. Terhadap ras Cina, misalnya, orang Padang semula memang membatasi ruang gerak perdagangan Orang Cina. Beberapa tahun silam, mereka hanya diberi kesempatan untuk berdagang onderdil mobil di daerah Pondok, namun sekarang setelah mereka mampu bergaul dengan masyarakat, mereka kini leluasa berdagang di Pasar Raya.

Contoh lain dari sikap dan itikad ingin menegakkan kedamaian, misalnya dalam kasus tuduhan Kristenisasi di lingkungan Rumah Sakit Yos Sudarso, Padang. Setekah memperoleh pernyataan sikap, teguran keras dari lembaga

adat (Paga Nagari) dan organisasi Islam (Gerakan Muslimin Minangkabau), serta himbauan pemerintah (Kanwil Departemen Agama) dan perintah penyelidikan Polresta Padang terhadap Rumah Sakit Yos Sudarso yang dituduh sebagai mesin Kristenisasi, maka pihak Katolik selain memberikan penjelasan dan penangkisan tentang tuduhan, umat Katolik berusaha untuk melakukan persiapan-persiapan internal bagi upaya pendamaian. Diantaranya, upaya yang ditempuh adalah : (1) menenangkan umat, (2) melakukan pendatan dan pencarian fakta untuk analisis dan penjelasan kepada pihak terkait, (3) melaksanakan pelayanan kemanusiaan untuk menjaga citra Katolik dalam perjuangan kemanusiaan yang ditempuhnya, (4) melakukan perubahan sikap yang selama ini cenderung bersikap reaktif dan pasif menjadi sikap yang proaktif dan cepat dalam pengambilan tindakan untuk mempertahankan umatnya, (5) mulai memikirkan kembali dan melaksanakan kebijakan pemakaian jilbab (baik di Yayasan Yos Sudarso maupun Yayasan Prayoga) bagi karyawan, siswa dan guru, (6) melaksanakan re-evaluasi terhadap pemasangan Salib di berbagai tempat yang rentan dan sensitif bagi umat lain, (7) penyediaan ruang khusus untuk beribadat bagi muslim, namun bukan bernama mushala, dan (8) melakukan hubungan intensif dengan pihak pemerintah (DPRD, Gubernur, Danrem, Kapolda, Kanwil Depag), maupun pihak non-pemerintah baik secara individual maupun kelembagaan, seperti

menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam moderat dan PUSAKA (Pusat Studi Antar Komunitas)—sebuah LSM yang dinilai moderat untuk memberi penjelasan yang "akurat" menurut umat Katolik. Terlepas dari tingkat akurasi dan kebenaran dari peristiwa "tuduhan Kristenisasi di R.S. Yos Sudarso", upaya umat Katolik ini dapat dipandang sebagai sikap positif yang diambil dalam upaya peredaman dan penjagaan terhadap munculnya konflik secara berkepanjangan di Sumatera Barat.

2. *Kesadaran (akan) Nilai-Nilai Budaya Global*

Kesadaran akan pentingnya perdamaian, keamanan, penyesuaian diri dengan perkembangan masyarakat, selain secara internal disebabkan oleh faktor budaya lokal memuat kearifan lokal yang kondusif bagi pengembangan kerukunan, juga faktor global yang tumbuh berkembang membawa gagasan-gagasan universal humanitas yang menekankan pada perdamaian dunia dan penjunjungan hak dan martabat manusia tanpa batas ruang geografis maupun etnik, agama, ras, dsb. tampak merupakan faktor determinan bagi kerukunan yang masih terbangun di Sumatera Barat. Kemunculan lembaga swadaya masyarakat seperti PUSAKA, yang mengembangkan nilai toleransi umat beragama atas dasar asumsi bahwa agama merupakan "*the fundamental rights of human being*" serta perkembangan budaya global yang begitu pesat dalam era informasi dan globalisasi ini, pada tataran sosio-kultural menumbuh-kembangkan sikap toleransi beragama dalam masyarakat. Kondisi ini. Pada tataran politik nasional

merupakan potensi kerukunan bagi terbangunnya integrasi nasional, sekaligus mencairkan budaya etnosentris dan prilaku keagamaan radikal dan fanatik.

4. *Kesadaran Multikultural*

Secara kultural, masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat heterogen, majemuk, dan mulitkultural. Terutama dilihat dari segi etnik, maupun agama yang dipeluknya. Suku dan semua agama ada di daerah ini. Namun demikian, dalam kenyataannya, etnik Minangkabau dan agama Islam sangat dominan di Sumatera Barat. Adat Minang yang bersendikan syariat Islam, dan agama Islam yang mencapai 97 persen dari keseluruhan penduduk Sumbar menjadikan adat Minang dan agama Islam merupakan mayoritas dalam berbagai sektor kehidupan, baik sektor budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam aspek budaya, tradisi Minang sebagian besar diwarnai tradisi Islam. Dalam aspek ekonomi, orang Padang tampak mendominasi perdagangan. Sementara, dalam politik, disamping ketua adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Minang, termasuk dalam kebijakan pengembangan masyarakat, juga adat mampu menempatkan Islam pada oposisi-posisi penting dan strategis dalam pemerintahan di Sumatera barat, baik pada tingkat propinsi, kabupaten, maupun tingkat dibawahnya. Implikasinya, tokoh pemerintah (pejabat) beragama Islam dominan di pemerintahan.

Kondisi seperti ini, dalam satu segi, menurut para tokoh, menguntungkan terbangunnya sikap kompromistik dan akomodatif dalam relasi antara umat beragama. Sikap minoritas yang dialami umat non-Islam, misalnya, secara "terpaksa" harus berkompromi dan mengakomodasi aspirasi kelompok mayoritas. Sebagai contoh, di sekolahan Katolik bagi murid beragama Islam diberi kesempatan untuk belajar pendidikan agama Islam di sekolahnya—yang tidak terjadi di daerah lain. Dengan kata lain, kondisi masyarakat yang "*over dominated*" oleh masyarakat etnik Minang, pada tataran struktural melahirkan interaksi tidak konfrontatif, atau permusuhan secara diametral. Hubungan antara "*superordinate group"* dengan "*subordinate group*" menjadi tidak terlalu tajam kompetisinya, karena subordinate menggunakan pendekatan "*avoidance*" dalam menyikapi dan merespons kelompok superordinate. Dengan demikian, pada tataran permukaan, kondisi "api dalam sekam" masih melekat dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat umumnya yang harus senantiasa diantisipasi dinamika perubahannya.

5. *Kebijakan Pemerintah*

Dilihat dari kasus bermuatan SARA yang timbul dalam masyarakat Sumatera barat, secara kuantitatif, relatif banyak. Namun demikian, berkat kebijakan pemerintah yang cukup arif-bijaksana, serta cepat tanggap, maka potensi konflik yang ada tidak berkembang menjadi konflik yang serius berskala luas dan kuat.

Pada beberapa kasus misalnya, pemerintah dengan cepat melakukan mediasi dan pengamanan terhadap kasus berbasis agama yang berkembang melalui forum dialog, konsultasi, atau pertemuan antar tokoh. Selain itu, program-program pengaturan terhadap kegiatan yang dianggap bertentangan dengan agama atau Adat, seperti pengaturan terhadap kegiatan penyebab penyakit masyarakat (Pekat) : perjudian, hiburan malam (misalnya karaoke, diskotik, narkoba, dan pelacuran) serta himbauan bagi masyarakat pendatang untuk menghormati Adat Minang, juga merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerukunan hidup beragama.

Kasus-Kasus SARA : Bentuk dan Penyebabnya

Beberapa kasus yang muncul dan berdampak pada terciptanya struktur situasi konfliktual tersembunyi diantaranya adalah kasus-kasus seperti berikut.

1. Peristiwa kesurupan (ketidak-sadaran) sejumlah mahasiswa. Kesurupan ini dialamai pada 15 mahasiswa Universitas Andalas (Unand) dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Barat. Peristiwa serupa yang sudah pernah terjadi sejak tahun 2001 dengan korban 60 jiwa, dan terakhir dialami oleh sejumlah mahasiswa Unand dan IAIN tersebut dinilai masyarakat Islam sebagai salah satu cara Kristenisasi. Karena dalam kesurupan tersebut, korban menyebut-nyebut nama Jesus,

dan meronta-ronta ingin pergi ke Gereja. Akibat peristiwa kesurupan yang terjadi dalam masyarakat mayoritas muslim berkembanglah polemik isyu kristenisasi.

2. Kristenisasi masyarakat melalui pemberian bantuan terhadap orang miskin. Dalam hal ini, kelompok Kristen memberikan bantuan berupa makanan, pekerjaan atau bea siswa bagi warga miskin. Artikel berjudul "Melarat Membawa Murtad" merupakan representasi dari reaksi kelompok agama tertentu yang merasa dirugikan oleh kristenisasi dalam modus seperti ini.
3. Pengiriman buku Nasrani oleh oknum tertentu kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Payakumbuh.
4. Pendirian gereja (liar/illegal) dan pemanfaatan tempat/lokasi (yang bukan peruntukannya) untuk fungsi gereja. Diantaranya pendirian gereja di : (a) PTPN VI, Danau Kembar, Solok, (2) penggunaan gedung ekolah Dasar Pangian, Kecamatan S.Rumbai, Darmasasra untuk peribadatan umat Kristiani, dan Pemanfaatan ruko (rumah toko) untuk gereja di Kampung Batang Arau, Padang barat pada tahun 2005; Selain itu, pendirian gereja di Bandara Sekaping pada tahun sebelumnya, Pembaptisan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang pada tahun 2002.
5. Peristiwa pemurtadan yang diawali pemerkosaan kemudian pembaptisan. Kasus Mawah atau peristiwa pemerkosaan dan pemaksaan pindah agama terhadap Khairiyah Eniswah yang memperoleh protes dan kutukan

keras dari masyarakat Sumbar. Dianggapnya, bahwa kasus ini merupakan pelecehan terhadap orang Minang. Masyarakat Minang sangat tersinggung, karena "*Malu nan Tacoreang di Kaniang*".

6. Pengedaran Injil berbahasa Minang (Juni,2005) serta penyetakan Al Qur'an yang salah. Pengedaran Injil ke dalam bahasa Minang dipandang masyarakat Minang yang memegang prinsip budaya dan falsafah "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*" sebagai pengrusakan dan pelecehan terhadap budaya etni Minang yang menjadikan agama Islam sebagai dasar nilai dan norma Adat Minangkabau serta menabukan orang Minang memeluk agama lain selain Islam. Bila terjadi pindah agama Orang Minang dari Islam, maka secara kultural, orang tersebut tidak diakui sebagai orang Minang sekaligus hilang hak-hak adatnya.

7. Pemurtadan terhadap sejumlah karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso, Padang. Selain itu, terjadi pemurtadan terhadap 102 anak dengan dugaan Kristenisasi di R.S. Yos Sudarso.[30] Sumber data lain menyebutkan bahwa telah terjadi pemurtadan terhadap lebih dari 15 karyawan beragama Islam RSU Yos Sudarso melalui intimidasi oleh atasan-atas mereka.[31]

---

[30] Sumber : Surat Himbauan yang ditujukan kepada P3N se-kecamatan Kuranji, oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuranji, menyolisasikan *SuratKkandepag Kota Padang, nomor MC.9/4/BA.00/457/2002* tertanggal 12 Agustus 2002.

[31] Atasan karyawan R.S Yos Sudarso yang melakukan intimidasi terhadap staf/anak buahnya adalah Helen Permata sari (etnik batak), Mikia Ria (Batak), Kabid

Penutup

Dalam bab penutup, dipaparkan kesimpulan, Implikasi dan Saran. Kesimpulan memuat benang merah dari penggambaran yangb dilakukan dalam penelitian. Implikasi memuat asumsi dan prediksi tentang kecenderungan yang bakal terjadi jika tidak memberi perlakukan terhadap kenyataan yang berlangsung. Sedangkan saran disusun dalam kaitannya dengan upaya perbaikan yang *implementable*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian temuan di atas, berikut ini dipaparkan sejumlah kesimpulan.

Pertama, hubungan antara masyarakat pada umumnya, dan hubungan antar umat beragama khususnya di Sumatera Barat , secara umum bila dilihat dari indikator keterbukaan konflik, relatif "baik", dalam arti belum menunjukkan fenomena konflik terbuka. Dalam kehidupan seharia-hari, interaksi antar masyarakat, baik individual maupun kelompok, relatif komunikatif.

Kedua, namun demikian, dilihat dari realitas yang terjadi berkaitan dengan munculnya berbagai kasus penyebaran agama, maka hubungan antar umat beragama, terutama antara umat Islam dan umat kristiani (Kristen

---

Perawatan, Alfrina Tampubolon (Cina batak), Ka. Instalasi Dewi Chandra (Cina), Dr. Fransiscus, dan Dr. Gunawan Djunaidi. Lihat : *Pernyataan Sikap* dari Pimpinan Pusat Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM), ditanda tangani oleh Mayor Purn) H. Maat Acin RB dan Sekretaris M. Yunus, tertanggal 29 Juli 2002.

Protestan dan Katolik) mengalami hubungan yang kurang kondusif. Peristiwa-peristiwa yang dituduhkan oleh umat Islam muslim sebagai upaya kristenisasi terhadap pemeluk muslim di satu pihak, dan tuduhan balik oleh umat kristiani terhadap umat Islam bahwa "tuduhan-tuduhan" tersebut merupakan "*grand scenario*" untuk tujuan lebih besar dalam rangka menghancurkan umat Kristen, secara sosiologis, merupakan indikator terdapatnya konflik tersembunyi dalam interaksi antar kedua kelompok agama besar, yaitu umat Islam dan umat Kristiani (Kristen dan Katolik).

Ketiga, terdapat sejumlah potensi kerukunan yang fungsional bagi terbangunnya integrasi masyarakat, dan potensi konflik dapat memicu konflik dalam skala luas dan terbuka di masa datang pada Sumatera Barat umumnya.

Potensi-potensi kerukunan tersebut, diantaranya : (1) kuatnya tata nilai budaya lokal yang fungsional bagi pengontrolan prilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya pengontrolan terhadap prilaku-prilaku menyimpang masyarakat (perjudian, pelacuran, minum keras, dsb.), (2) tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan hidup beragama, (3) tumbuhnya kesadaran multikultural dan plural yang mengakui, menerima dan menghormati perbedaan latar belakang kultur dan agama, (4) tumbuhnya kesadaran global yang menghargai nilai-nilai kemanusian universal, termasuk hak keberagamaan masyarakat, dan (5) berperannya kebijakan pemerintah dalam membangun situasi yang kondusif bagi terciptanya keukunan hidup antar umat beragama.

Sedangkan potensi konflik sosial yang (sewaktu-waktu) dapat menjadi pemicu konflikl antar umat beragama dalam skala lebih luas dan intensitas lebih tinggi, diantaranya adalah : (1) masih berkembangnya suasana “panas” dan “keruh” yang dipenuhi oleh polemik dan perdebatan mengenai isyu-isyu kristenisasi yang terjadi di daerah ini, (2) menguatnya isyu-isyu Kristenisasi melalui berbagai cara, yang dibuktikan oleh berbagai peristiwa keristenissasi, seperti : pendirian rumah ibadat (gereja) secara ilegal, pemurtadan, penghipnotisan dan pelecehan seksual dibarengi pembaptisan, pemberian bantuan bermotif misionaris, serta penyebaran Injil berbahasa Minang, (3) menguatnya budaya disintegratif yang ditandai oleh meningkatnya sikap saling curiga (*social prejudice*), saling tidak mempercayai, saling menuduh, disamping tumbuh sikap budaya minoritas, seperti : perasaaan termarjinalkan (*sense of being marginalized*), dan perasaan terdiskriminasikan (*sense of being discriminated*), atau perasaan diperlakukan tidak adil oleh kelompok mayoritas, (3) terlalu kuat derajat dominasi kelompok mayoritas (masyarak Islam yang melekat pada etnik Minang) dalam berbagai sektor, termasuk kebijakan yang bernuansa “*adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah*”, dan (4) adanya kebijakan pendirian rumah ibadat (SKB Menteri dalam negeri dan Menteri Agama) yang dinilai merugikan kelompok minoritas. ***Implikasi***

Kondisi kehidupan masyarakat pada umumnya, dan kualitas hubungan antar umat beragama (baik interan maupun antar) dalam masyarakat Sumatera Barat, yang

cenderung terkategori berpotensi konflik ("api dalam sekam"), pada tingkat tertentu atau pada situasi dimana berkembang faktor pemicu (*triggering factor*) yang mengawali melatuk, bukan hal mustahil dapat menyebabkan terjadinya konflik terbuka secara diametral antar kelompok bertikai dalam masyarakat Sumatera Barat dalam skala luas. Oleh karena itu, upaya "*social conditioning*" melalui penguatan ketahanan ekonomi, budaya, politik, hukum, dan keamanan masyarakat merupakan agenda pemerintah dan masyarakat Sumatera Baratserta jikalau menghendaki kehidupan nan damai di bumi kanduang.

Saran

Berdasarkan temuan, kesimpulan, dan analisis implikasi kondisi terhadap tata kehidupan mendatang, disarankan beberapa hal berikut.

Pertama, pemerintah secara terus menerus mewaspadai dinamika interaktif antar kelompok umat beragama, baik hubungan intern kelompok yang seagama maupun hubungan antar umat beragama yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan kerjasama secara luas, terutama kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Untuk itu, pemanfaatan organisasi sosial keagamaan yang dibentuk masyarakat atau organisasi kerukunan yang diprakarsai Pemerintah perlu diperankan secara maksimal.

Kedua, disarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam "perseteruan" untuk tidak mengembangkan potensi konflik yang mulai tumbuh di masyarakat. Untuk itu, apa pun upaya kristenisasi (jika memang ada dan benar faktanya) atau penyebaran agama kepada pemeluk agama lain yeng berbeda, perlun hendaknya dihentikan agar tidak mempertajam terjadinya konflik berbasis agama. Demikian pula, pihak anti-kristenisasi, diharap meningkatkan daya kontrol untuk menahan diri prilaku pembelaan atas nama agamanya, agar mampu memelihara kerukunan dalam skala lebih luas.

Ketiga, perlu mengembangkan budaya multi-kultural dalam masyarakat dalam upaya mereduksi atau menimalisasi pertumbuhan sikap fanatisme dan ekstermisme keagamaan serta mencegah arogansi kultural yang etnosentris di dalam masyarakat.

Keempat, menyelesaikan agenda-agenda kemasyarakatan berkaitan dengan isyu-isyu keagamaan (kristenisasi) yang terjadi melalui jalur hukum agar menghasilkan kebenaran yang adil dan proporsional. Untuk itu, diperlukan kecepatan dan sikap adil dari pemerintah (aparat hukum) dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. (CFY)

Pustaka Rujukan

A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Aksara, jakarta, 1984.

Ilham Nasution (2000), dalam Dr. Ismail , "*Potensi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Kinali, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat*", makalah dipresentasikan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 29 September 2005, di Jakarta.

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuranji *Surat Himbauan* yang ditujukan kepada P3N se-kecamatan Kuranji.

Pimpinan Pusat Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM), *Pernyataan Sikap* dari ditanda tangani oleh Mayor Purn) H. Maat Acin RB dan Sekretaris M. Yunus, tertanggal 29 Juli 2002.

(III)

KALIMANTAN BARAT

Kondisi Geografik dan Demografik

Secara geografik, Propinsi Kalimantan Barat tergambar adanya kesenjangan sosial, seperti nampak pada perkembangan pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih terpusat di kawasan Sampit sepanjang pantai barat menuju daerah Serawak.

Dari panjang jalan di Kalimantan Barat secara keseluruhan sepanjang 3.218 kilometer pada tahun 1984, lebih dari setengahnya terkonsentrasi di tiga daerah tingkat dua kawasan barat propinsi ini yakni Kota Pontianak – Kabupaten Pontianak dan Kebupaten Sambas. Padahal bila dilihat dari luasnya wilayah, ketiga daerah tingkat dua tersebut hanya memiliki luas lebih kurang 30 persen dari luas wilayah propinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Sementara di daerah-daerah pedalaman kawasan timur propinsi Kalimantan Barat, jaringan jalan yang menghubungkan daerah tersebut dengan pusat-pusat perkembangan daerah lain di Kalimantantan Barat atau dengan propinsi lain sangat terbatas[32].

Kesenjangan yang serupa juga terjadi di bidang komunikasi. Bila hubungan antara Pontianak dengan Jakarta selaku ibukota RI ditopang jaringan transportasi dan komunikasi yang kuat dan mudah, khususnya melalui jasa angkutan udara, media cetak dan elektronik, maka hubungan ibukota propinsi ini dengan daerah-daaerah pedalaman hanya bisa dilakukan melalui jaringan tranportasi dan komunikasi yang sederhana dan terbatas. Semua kesenjangan seperti di atas akibat kepincangan pembangunan yang dari waktu ke waktu selalu fokus dan mengistimewakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di perkotaan, sedangkan daerah pedalaman dengan berbagai alasan selalu megap-megap tertinggal jauh di belakang.

---

[32] *Prilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Balitbang Agama, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, 1999.

Selanjutnya mengenai kependudukan, dibandingkan dengan luas wilayah yang lebih besar dari pulau jawa, kepadatan penduduknya tergolong jarang, rata-rata hanya sekitar 27 jiwa perkilometer bujur sangkar. Kejarangan ini kurang menguntungkan bila dikaitkan dengan upaya akselerasi pembangunan Kalimantan Barat yang memiliki sumber daya alam yang beragam dan berpotensi besar. Seirama dengan tidak meratanya pembangunan, penyebaran penduduk antara perkotaan dan pedesaan, antara kota/kabupaten, kawasan pantai dan bukan pantai, atau pesisir dan pedalaman, terdapat ketidak-seimbangan.

Dari jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2002 yang diproyeksikan sekitar 3,9 juta jiwa, lebih separuhnya bermukim di empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sambas, Pontianak, Sanggau Ledo dan kota Pontanak yang luas wilayahnya lebih kurang 32,29 persen dari luas propinsi Kalbar secara keseluruhan. Sementara sisanya sekitar 40 persen penduduk tinggal di enam kabupaten yang meliputi area sekitar 67,71 persen dari keseluruhan wilayah propinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak yang luas wilayahnya 108.80 kilometer persegi atau kurang dari satu persen dari luas propinsi, dengan tingkat penghunian terpadat, rata-rata 4.555 orang per kilometer. Sementara Kabupaten Kapuas Hulu dengan keluasan lebih kurang 20,33 persen dari luas Kalimantan Barat dengan tingkat kepadatan paling rendah, rata-rata hanya sekitar 6 jiwa[33]. Dengan kata lain distribusi

[33] *Kalimantan Barat Dalam Angka 2002,* Provinsi Kalimantan Barat.

penduduk Kalimantan Barat sebagian besar atau sekitar 60 persen terpusat di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau Ledo.

Selanjutnya, ditinjau dari sudut etnik, agama dan mata pencaharian penduduk Kalimantan Barat sangat majemuk. Dari penduduk sekitar 3,3 juta jiwa pada tahun 1995, sekitar 43 persen (1,3 juta) di antaranya merupakan penduduk asli Dayak, sisanya meliputi suku-suku Melayu, Cina, Jawa, Sulawesi, Sumatera, Bali dan lainnya. Dari parameter mata pencaharian dari penduduk yang bekerja sebanyak 1.827.278 jiwa, sebagian besar atau sekitar 62 persen berkiprah di bidang pertanian. Selebihnya tersebar di sektor-sektor perdagangan, jasa, industri, konstruksi, dan lain-lain.

Sementara komposisi penduduk menurut agama, sebanyak 56,69 persen beragama islam, 19.94 persen Katolik, 14.41 persen Kristen Protestan, 8,60 persen Budha, 0,36 persen beragama Hindu, dan kepercayaan lain-lain sebanyak 8,34 persen. Sayang sekali data lengkap yang menggambarkan secara jelas keterkaitan antara parameter suku, agama dan pekerjaan ini tidak tersedia. Namun, dari wawancara dengan para pejabat pemda dan Biro Pusat Statistik setempat, dinyatakan bahwa pemilahan penduduk menurut suku, agama dan pekerjaan itu mempunyai korelasi sosial.

Pada umumnya penduduk suku Melayu beragama Islam dan bekerja di sektor pertanian. Sedangkan sebagian besar suku Dayak merupakan penganut Kristen (Katolik dan Protestan) dengan mata pencaharian selaku petani dan

bertempat tinggal di wilayah pedalaman. Komunitas turunan Cina seperti di tempat-tempat lainnya, sebagian besar menganut keyakinan agama Budha/Kong Hu Chu, dominan di sektor perdagangan, cenderung terkonsentrasi di lingkungan tempat-tempat pemukiman yang eksklusif. Sementara para migran dari luar khususnya etnik Madura pada umumnya beragama Islam, tersebar di beberapa wilayah perkotaan, berkiprah di bidang perdagangan dan jasa, di samping terkonsetrasi di daerah pedalaman sebagai petani.

Dengan konfigurasi penduduk peserti di atas, dengan pengelompokan sosial tersegregasi menurut suku, agama dan sosial, dapat memudahkan terjadinya kondlik sosial, khususnya konflik suku atau agama.

Potensi Kerukunan dan Konflik

Antar Penduduk setempat yang terdiri dari beragaman suku seperti Dayak, Madura, Cina, Bugis dan sebagainya sudah lama terjalin kebersamaan dan terjadi asimilasi.Dalam menjalani hidup keseharian masyarakat setempat, baik secara individual maupun kelompok, antar mereka terdapat ikatan saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sosial ekonomi dan pelaksanaan tugas masing-masing. Selain itu antar penduduk yang berbeda latar belakang budaya dan agama ini juga terjadi ikatan kekerabatan dan kekeluargaan melalui garis keturunan atau kawin-mawin. Dalam interaksi sehari-hari mereka hidup berdampingan,

saling menghormati identitas budaya dan keyakinan agama masing-masing dan tidak saling mengganggu.

Sesekali terjadi konflik antar warga orang-orang Dayak, Melayu, Jawa, Bugis maupun Cina, maka hal itu dipandang sebagai konflik individual, konflik orang-perorang bukan konflik kelompok. Oleh karena itu bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat, tidak merembet kemana-mana. Demikan juga antara para migran Madura dengan orang-orang Melayu dan Dayak setempat, sebenarnya sudah sejak lama dan banyak terjadi proses asimilasi. Akan tetapi menurut informan tokoh dan pejabat yang berasal dari suku Dayak, orang-orang Madura yang berhasil, mempunyai kebiasaan mendatangkan keluarga mereka sehingga migrasi baru terus menerus berlangsung. Dari waktu ke waktu jumlah mereka makin meningkat dan tinggal memusat di tempat-tempat pemukiman ekslusif Madura. Di dusun Paum Kecamatan Seluak Kabupaten Sambas, kelompok Dayak Bekasih yang berjumlah sekitar 20 Kelapa Keluarga (KK)bahkan menjadi kelompok minoritas dibandingkan dengan sekitar 500 KK transmigran. Budaya merekapun (Dayak) menjadi inferior dengan kebudayaan para transmigran[3].

Lebih jauh mengenai hubungan antara para pendatang dan warga asli setempat menurut Parsudi Suparlan, agresifitas para pendatang dalam persaingan memperebutkan sumberdaya dilakukan dengan cara yang tidak serasi dan

---

[3] Edi Patembang, "Masalah Kependudukan di Kalimantan", *Kalimantan Review*, No. 19, 1996.

mengabaikan beragam aturan dan tatanan sosial setempat yang berlaku dan menjadi acuan hidup mereka. Kehidupan ekonomi yang lebih maju dan agresifitas para pendatang ini merupakan tantangan berat yang menggerogoti nilai budaya lokal, khususnya terhadap nilai dan norma sosial adat istiadat Dayak.

Orang-orang Madura sangat kental kesukuannya dan mempunyai kecenderungan menonjol ke-Madura_annya. Mereka senang mengelompok, hidup dan bekerja dalam kelompok-kelompok sebagai orang Madura, membangun solidaritas sosial sesama warga Madura. Bila terjadi konflik perorangan dengan warga lain yang berbeda suku seperti Melayu dan Dayak, konflik tersebut direspon dan diselesaikan dengan pendekatan kelompok dengan kecenderungan yang lazim digunakan melalui ancaman dan kekerasan. Eksklusifitas kesukuan kelompok Madura tersebut, memotivasi dan menyebabkan kelompok lain khususnya Melayu dan Dayak mengaktifkan budaya kesukuan, sepereti yang tergambar dalam kasus-kasus kerusuhan di beberapa tempat antara orang-orang Dayak dan Melayu berhadapan dengan orang-orang Madura di Kalimantan Barat.

Hubungan antara orang Madura dengan orang Dayak di Sambas diwarnai oleh kekerasan kategorikal atau kelompok. Sehingga pada waktu berlangsung konflik antara orang Madura dengan orang Melayu atau Dayak, masalah kesukunan diaktifkan. Kekerasan yang dilakukan orang Melayu dan Dayak terhadap segala sesuatu yang berbau Madura seperti pembunuhan, multilasi tubuh, penghancuran

harta dan atribut-atribut serta pengusiran orang-orang Madura, adalah imbas balik dari upaya pendominasian dengan kekerasan oleh warga Madura sebelum pecah kerusuhan berdarah tersebut[4].

Erosi Budaya dan Kearifan Lokal.

Selanjutnya, untuk memelihara keutuhan bangsa dan mengembangkan integrasi sosial di Indonesia, pemerintah pusat menerapkan sistem nasional di seluruh nusantara. Pranata-pranata nasional tidak sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan harapan, khususnya dalam upaya pelaksanaan hukum secara adil dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dipandang penting oleh masyarakat pada umumnya dan oleh suku-suku masyarakat lokal khususnya.

Di satu pihak pranata nasional tidak efektif karena tumpulnya supremasi hukum dan maraknya praktek-praktek KKN, sementara di pihak lain penerapan system nasional menggerogoti bahkan menghancurkan pranata-pranata lokal. Melemahnya pranata-pranata lokal, berdampak tumbuhnya situasi sosial yang kurang kondusif. Frustrasi, ketidakpastian, ketakutan dan kecemasan, disorientasi serta lunturnya identitas diri dan hilangnya makna hidup individual. Pada gilirannya dapat berujung pada munculnya suasana labil yang memudahkan berkembangnya berbagai bentuk ketegangan sosial dan konflik-konflik yang merusak tatanan kehidupan

---

[4] Parsudi Suparlan, *Konflik Antar Sukubangsa Melayu dan Dayak Dengan Madura di Sambas Kalbar*, 2002.

sosial yang rukun, toleran dan kebersamaan seperti yang didambakan semua pihak.

Penyeragaman system pemerintahan pedesaan, mengakibatkan tercerabutnya tradisi lokal yang dijadikan acuan masyarakat lokal setempat secara turun temurun. Peran para tokoh adat secara perlahan dari waktu ke waktu menjadi luntur. Sementara Kepala-Kepala Desa terfokus perhatiannya kepada persoalan-persoalan administratif pelayanan kepada atasan dan mengabaikan kepentingan umum masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat kehilangan tokoh panutan yang bisa dipercaya dan dapat dijadikan andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup kesehariannya. Menipisnya wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat pemerintahan dan tokoh setempat, menyulitkan mencari tokoh yang bisa diterima dan mendapat dukungan luas untuk berperan selaku mediator yang andal, bila sewaktu-waktu muncul masalah atau konflik.

Alienasi dan marginalisasi orang-orang Dayak dari habitatnya tanpa konpensasi politik dan ekonomi yang seimbang dan pantas, diperparah lagi oleh beragam bentuk tekanan sosial. Salah satu dari tekanan sosial itu adalah tekanan terhadap kaum perempuan Dayak. Dalam suasana praktek penegakan supremasi hukum yang tumpul bahkan mandul, perempuan dan anak-anak suku Dayak seringkali menjadi korban operasi pengelolaan sumberdaya seperti HPH. Ekspansi modal dan pembangunan di sektor kehutanan, pada umumnya diiringi kehadiran migran baru, baik melalui

program transmigrasi resmi maupun spontan untuk mewmenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Untuk pemenuhan kebutuhan biologis para pekerja ini, terutama di kawasan sekitar operasi HPH berkembang atau sengaja dikembangkan tempat-tempat hiburan, kedai minuman dan lokasi-lokasi pelacuran yang banyak merekrut tenaga kerja perempuan yang berasal dari suku Dayak. Selain itu tidak jarang juga terjadi kawin kontrak antara perempuan Dayak dengan para pendatang yang hanya berlangsung selama mereka bekerja di wilayah setempat. Akibat praktek-praktek kawin kontrak tersebut muncul persoalan sosial banyaknya korban janda dan anak-anak yang tidak terurus dan terlantar menjadi beban keluarga dan masyarakat setempat[5].

Persaingan Politik Lokal

Kebijakan pusat tentang otonomi daerah dan system banyak parpol memompa semangat dan selera para elit lokal dari berbagai kalangan setempat untuk berpartisipasi meramaikan persaingan memperebutkan posisi dan peran-peran yang dipandang penting dan dapat dijadikan sumber kekuasaan. Persaingan politik ini memang merupakan keharusan dan hal yang wajar serta berdampak positif bila berlangsung dan dilakukan sepanjang mengikuti "aturan main" dan rambu-rambu koridor hukum yang berlaku.

---

[5] Stepanus Djueng, *Manusia Dayak Orang Kecil : Yang Terperangkap Modernisasi*, IDRD, 1996.

Namun dalam pelaksanaaannya acap kali muncul berbagai persoalan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan proses demokrasi yang hendak kita bangun dan tegakkan.

Akibat kurang efektifnya pemerintahan dan aparat serta lemahnya upaya penegakan hukum, oleh pihak-pihak terkait, maka terbuka banyak peluang dan lobang-lobang bagi berlangsungnya praktek-praktek persaingan yang kurang sehat seperti KKN, tekanan, ancaman dan premanisme. Dalam rangka mencari dan menghimpun kekuatan untuk memenangkan persaingan, kalangan parpol pada umumnya gemar sekali menggunakan cara-cara mobilisasi massa pendukung dan memanfaatkan simpul-simpul sentimen kelompok yang sensitive dan rawan konflik seperti faktor kesukuan dan agama. Prilaku tindak kekerasan dan anarkhis, banyak dan sering sekali baik disengaja maupun tidak disengaja dipertontonkan ke tengah khalayak ramai dalam pelaksanaan pilkada, pilihan ketua Parpol, posisi-posisi kunci di instansi pemerintahan, DPR dan Lembaga publik penting lainnya. Praktek persaingan politik yang kurang sehat tersebut sering memicu timbulnya hiruk-pikuk politik di luar kendali, ketegangan sosial, perusakan, tindak kekerasan, yang merusak dan menyulitkan upaya penciptaan suasana yang menopang integrasi dan kerukunan bermasyarakat, bernegara dan beragama.

Ajaran agama yang sarat mengandung nilai-nilai tuntunan bagi kehidupan sosial yang rukun, toleran dan kerjasama dalam banyak kesempatan disalahgunakan oleh para elit politik untuk kepentingan sesaat kelompok dan

individual sehingga terjadi pemilihan umat beragama dalam serpihan kotak-kotak aspirasi parpol dan rawan konflik.

Hiruk-pikuk persaingan politik yang disertai dengan berbagai prilaku tindak kekerasan, kerusakan dan anarkhis lokal ini kemudian menular dan merasuk kemana-mana, berubah menjadi isu dan kehebohan nasional lantaran bumbu-bumbu beragam komentator politik yang dipublikasikan secara luas dan intensif oleh jaringan media massa.

Bentuk Konflik

Konflik yang terjadi berulang-ulang pada tahun 1996 – 1997 dan 1999 di Kalimantan Barat, merupakan konflik horizontal antara kelompok suku Dayak dan Melayu di satu pihak, berhadapan dengan kelompok suku Madura di pihak yang lain. konflik ini muncul dalam bentuk prilaku tindak kekerasan, pembunuhan, mutilasi tubuh, pembakaran, perusakan, penghancuran harta benda dan atribut budaya serta pengusiran penduduk, dan mengakibatkan banyak korban jiwa, pisik dan trauma mental mendalam.

Konflik yang bermula dan dipicu oleh tindakan iseng pemuda Bahari dan kawan-kawan yang keturunan suku Madura terhadap gadis Dayak, berbuntut menjadi perkelahian antara sejumlah pemuda Madura dan Dayak pada tanggal 6 Desember 1996 di Kecamatan Sanggau Ledo. Dalam rentetan perkelahian yang terjadi lagi belakangan Bahari dkk menyebabkan dua pemuda Dayak masing-masing Hakundus

dan Akin roboh bersimbah darah kena tusukan pisau dan dilarikan ke rumah sakit.

Tidak puas dengan cara aparat kepolisian yang dalam menangani kasus penusukan tersebut tidak tegas dan kerkesan melindungi pelaku penusukan (Bahari dkk), karena masalah serupa sudah berulangkali terjadi, kemudian masyarakat Dayak khususnya kawula muda menjadi marah dan emosional, dan terjadilah aksi perusakan dan pembakaran rumah-rumah orang Madura. Di luar perhitungan banyak kalangan, tanpa diduga kasus tersebut merupakan awal dari drama kerusuhan berdarah antara kelompok masyarakat suku Madura dengan Dayak yang kemudian disusul dengan sejumlah rentetan kerusuhan yang lebih besar dan dahsyat yang dikenal sebagai kerusuhan Sanggau Ledo (1997) dan Sambas (1999). Dalam hitungan waktu yang sangat singkat, saking dahsyatnya kedua kerusuhan berdarah tersebut, berbobar membakar nyaris seluruh kawasan wilayah Kalimantan Barat dan menelan korban jiwa, harta benda, kerusakan yang sangat mahal, pengusiran orang-orang Madura – entah kapan baru bisa kembali – dan trauma mendalam berkepanjangan yang mendera para korban dan pelaku-pelaku kerusuhan.

Dalam pandangan Pasudi Suparlan secara antropologis corak kesukuan orang Dayak mirip dengan corak kesukuan Madura. Orang Dayak mampu melakukan tindak kekerasan dan kekejaman melawan kekerasan dan kekejaman orang Madura, bahkan mampu melakukan tindak kekerasan dan

kekejaman yang melebihi orang-orang Madura. Orang Madura berani mati karena mereka berprinsip bahwa harga nyawa cuma sebenggol dan juga mempunyai kepercayaan terhadap doa-doa, jimat atau isim yang diberikan para guru mereka atau kyai. Sementara orang Dayak memperoleh kekuatan dan keberanian magis dari roh-roh panglima perang yang menjadi nenek moyang yang sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk memberikan perlindungan dan ketenteraman hidup mereka melalui upacara matok. Melalui upacara "matok" ini, mereka memanggil roh panglima perang yang disebut "kamang tariu" yang berarti teriakan perang yang menggetarkan seluruh sendi tulang musuh yang mendengarnya, untuk merasuk ke dalam tubuh orang-orang Dayak yang memanggil selaku anak cucu "kamang Tariu"[6].

Selain konflik dengan suku Dayak orang-orang Madura juga pernah terlibat konflik berdarah dengan orang-orang Melayu yang disebut kasus "Parit Setia". Peristiwa tersebut dipicu dan berawal dari tertangkapnya seorang pencuri asal Madura dan dipukuli warga setempat sebelum diserahkan ke kantor polisi. Kejadiannya berlangsung 7 Januari 999 di desa Parit Setia Kecamatan Jawai. Dua hari kemudian sekitar 200 orang Madura dari desa Sari Makmur Kecamatan Tebas desa asal pencuri yang bertetangga dengan Kecamatan Jawai menyerang warga desa Parit Setia yang mengakibatkan tiga penduduk setempat meninggal dan sejumlah lainnya luka-

---

[6] Parsudi Suparlan, *Konflik Antar Suku Bangsa Melayu dan Dayak dengan Madura di Sambas*, 2002.

luka. Orang-orang Melayu yang menjadi korban serangan yang biasanya santun dan berbudi pekerti lemah lembut, berubah menjari beringas dalam kelopmpok-kelompok amuk massa yang sulit dibendung dan dikendalikan pada tanggal 22 Januari sampai 27 Pebruari 999. Akibat amuk massa itu sejumlah warga Madura meninggal dan luka-luka, sekitar 60 buah bangunan rumah dan ruko milik orang Madura di kecamatan Tebas hancur. Atas perintah orang-orang tua Melayu penyerangan dihentikan dan dilakukan penandatangan perjanjian damai oleh para tokoh kedua pihak (Melayu – Dayak) disaksikan para pejabat dan tokoh masyarakat kabupaten Sambas.

Belum kapok dan tidak mau belajar dari puluhan kasus kerusuhan sebelumnya, pada tanggal 16 Maret 1999 sekelompok orang Madura dari desa Harapan kecamatan Pemangkat mencegat kendaraan umum yang melintas di jalan raya dari kota Sambas menuju kota Singkawang. Satu orang penumpang Dayak yang dapat ditangkap dan dibunuh oleh orang Madura bernama Martinus dari desa Selawit kecamatan Salamantan. Singkawang. Kematian Martinus membangkitkan kembali kemarahan orang Dayak di berbagai kawasan Kalimantan Barat dan menggelar upacara “Matok” sembari mengedarkan mangkok-mangkok merah. Kerusuhan berdarah, berulang lagi pecah di Sambas diiringi oleh tindak kekerasan, pembunuhan, pembakaran, perusakan dan penghancuran atribut Madura serta pengusiran orang-orang Madura.

Penyebab Konflik

Berbeda dengan kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia, konflik berdarah di Kalimantan Barat merupakan suatu konflik yang kompleks dan unik. Konflik berdarah di Kalbar ini terjadi berulang-ulang dan melibatkan dua kelompok suku yang sama. Menurut hasil kajian dan informasi dari nara sumber, sebelum kerusuhan Sanggau Ledo tahun 996 dan 1997, sejak tahun 1960-an tidak kurang dari tujuh belas kasus kerusuhan pernah terjadi antara kedua kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal ini, pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa itu semua bisa terjadi, padahal pemicunya hanya peristiwa kecil yakni perkelahian antar remaja. Apakah pihak-pihak terlibat dan terkait setempat tidak belajar dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya. Menurut akal sehat setelah pengalaman buruk yang berulang-ulang selama puluhan tahun semua pihak seharusnya sudah memahami akar persoalan yang dihadapi dan masing-masing berusaha berbenah diri agar hal serupa tidak lagi terjadi. Baik pihak yang secara langsung terlibat konflik yaitu warga Madura dan Dayak, maupun pemerintah dengan segenap aparatnya, terutama aparat keamanan.

Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu saja tidak gampang, karena akar persoalannya sangat kompleks, menyangkut banyak faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan seterusnya.

Tabel 2

Potensi Kerukunan dan Konflik di Kalimantan Barat

Potensi Kerukunan	Potensi Konflik
▪ Kearifan budaya lokal ▪ Ikatan kebangsaan ▪ Ikatan kekerabatan dan toleransi antar warga lintas suku dan agama ▪ Dialog-dialog melalui Forum Komunikasi lintas suku dan agama ▪ Ajaran agama dan pengaruh tokoh masyarakat setempat	▪ Eksklusifisme suku dan agama ▪ Persaingan tidak sehat antar elit politik ▪ Trauma berkepanjangan akibat kerusuhan ▪ Segregasi pola pemukiman menurut suku dan agama ▪ Orientasi kelompok dan budaya kekerasan ▪ Budaya global dan media massa yang tidak sesuai dengan tatanan hidup masyarakat setempat ▪ Kesenjangan sosial antara masyarakat perkotaan dan pedesaan

Cara Pendekatan

Setiap kali muncul konflik kekerasan, pemerintah dengan seluruh aparatnya menfokuskan perhatian dan berupaya secara maksimal menghentikan kerusuhan secara pisik dengan mengerahkan aparat keamanan. Kemudian

mengumpulkan tokoh-tokoh adat dan agama dari kelompok-kelompok suku terlibat, dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan damai para tokoh kedua pihak terlibat, konflik dianggap selesai. Sewaktu-waktu konflik serupa muncul lagi, maka selalu dilakukan tindakan yang sama.

Menghentikan tindak kerusuhan secara pisik oleh aparat keamanan seharusnya dipandang sebagai langkah awal, bukan suatu penyelesaian, karena faktor keamanan bukan merupakan faktor tunggal penyebab konflik. Selain faktor keamanan masih banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh mengapa konflik itu terjadi dan berulang-ulang. Cara penyelesaian yang ditempuh seperti di atas tidak menyentuh akar persoalan. Setelah berhasil meredam kerusuhan fisik pemerintah seyogyanya berupaya menemukan akar masalahannya yang mendasar di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, politik keamanan dan sebagainya. Temuan-temuan tersebut dijadikan masukan buat kebijakan, kemudian dijabarkan dalam program tindak lanjut secara actual di segala bidang terkait, termasuk keamanan seperti membenahi sarana, prasarana, personil, kemampuan dan sebagainya, supaya fungsi-fungsi keamanan bisa berjalan, termasuk intelegen sesuai dengan luasnya wilayah dan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Kekerasan Struktural

Pembabatan hutan yang bagi masyarakat Dayak merupakan suatu andalan penting buat keberlangsungan hidup mereka baik secara budaya maupun ekonomis melalui program-program transmigrasi dan pemegang Hak Pengunaan Hutan (HPH), merupakan proses marginalisasi Hutan yang bagi suku Dayak mempunyai makna sangat strategis bagi hidupnya secara turun-temurun dipelihara oleh para nenek moyang masyarakat Dayak, berubah menjadi sekedar instrumen untuk menghasilkan devisa atau lahan bisnis semata. Akibat kebijakan ekonomi lingkungan yang merusak hutan yang merupakan sumber jati diri suku Dayak, mengakibatkan mereka terpojok dan tak berdaya. Mereka tidak memahami mengapa hal itu terjadi dan tak mengerti bagaimana cara menghadapi kekerasan struktural yang sistematik dan intensif tersebut.

Alienasi dan marginalisasi orang-orang Dayak dari habitatnya tidak disertai dengan konpensasi politik, ekonomi dan budaya yang seimbang. Rasa frustasi dan kemarahan terhadap tekanan kekerasan struktural itu, kemudian terarah pada masyarakat Madura – yang karena tingkah laku keras dan kasar - dalam interaksi hidup keseharian – menjadi personifikasi dari kekuatan abstrak struktural tersebut.

Prasangka Sosial

Konflik antar etnik, sering terjadi antara lain lantaran prasangka sosial atau stereotip yang tidak mudah dihilangkan

hanya dengan meningkatnya interaksi. Padahal stereotip itu hanya ilusi kolektif menurut cara pandang etnik tertentu terhadap etnik lain yang belum tentu obyektif. Sehubungan dengan prasangka sosial ini, orang-orang Madura sejak lama mendapat stereotif negatif yang relatif stabil. Stereotif mengenai orang Madura lazimnya mengarah pada perilaku mereka yang dianggap kasar, keras, berani, kuat, suka membunuh, licik, curang. Sementara stereotip orang Madura terhadap orang Dayak sebagai orang-orang pemalas, suka mabuk, pendengki, pengiri, pengayau, pengeroyok dsb.

Prasangka sosial negatif seperti itu, tentu saja sangat berbahaya dan mengganggu bagi upaya pengembangan hubungan atau interaksi antar suku, karena masing-masing kelompok suku bertolak dari saling berprasangka sosial negatif, karakter buruk terhadap kelompok lainnya satu sama lain. Stereotip itu biasanya relatif stabil dan tidak mudah menghapusnya, apalagi bila stereotip itu dijadikan dasar interaksi sosial antar warga yang berlainan etnik. Masalah stereotip ini diduga besar pengaruhnya di balik konflik berdarah antar etnik di Kalimantan Barat. Terjadinya konflik berdarah antar suku ini –apalagi berulang kali – seperti di Kalbar, tidak melemahkan - konon pula menghilangkan – stereotip –stereotip tersebut, malah sebaliknya menguatkan.

Erosi Lembaga Tradisional

Lazimnya setiap kelompok suku dalam masyarakat, memiliki lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial yang

cukup efektif dijadikan alat pemersatu. Bila sewaktu-waktu muncul perselisihan kedua kelompok suku yang terlibat, berupaya mengelesaikannya melalui mekanisme tradisional seperti lembaga adat. Namun akibat modernisasi pembangunan yang berlangsung puluhan tahun, system dan pranata-pranata sosial tradisional tersebut tidak utuh lagi, mengalami erosi, dan degredasi fungsional. Pergeseran nilai-nilai sosial budaya akibat modernisasi pembangunan, menyebabkan lembaga-lembaga tradisional itu makin tergerus dan tergusur fungsinya, berubah menjadi sesuatu yang sifatnya simbolik belaka, khususnya di kalangan kawula muda.

Erosi lembaga-lembaga tradisional ini, juga makin parah dengan perubahan system birokrasi pemerintahan desa yang mengeragamkan model administrasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia, termasuk system pemerintahan pedesaan di lingkungan masyarakat Dayak dan Kalbar pada umumnya. Peran para tokoh adat yang berorientasi ke bawah digantikan oleh kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang lebih berorientasi ke atas. Kepala Desa lebih patuh dan fokus perhatian terpusat ke atasannya daripada patuh dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Sementara tokoh-tokoh tradisional setempat kehilangan peran, di samping banyak pula yang terkooptasi ke dalam birokrasi pemerintahan, partai politik dan sebagainya. Mereka tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap kepentingan warganya, lebih sibuk mengurusi proyek, daripada mengurus rakyatnya. Mereka kehilangan gezag atau

wibawa dalam pandangan masyarakat. Ditambah dengan berbagaoi kekecewaan akibat dampak negatif pembangunan, menimbulkan rasa frustrasi akumulatif di kalangan masyarakat bawah. Gumpalan frustrasi tersebut menjadi eksplosif tatkala bertemu dan bersentuhan dengan berbagai permasalahan tekanan sosial yang mereka hadapi. Mereka kehilangan arah, tidak tahu harus melakukan apa, kepada siapa harus mengadu. Dalam kondisi seperti itu orang cenderung cepat emosional, cepat marah, mudah terpancing issu, dan juga mudah melakukan prilaku tindak kekerasan.

Perebutan Sumber Daya

Sumberdaya alam Kalimantan Barat yang kaya dan sumberdaya kekuasaan berupa jabatan-jabatan penting yang strategis di lingkungan pemerintahan menjadi lahan persaingan para elit politik lokal. Melalui kebijakan otonomi daerah elit lokal mempunyai peluang lebih banyak untuk ikut bersaing memperebutkan sumberdaya, baik sumberdaya ekonomi maupun sumberdaya politik. Melalui berbagai cara yang tidak jarang kurang sehat, berlangsung persaingan yang makin lama makin sengit dan memerlukan dukungan masyarakat luas. Dalam rangka berupaya mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya, sering ditempuh dengan cara-cara yang rawan konflik, seprti penggalangan kelompok massa turun ke jalan-jalan raya, tempat keramaian dan saling berbenturan antar kelompok-kelompok kepentingan politis yang melakukan hal yang sama. Dalam kondisi dan suasana

yang demikian, massa mudah terpancing emosi, dan sangat sulit dikendalikan bila terjadi benturan atau konflik.

Politisasi atau penyalahgunaan faktor-faktor SARA yang sensitif seperti faktor suku dan agama untuk kepentingan politis kelompok merupakan suatu hal yang juga sangat riskan dan dapat mengundang konflik yang intensif, berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Suku dan agama merupakan identitas dasar kelompok masyarakat. Sewaktu-waktu kelompok bersangkutan merasa terganggu identitasnya, mereka mempunyai dorongan sangat kuat untuk membela kehormatan kelompoknya, bila perlu dengan cara-cara kekerasan.

Masih merebaknya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) serta lemahnya upaya penegakan supremasi hukum, juga membuat suasana dan kondisi masyarakat kurang kondusif buat integrasi sosial yang nyaman dan aman. Efektifitas dan wibawa pemerintahan dan elit politik menjadi luntur karena kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas. Fungsi pemerintah dan elit politik selaku pemersatu masyarakat akan menjadi mandul atau tumpul. Apalagi ditambah pula dengan tekanan sosial, krisis ekonomi yang bertubi-tubi menimpa kalangan bawah seperti tahun-tahun terakhir ini, terutama di lingkungan masyarakat di pedesaan atau pedalaman. Ikhwal bentuk, penyebab dan rekomendasi penyeseaian konflik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Bentuk Konflik, Penyebab dan Rekomendasi Konflik di Kalimantan Barat

Bentuk Konflik	Penyebab Konflik	Rekomendasi
▪ Konflik horizontal antar suku Dayak/Melayu dan Madura dalam bentuk prilaku kekerasan, penghancuran, penyiksaan, pembunuhan dan pengusiran (1996-1997-1999-2000)	▪ Kekerasan struk-tural dan pengua-saan sumber daya secara tidak sehat	▪ Peninjauan ulang izin HPHdan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan dan sumber daya lainnya ▪ Pengakuan terhadap hak ulayat adat atas hutan dan tanah suku Dayak ▪ Memotivasi, memberikan kemudahan dan kesempatan luas kepada masya-rakat Dayak untuk mengembangkan diri dalam semua bidang
	▪ Dominasi dan menganalisasi budaya dan institusi tradisional lokal	▪ Menata pemukiman masyarakat majemuk yang memudahkan terjadinya pembauran dan komunikasi personal lintas etnis dan agama ▪ Membentuk Komisi Hubungan Antar Etnik dan Agama yang melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan analisis dinamika komunikasi multikultural dan memberikan masukan

		kepada pemerintah dalam rangka kerukunan
	▪ Persaingan, perebutan sumberdaya politis dan ekonomis.	▪ Penegakan supremasi hukum ▪ Fokus kepada orientasi kepentingan publik, bukan orientasi kelompok ▪ Partisipasi masyarakat lokal yang lebih luas dalam proses penyusunan kebijakan publik ▪ Pengkajian ulang produk kebijakan tentang kerukunan hidup umat beragama

Rekomendasi Solusi

Dari beragam informasi yang berhasil dihimpun melalui kajian ini melalui telaah sejumlah sumber literature, dokumentasi laporan hasil kajian dan media massa, wawancara, diskusi terbatas dan pengamatan selintas di lapangan, setelah dianalisis secara sederhana, diperoleh gambaran umum tentang konflik di Kalimantan Barat yang dipaparkan dalam pokok-pokok temuan-temuan kajian berikut.

1. Pendekatan masalah yang dtempuh oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam sejumlah konflik atau

kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Barat, terbatas dan fokus pada upaya lokalisasi dan penghentian kerusuhan secara fisik dan disudahi dengan penandatanganan naskah kesepakan damai oleh pada tokoh masing-masing kelompok yang berkonflik. Model pendekatan seperti itu merupakan langkah awal tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan konflik secara mendasar karena tidak menyentuh akar persoalan konflik. Diperlukan langkah tindak lanjut berupa penelitian yang serius untuk menemukan akar masalah yang menjadi penyebab konflik. Berpedoman pada temuan-temuan tersebut dirancang kebijakan yang menyeluruh dan utuh disertai dengan program-program konkrit yang mengarah pada pemecahan akar masalah.

2. Kekerasan struktural secara sistematik puluhan tahun pemerintahan Orde Baru melalui otoritas kekuasaan, pemilik HPH dan program transmigrasi, menyebabkan terjadinya alienasi dan merginalisasi masyarakat Dayak dari habitatnya tanpa kompensasi pilitik, ekonomi dan cultural yang seimbang. Pembabatan hutan yang dijadikan instrumen kapital pengumpulan devisa dan penumpukan kekayaan semata, menyebabkan keterputusan masyarakat Dayak dengan lingkungan tempat bernaung dan andalan hidup kultural dan ekonomi serta kehilangan jatidiri. Oleh karena itu pemerintah bersama-sama dengan DPRD dan masyarakat setempat perlu menempuh langkah-langkah menghentikan pembabatan hutan dan lingkungan serta

mengembalikan hak ulayat adat atas hutan dan tanah masyarakat suku Dayak. Diperlukan lebih banyak kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat Dayak agar mereka dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas kehidupannya melalui pemerataan pembangunan secara adil dan proporsional.

3. Pergeseran hak-hak dan dominasi budaya oleh masyarakat Madura terhadap budaya Dayak di Sambas dengan cara-cara yang dipandang curang, licik dan prilaku tindak kekerasan merupakan salah satu aspek munculnya konflik antar suku di Sambas. Diperparah pula oleh faktor stereotip negatif yang sudah ada sejak lama antara kedua suku. Dari sisi masyarakat Dayak, orang-orang Madura dipandang senantiasa berpeliraku kasar, keras, kuat, berani, licik, curang, suka membunuh. Ke mana-mana membawa clurit atau pisau, keroyokan. Sementara stereotip orang Madura terhadap masyarakat Dayak seperti pemalas, pemabuk, pendengki, pengiri, pengayau, pengeroyok. Corak hubungan antara suku Dayak dan suku Madura berupa hubungan kategrikal atau hubungan yang berlandaskan kelompok. Sedangkan hubungan sosial secara personal antar warga kedua suku relatif kecil. Dengan corak hubungan seperti ini, maka bila terjadi konflik antar warga yang berasal dari kedua suku tersebut, dipandang sebagai konflik kelompok dan suku, sehingga sulit dikendalikan. Sehubungan dengan hal ini, untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi kerukunan masyarakat setempat perlu ditempuh langkah-

langkah seperti; 1) menggalakkan dialog dan komunikasi multukultural antar warga lintas etnis dan agama; 2) Menata pemukiman dan komunikasi lintas etnis, agama, dan profesi; 3) Membentuk komisi Hubungan Antar Etnik dan Agama yang melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan analisis dinamika kmunikasi multikultural dan memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak terkait dalam rangka kerukunan.

4. Lembaga-lembaga dan pranata tradisional yang seyogyanya dapat berfungsi sebagai media pemersatu penopang kerukunan, tergerus dan tergusur oleh dampak modernisasi pembangunan dan budaya global. Diperparah pula oleh kebijakan penyeragaman system pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Pergeseran nilai-nilai sosial budaya akibat modernisasi, menyebabkan lembaga-lembaga tradisional kehilangan fungsi, mandul, berubah menjadi sesuatu yang sifatnya simbolik belaka, teristimewa di kalangan kawula muda. Kepala-Kepala desa lebih fokus dan taat kepada atasannya, dan mengabaikan perhatian, aspirasi dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan umum masyarakat di bawah pimpinannya. Tidak sedikit tokoh-tokoh masyarakat setempat yang terkooptasi ke dalam jaringan birokratisasi pemerintahan dan lembaga politik yang sibuk mencari dan mengurus proyek-proyek. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh menjadi luntur, efektifitas pemerintahan menipis.

Suasana dan kondisi yang kurang menguntungkan ini merupakan lahan subur buat tumbuh dan berkembangnya frustrasi akumulatif di kalangan halayak ramai. Oleh karena itu diperlukan upaya pembenahan secara serius melalui langkah-langkah : 1) Refungsionalisasi dan reaktualisasi lembaga adat; 2) Mengembalikan pemerintahan desa menurut adat setempat; 3) Perlindungan dan dukungan pemerintah terhadap adat budaya setempat yang serasi dan mendukung upaya demokratisasi.

Sumberdaya politik dan ekonomi disuatu daerah, merupakan kelaziman dan kewajaran dimana-mana menjadi lahan persaingan para elit politik setempat, apalagi setelah adanya kebijakan tentang Otonomi Daerah. Hanya saja dalam prakteknya di lapangan, sering dilakukan dengan cara-cara yang kurang sehat, tidak serasi dengan tatanan persaingan, menurur rambu-rambu koridor hukum yang digariskan bersama. Praktik-praktik KKN, politisasi dan penyalahgunaan sentimen suku dan agama, serta mobilisasi kelompok massa di jalan-jalan raya dan tempat-tempat umum terbuka lainnya dalam rangka penggalangan dukungan untuk kepentingan politis kelompok masing-masing, seperti dalam pelaksanaan Pilkada, Musyawarah Lembaga-lembaga Politik dan sentra-sentra kekuasaan lainnya sangat meningkatkan berkembangnya kondisi dan situasi yang rawan konflik. Konon pula diiringi dengan komentar dan dibumbui dengan beragam isu yang dipublikasikan secara luas media massa yang terkadang liar dan nakal. Bertolak dari adanya berbagai

kenyataan seperti di atas, pemerintah bersama-sama DPRD, lembaga politik dan tokoh-tokoh setempat hendaknya berupaya melakukan;) Penggalakan pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum secara kontinu; 2) Pengembangan orientasi kepentingan lembaga dan kepentingan publik, bukan orientasi kepentingan kelompok; 3) Pertisipasi masyarakat yang lebih intens dan luas dalam proses penyusunan kebijakan publik; 4) Pengkajian ulang produk-produk kebijakan di berbagai bidang sosial., ekonomi, politik termasuk produk kebijakan di bidang kerukunan hidup berbudaya dan beragama.

Pustakan Rujukan

Balitbang Agama, *Prilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Jakarta, 1999.

Biro Pusat Statistik, *Kalimantan Barat Dalam Angka, Jakarta, 2002*

Edi Patembang, "Masalah Kependudukan di Kalimantan", *Kalimantan Review, No. 19*, 1996.

Parsudi Suparlan, *Konflik Antar Sukubangsa Melayu dan Dayak Dengan Madura di Sambas Kalbar*, 2002.

Stepanus Djueng, *Manusia Dayak Orang Kecil Yang Terperangkap Modernisasi*, IDRD, 1996.

(IV)

KALIMANTAN TENGAH

Sejak pertemuan "*Damai Tumbang Anol*" di Hulu Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah (Kalteng) lebih seabad lalu, dalam upaya penyelesaian konflik-konflik antarsuku yang kerap terjadi di bumi Borneo ini melalui hukum Adat, maka masyarakat Dayak umumnya di Kalimantan dan khususnya di Kalteng telah menghentikan tradisi *kahayan/kayau* (berburu kepala), *hasang* (saling serang) *habuni* (saling bunuh), dan *hajipen* (saling memperbudak).

Sejak peradaban moderen masuk ke hutan belantara Kalimantan yang diusung oleh Kristen dan Islam, mulailah masyarakat pedalaman ini mengenal peradaban baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mengenal tata pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, transaksi ekonomi, dan nilai dan norma budaya baru, serta tentu saja, menyaksikan peristiwa proses pengagamaan yang dilakukan oleh agama-agama baru, yaitu Kristen dan Islam. Dalam masa kurang dari 100 tahun kemudian, masyarakat Dayak sebagai penduduk pribumi mulai mengalami proses modernisasi, pembudayaan, sebagai dampak interaksi antara mereka dengan pendatang. Tradisi kekerasan tidak lagi menjadi gaya hidup (*life-style*) keseharian mereka lagi. Kebiasaan membawa senjata, seperti : mandau, lunju, pedang, dan panah di tempat umum secara berangsur kian berkurang.

Namun demikian, dalam masa kurang lebih 50 tahun belakangan ini, masyarakat Dayak yang saat itu sudah mulai meninggalkan budaya kekerasan berinteraksi dengan warga masyarakat pendatang dari wilayah-wilayah tertentu di Nusantara, termasuk dari Pulau Madura. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura saat ini berprilaku sesuai adat-kebiasaan dan pola budaya yang melekat dalam masyarakat Madura. Tak heran, jika dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada strata sosial rendah (akar rumput) mereka membawa alat atau senjata sebagai simbol kekerasan, seperti membawa *carok* (clurit). Prilaku dan adat kebiasaan sehari-hari suku Madura yang dibawa sejak kedatangannya, dalam interaksi dengan masyarakat lain di Kalimantan, dpersepsi sebagai prilaku, sikap, dan adat kebiasaan yang negatif dan destruktif bagi masyarakat umumnya.

Persepsi seperti ini kian menguat dan melekat pada masyarakat Kalimantan, bahkan dalam dekade terakhir, kian berkembang persepsi negatif terhadap sebagian masyarakat Madura sebagai masyarakat yang "kurang manusiawi". Sikap, tindakan dan kebiasaan berlaku kasar, ekspansif, agresif, dan terkesan kurang "manusiawi" memperrawan situasi tata hubungan masyarakat di Kalimantan, terutama di daerah perkotaan, seperti : Sambas, Sampit, Pontianak, Palangka Raya, dan kota-kota lainnya.[34] Bahkan, di tengah kondisi

[34] Pada umumnya, sesuai dengan kebiasaan dan aspirasi pekerjaannya, sebagian besar atau hampir seluruhnya, masyarakat suku Madura memilih tinggal di daerah perkotaan atau daerah yang ramai. Sebagian besar, mereka bekerja di sektor informal di bidang jasa, buruh, pedagang, dan sejenisnya.

sosial-ekonomi yang termarginalkan yang ditandai pula oleh berbagai krisis ekonomi, perjuangan hidup mereka semakin sulit, ketat, dan tajam persaingannya sehingga menambah kebiasaan dan karakteristik tipikal mereka semakin "menjadi-jadi" dan tidak terkontrol serta mengundang meletusnya konflik terbuka.

Rentetan akumulatif peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Madura terhadap kelompok lain, terutama masyarakat Dayak, seperti penyiksaan, pembunuhan, pengusiran dari tempat kerja atau berdagang, dan tindakan kekerasan lainnya, menjadikan masyarakat Dayak memutuskan untuk melakukan perlawanan demi membela harga diri dan martabat yang terinjak-injak mereka.

Tekanan masyarakat Madura dan akumulasi padat kemarahan yang disimpan, mendorong dan menyemangati etnik dayak untuk kembali menghidupkan tradisi kekerasan yang hampir seabad telah ditanggalkannya. Mereka, dalam perlawanannya terhadap etnik madura, mempergunakan pendekatan *pengayauan*—cara melawan pihak lain dengan melakukan pemenggalan atau pembunuhan secara sadistik.[35] Budaya *payau* (penggal kepala) yang telah lama dikubur satu

---

[35] Menurut beberapa saksi mata, digambarkan bahwa pemenggalan yang dilakukan etnik Dayak yang datang dari hulu sangat sulit dijelaskan secara ilmiah. Mereka yang terisi dengan/dan dirasuki kekuatan magis roh leluhur (*nayo*) dan "Panglima Burung", melakukan pemenggalan terhadap kepala etnik Madura dari jarak jauh. Walau pun, banyak orang etnik Madura bersembunyi atau diamankan ketat oleh polisi, namun mereka dapat pula dipenggalnya. Wawancara denga : Wayan Karya, dan beberapa tokoh Dayak dan Jawa lainnya.

abad lalu, dibangkitkan kembali dalam membela diri dari pemarjinalan oleh etnik madura.

Masyarakat etnik Dayak tidak lagi percaya terhadap berbagai upaya perdamaian yang dibuat dan disepakati bersama. Dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa Sangau Ledo, Sambas Pontianak (Kalimantan barat) dan rentetan peristiwa pembunuhan di Katingan, Kotawaringin Timur (kurang lebih 100 km dari Sampit), masyarakat etnik Dayak bersama polisi melakukan penggerebegan senjata. Saat itu, ditemukan sejumlah senjata api, bom rakitan, serta dokumen. Disinyalir saat itu ditemukan "*Dokumen Haji Marlanggih*" yang berisikan rencana penguasaan kota Sampit oleh etnik Madura. Selain itu, ditemukan pula spanduk-spanduk bertulisan "Selamat Datang di Kota Madura", "Sampit, Sampang Kedua", dan "Sampit Serambi Mekkah" pada hari pertama dan kedua "Minggu Berdarah" saat etnik Madura berhasil menguasai kota Sampit.

Meletusnya konflik terbuka antara etnik Madura dan etnik Dayak, pada tanggal 12 Februari 2001 tersebut, melahirkan sikap dan kesepakatan antara pihak berkonflik yang diinisiasi dan dikordinasi Pemerintah dalam upaya meredam dan mebatasi skala konflik berbasis etnik ini. Hasil dari serentetan pertemuan yang digelar antara masyarakat, DPRD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, diantaranya kesepakatan yang berisikan : (1) Enam butir sikap yang telah disampaikan kepada POLRI, (2) Kesediaan masyarakat etnik Madura untuk dievakuasi

untuk menyelamatkan jiwa dan mendinginkan suasana konflik, (3) Penolakan darurat Sipil, (4) Penegasan bahwa Kerusuhan di Sampit merupakan konflik etnik murni dan bukan konflik agama. Kemudian, sebagai tindak lanjut pemulihan, penataan kembali serta pengembangan situasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, menerbitkan *"Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik"*, yang antara lain bertujuan untuk menangani secara arif dan bijaksana agar tercipta kehidupan masyarakat yangv rukun, damai, aman dan tertib, serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang damai, mandiri dan demokratis sebagaimana filosofi "*Huma Betang*" dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia.[36]

Setelah beberapa tahun berselang, situasi paska konflik di Sampit khususnya dan daerah sekitar Kalimantan tengah umumnya, mengalami perkembangan mengembirakan. Ketenangan dan kedamain mulai tumbuh kembali. Ketegangan sosial mulai semakin "sirna" dari hiruk pikuk kota di Kalteng. Dalam kaitan inilah, pemetaan dilakukan dalam rangka menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang ditengarai pernah mengalami konflik terbuka beberapa tahun lalu.

---

[36] Secara substantif, Perda ini terdiri dari 6 (enam) Bab, meliputi 14 pasal , ditambah Penjelasan (Umum) dan Pasal Demi Pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain menyangkut : Ketentuan Umum, Rekonsiliasi, Penanganan dan Penataan, Pendataan dan pendaftaran Penduduk, Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Penertiban Aset Etnik Dampak Konflik.

A. Kondisi Umum Wilayah

Propinsi Kalteng, yang berluas wilayah 153.564 Km2, terdiri atas lima Kabupaten dan satu daerah kota, dengan 85 Kecamatan dan 1.328 desa/kelurahan. Propinsi ini berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut. Utara dengan Propinsi Kalbar dan Kaltim; Timur dengan Propinsi Kaltim dan Kalsel; Selatan dengan Laut Jawa; dan Barat dengan Propinsi Kalbar.

Penduduk Propinsi Kalteng pada tahun 1990 berjumlah 1.397.601 jiwa, pada 1999 berjumlah 1.739.333 jiwa[37]. Kemudian terakhir, pada tahun 2004 mencapai 2.016.117 jiwa. Secara rinci persebaran penduduk Kalteng dan agama yang dipeluknya dapat dilihat dalam tabel 1.

Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kalteng

Struktur sosial masyarakat Kalteng terbangun atas tiga tingkatan, yaitu kelompok bawah yang terdiri dari kelompok papa atau miskin, kelompok menengah yang terdapat pada kelompok pedagang, petani serta kelompok atas yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pemerintahan. Etnik yang terdapat di Kalteng, diantaranya adalah etnik Dayak, Madura, Banjar, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bugis, Makassar, dan Batak. Namun demikian, walau banyak etnik hidup di daerah ini, akan tetapi budaya Kalimantan Tengah adalah budaya Dayak.

---

[37] *Kalimantan Tengah Dalam Angka 1999*, BPS Daerah Kalimantan Tengah, 2000.

Terlihat dalam sebagian besar aspek kehidupan diwarnai oleh kebudayaan Dayak, termasuk bahasanya. Walau tak terhindari, kebudayaan Banjar yang "melayu" dan budaya pendatang yang dibawa etnik Jawa dan Madura juga semakin mempengaruhi prilaku budaya[38] (cara persepsi, sikap, *mode of conduct*", dan gaya hidup) masyarakat umumnya, terutama masyarakat perkotaan di Kalimantan Tengah.

Namun demikian, dalam perkembangannya, terutama dalam beberapa dekade terakhir, budaya masyarakat Kalteng mengalami perubahan relatif cepat. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor terjadinya perubahan budaya masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di daerah perkotaan. *Pertama*, masuknya budaya lokal melalui kedatangan etnik-etnik berasal dari Jawa, Madura, dan sebagainya. Etnik-etnik ini, secara akulturatif dan evolutif, menyebabkan terjadinya difusi kebudayaan sehingga budaya Dayak semakin kurang daya regulasinya terhadap tata kehidupan masyarakat umumnya. *Kedua*, pada dekade terakhir, seiring dengan proses globalisasi yang terjadi di seluruh jagat dan proses pembangunan yang berlangsung, masyarakat Kalimantan Tengah menjadi semakin terbuka dengan perubahan. Selain dampak konstruktif globalisasi yang dapat dicerap seperti

---

[38] Prilaku budaya (*cultural behaviour*) dimaksudkan berkaitan dengan wawasan, pengetahuan, pengalaman, sikap, dan tindakan masyarakat yang dipengaruhi atau didasarkan pada nilai dan norma budaya yang disepakati, diterima dan diberlakukan dalam kehidupan nyata masyarakat. Dengan demikian, prilaku budaya dapat terlihat dan tercermin dalam aspek-aspek prilaku, seperti : cara persepsi (*way of perception*), kriteria kaidah baik-buruknya suatu tindakan, gaya hidup (life-style), cara tindak (*mode of conduct*), dan kebiasaan keseharian (*folk-ways*) yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat.

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan modernitas dalam kehidupan dan aspirasi pendidikan yang kian meningkat, dampak negatif-destruktif globalisasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan budaya masyarakat daerah ini. Kian maraknya pelacuran, kenakalan remaja, penggunaan obat-obat terlarang, serta menguatnya sikap permisif terhadap praktek penyimpangan sosial merupakan realitas baru yang berkembang dewasa ini.

Dasar budaya Dayak sebagaimana tersirat dalam dalam falsafah "*Rumah Betang*" yang dibangun di atas "*Melai Petak Mandeng, Hete Eka Pambelum Je Kata Tahi*"—yang artinya di situ tanah diinjak, maka di situlah tempat hidup selamanya serta filsafat hidup "saling menghargai, saling memelihara bumi pertiwi, hidup bersama secara berdampingan, menghargai ajaran nenek moyang" semakin pudar. Tekad dan prinsip masyarakat Dayak untuk hidup damai dan rukun bersama masyarakat etnik lainnya di Kalteng pada beberapa dekade terakhir semakin melemah, mengingat terdapatnya sekelompok etnik yang kurang menghargainya.

Berpijak pada prinsip kedamaian hidup bersama dan penjagaan tanah kelahiran dari serobotan pihak lain inilah, masyarakat etnik Dayak secara tegas memutuskan untuk mempertahankan bumi Kalteng dari "gangguan" etnik lain. Pernyataan terbuka masyarakat etnik Madura yang memproklamirkan "Selamat Datang di Kota Madura", "Sampit, Sampang Kedua" yang terpasang di spanduk-spanduk di hari pertama dan kedua kemenangan di satu pihak dan faktor kedendaman dan ketidak-sukaan etnik

Dayak terhadap perlakuan etnik Madura umumnya di pihak lain menyebabkan meletusnya peristiwa "Minggu Kelabu" – sebuah peperangan berdarah antara etnik Dayak dan Madura.[39] Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, setelah peristiwa tersebut, masyarakat Kalimantan Tengah umumnya, dan masyarakat Sampit dan Palangka Raya sebagai ibukota dan sekaligus sosio-meter masyarakat, menunjukkan suasana relatif aman dan tenang. Refleksi masyarakat terhadap peristiwa mengenaskan tersebut di satu pihak dan peran aktif pemerintah di pihak lain tampak merupakan faktor kuat terbangunnya kembali struktur suasana tata hubungan antar masyarakat yang damai dan tenang.

Terdapat beberapa faktor pemercepat "terkendalinya" atau "redamnya" suasana di Kalimantan tengah jika dilihat dari perspektif sosial budaya.

Pertama, masih berlakunya prinsip-prinsip nilai dasar budaya Dayak di masyarakat, terutama masyarakat etnik Dayak. Etnik Dayak yang terdiri atas banyak subetnik,[40] sebagian besar hingga kini masih meyakini kebenaran akan ajaran-ajaran agama yang diyakininya, serta masih memiliki komitmen untuk mengamalkan/mempraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai doktrinal yang masih

---

[39] Dalam peristiwa ini, walau dijastifikasi sebagai konflik antar etnik madura dan Dayak, namun dalam kenyataannya, etnik-etni lain yang ada di daerah ini "mendukung" etnik Dayak untuk melawan Madura. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan analisis sosiologik terhadap persepsi masyarakat etnik non-Dayak terhadap kedua etnik tersebut (Dayak dan Madura).

[40] Uraikan (lihat : Nuhrison, 70).

relatif terinternalisasi dalam masyarakat pemeluknya inilah yang memerankan fungsi kontrol terhadap sikap agresif dan brutal dalam melawan etnik Madura yang dijadikan sasaran. Adat Kaharingan yang mengajarkan keharusan bagi pemeluknya untuk saling mengasihi (*serap sintaq*), adat saling menghormati sesama manusia (*adat Nyempitai Nyentiawatn*) untuk saling bantu, bergotong royong, dan bekerja sama (*adat bungkaaq erakng tumapk tuaq*), tampak fungsional bagi terciptanya kembali suasana konflik terbuka yang baru terjadi.

Kedua, terdapatnya nilai budaya etnik lain yang kondusif bagi percepatan hubungan antar etnik yang kondusif. Budaya Jawa, Bali, Lampung yang menekankan pada pentingnya makna peguyuban, kebersamaan, tepa-selira, saling asih-asah dan asuh, serta penekanan pada kesimbangan alam demi terwujudnya suasana aman tentrem kerta raharja, serta budaya Banjar yang "melanesian" dan kental dengan pengaruh Islam, mengajarkan nilai-nilai keharmonisan hidup masyarakat dan budaya etnik lainnya cenderung merupakan faktor konstruktif bagi pulihnya tata hubungan antar etnik khususnya dan kondisi masyarakat luas umumnya di Kalimantan Tengah.

Ketiga, tumbuhnya budaya global dalam masyarakat, terutama pada masyarakat perkotaan. Globalisasi, yang dalam wujudnya merupakan pengenalan dan penyebaran modernitas, ilmu pengetahuan, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan universal lainnya, secara sosio-psikologis maupun secara sosio-kultural menyebabkan tumbuhnya sikap menerima secara terbuka pada kemajemukan dan

mulikulturalitas dalam kehidupan masyarakat. sesungguhnya. Dampak sikap ini, pada tataran budaya, dapat mereduksi tingkat perkembangan arogansi kultural, tradisi etnosentris, ekstrimisme dan fanatisme budaya dalam masyarakat.

Kehidupan Beragama

Dilihat dari agama yang dipeluknya, Kalimantan Tengah merupakan daerah majemuk dan multi-kultural. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha tumbuh dan berkembang di daerah ini. Umat masing-masing agama hidup berdampingan sejak hampir seabad di daerah Kalimantan Tengah ini. Bahkan, "agama" nenek-moyang yang menyebut dirinya "agama" Kaharingan hingga kini ditengarai masih mencapai jumlah 308.098 jiwa, yang sebagian besar hampir menginduk kepada agama Hindu,[41] selebihnya ke agama lain.[42]

---

[41] Penelitian tentang Kaharingan di berbagai daerah di Kalimantan menunjukkan bahwa penganut agama Hindu sebagian besar atau mencapai kurang lebih 70 % adalah pengikut "agama" Kaharingan. Pengurus Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) melaporkan kepada Wakil presiden RI melalui surat Nomor : PB-BAKDI/P/182/XII/2000 tertanggal 6 Desember 2000 menyebutkan bahwa umat Kaharingan di seluruh Kalimantan mencapai jumlah 1.523.217 jiwa, dengan perincian : Kalteng berjumlah 308.098 jiwa, Kalimantan Barat 756.374 jiwa, Kalimantan Selatan 40.828 jiwa serta Kalimantan Timur 417.916 jiwa. Lihat : Nuchrison, (Tahun 2002), *Penelitian Agama Kaharingan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*; Kustini, (2002), *Kaharingan : Studi Kasus Agama di Desa Warukin , Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan*, dan Ahsanul Khalikin, (Tahun 2002), *Agama Kahringan : Kepercayaan Masyarakat Dayak Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur*. Ketiga penelitian tersebut diterbitkan oleh Puslibang

Tabel 1 menunjukkan bahwa komposisi penduduk dilihat dari kepelukan agamanya, menggambarkan urutan besar umat di Kalteng, dimana penganut agama Islam menempati urutan terbesar yang memiliki umat sebesar 1.420.581 (70,46 %). Selanjutnya umat Kristen menempati urutan kedua terbesar dengan jumlah pemeluk 311.569 (15,45 %), Hindu 210.403 (10,43 %), Katolik 68.005 (3,37 %), dan umat Buddha yang memiliki jumlah pemeluk tersedikit, hanya hanya mencapai jumlah 5.559 atau 0,29 % dari seluruh penduduk di Kalimantan Tengah.

Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, Departemen Agama, 2002.

[42] Bagi sebagian besar pemeluk Kaharingan, walau masuk ke agama lain, mereka tetap menjadi bagian dari kepercayaan "Kaharingan" yang sudah secara turun menurun diyakini dan diupacarakan. Bagi mereka, masuk ke agama Hindu, Kristen, atau Katolik, hanyalah untuk mempermudah pengurusan administrasi sebagai warga negara (seperti : pengisian KTP, identitas lain, serta cari kerja). Kecuali yang masuk ke agam Islam. Namun demikian, karena kedekatan teologisnya dengan Hindu yang cenderung "pilteistik", maka sebagian besar peyakin Kaharingan masuk ke Hindu. Wawancara dengan sejumlah tokoh Kaharingan dan diskusi dengan Drs. I.Wayan Karya, M.Pd, dkk., peneliti "*Upacara Ritual Perkawinan Menurut Tata Cara Agama Hindu Kaharingan Di Dusun Hurung Pukung, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah*", Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Palangka Raya, 2004.

Tabel 1
Penduduk Pemeluk Agama Kalimantan Tengah
Tahun 2005

N0.	KAB./KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	TOTAL
1	Kotawaringin Barat	180.002	10.138	3.486	7.599	345	
2	Kotawaringin Timur	263.822	16.311	12.175	20.876	1.798	
3	Kapuas	286.621	55.649	2.471	35.188	264	
4	Barito Selatan	78.468	26.129	9.684	6.837	23	
5	Barito Utara	84.548	10.152	5.926	16.983	78	
6	Barito Timur	37.207	25.312	12.422	9.168	252	
7	Lamandau	24.469	15.075	3.321	604	7	
8	Seruyan	92.427	26.645	627	7.916	61	
9	Katingan	74.929	15,.797	1.621	32.628	54	
10	Pulang Pisau	89.455	17.208	1.520	6.049	113	
11	Gunung Mas	13.971	44.276	806	24.334	8	
12	Sukamara	24.538	1.329	582	6.737	231	
13	Murung Raya	58.685	8.383	5.436	22.868	43	
14	Palangka Raya	96.626	63.165	7.908	7.116	2.282	
	JUMLAH	**1.420.581**	**311.569**	**68.005**	**210.403**	**5.559**	**2.016.117**

Sumber : Laporan ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Buddha yang direkap.

Adapun jumlah rumah ibadat sebagai sarana keagamaan masing-masing agama serta tingkat perkembangannya pada beberapa tahun terakhir di Kalteng, dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2
Pemeluk Agama dan Rumah Ibadat
Kalimantan tengah, 2004

NO	AGAMA	PEMELUK	R.IBADAT	KETERANGAN
1	Islam	1.420.581	3.160	Masjid 1280,Mshala 174,Langgar 1706
2	Kristen	311.569	900	Grj.Permanen 46,Semi 563, Drurat 291
3	Katolik	68.005	287	Gereja 19, Kapel 100, Darurat 86
4	Hindu	210.403	527	Pura/Kuil 284, dan Sanggah 243
5	Buddha	5.559	36	Vihara 9, Cetya 3, Kelenteng 24
	JUMLAH	2. 016.117	4.910	

Sumber : *Ditjen-ditjen Departemen Agama, 2004*

Organisasi Sosial-Keagamaan

Terdapat sejumlah organisasi/lembaga sosial-keagamaan di Kalimantan Tengah yang masih menunjukkan keaktifannya dalam menjalankan program-programnya sesuai misi dan visi organisasinya. Diantaranya dalah : Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat NU, Ikatan Putra Nahdlatyul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Pemuda Ansor,

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Remaja Mesjid, Nasyiatul Aisyiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muslim Indonesia (PMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI), Al Hidayah, Wanita Tarbiyah, Pemuda Islam, Hizbut Tahrir, Muda-Mudi Katolik (MUDIKA), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), LPTQ, Majelis dakwah Indonesia (MDI), Tariqot Al Mu'tabarah, Dewan Masjid Indonesia, MUI, BKPRMI, Badan Agama Kaharingan di Indonesia (BAKDI).

Secara khusus, organisasi sosial-keagamaan yang mewadahi umat Kristen adalah PGI (HKBP, GKE, dan GPIB), Persdekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) yang terdiri dari Gereja Pantekosta Indonesia (GPI), Pantekosta Berhabel, Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Bethel Berhabel (GBB), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), dan Gereja Utusan Pantekosta; serta Persatuan Injil Indonesia (PII) yang mengorganisir Gereja Baitani, Gereja Gedeon, Gereja Kemah Injil Indonesia, Gereja Baptis, Gereja Terang Kristus, Gereja Kristen Sejati, dan gereja Advent.

Bagi agama Katolik, kegiatan keagamaan diwadahi oleh Keuskupan Palangka Raya yan terdiri atas Organisasi Paroki, Dekenat, dan Stasi. Paroki membawahi lima Dekenat, yaitu Dekenat Palangka raya, Dekenat Kapuas, Dekenat Barito Selatan, Dekenat Barito Utara dan Korawaringin Barat. Dekenat membawahi Stasi.

Bagi umat Hindu, terdapat organisasi yang mewadahi kegiatan/program keagamaan mereka. Diantaranya, adalah Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan yang memiliki jaringan mulai dari Majelis Pusat di Propinsi, Majelis Daerah di Kabupaten/Kota, Majelis Resort di Kecamatan, dan Majelis Kelompok di tingkat Desa.

Organisasi-organisasi atau lembaga sosial-keagamaan tersebut, disamping memfasilitasi kegiatan keagamaan pada masing-masing anggotanya, juga sebagian besar terlibat dalam program-program pemberdayaan umat dalam beberapa aspeknya, seperti : pengumpulan dana bantuan bagi pengentasan kemiskinan, pengembangan pendidikan, dan kegiatan "*community development*" lainnya.

Bagi masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama, misalnya, banyak organisasi/lembaga sosial keagamaan yang membangun atau menyelenggarakan pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Dalam hal ini, tak kurang dari 56 Pondok Pesantren tumbuh-berkembang yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu 10 buah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 15 buah di Kotawaringin Timur, 12 buah di Kapuas, 2 buah di Barito Selatan, 4 buah di Barito Utara, 11 buah di Kota Palangka raya serta di Kabupaten Seruyan dan katingan masing-masing sebuah.[43] Sesuai visi dan misinya,

---

[43] Pondok pesantren di Kotawaringin Barat yaitu : PP.Nurul Anwar, PP. Al-Huda, PP.Nurul Hasanah, PP.Nurul Iman, PP.Miftahul Ulum, PP. Al-Karomah, PP.Ar Raudloh, PP. Ar- Rahman, PP.Al Mansur, dan PP. Dzatissudur. Di Kotawaringin Timur : PP.Abnaul Amin, PP.Nurul Islam, PP.Sabilal Muhtadin, PP. Tahfidzul Qur'an

yakni membentuk manusia beriman dan bertaqwa, bagi masyarakat Kalteng berdirinya pondok pesantren dinilai sangat konstruktif bagi pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaaan/pedalaman serta berkontribusi sangat besar bagi upaya peredaman konflik—baik konflik berskala besar maupun berskala kecil—yang terjadi di Kalteng umumnya.

Masing-masing umat beragama di Kalteng, memiliki tokoh, sesepuh atau pemimpin yang mereka percayai menjalankan tugasnya. Bagi umat Islam, tokoh agama mereka sebut dengan kyai, ulama, muballigh, *khatib*, ustadz, atau penyuluh agama—baik yang dinobatkan oleh masyarakat pengikutnya atau oleh pemerintah,. Bagi umat Kristen, tokoh mereka disebut pendeta, penginjil atau penyuluh agama. Selanjutnya, sebutan tokoh untuk umat Katolik adalah pastor, bruder, suster, *diakon*, atau juru penerang. Bagi Hindu, mereka menyebut tokohnya *pedande, pemangku, basir UPU*, dan *basir*.

Dr.Iman, PP. Sirajul Munir, PP. Darul Amin, PP. Miftahul Ulum, PP. Nurul Huda, PP. Anak Yatim Putra Borneo, PP. Nur Salafiyah, PP. Nurul Yakin, PP. Nurul Taqwa, PP. Marhamah, PP. Al Fajar, dan PP. Karya pembangunan. Di Kabupaten Kapuas diantaranya adalah : PP. PP. Hidayatullah, PP. Mujahidin, PP. Abnaut Thalibin, PP. Thariqussa'adah, PP. Babusssalam, PP. Darul Hikmah Darussalam,m PP. Nurul Hidayahm, PP. Nahdlatussalam, PP. Nurul Iman, PP. Al Amin, PP. Noorhidayah Darussalam, dan PP. Ibnussalam. Di Kabupaten Barito Selatan : PP. Ahlussunnah Waljamaah dan PP. Darussalam. Di Kabupaten Barito Utara : PP. Nurur Rohmah, PP. Istiqomah, PP. Nurul Hidayah, dan PP. Karya Pembangunan. Di Kota Palngka raya meliputi : PP. Hidayatul Insan, PP. Karya Pembangunan An Nur, PP. Darul Ulum, PP. Raudlotul Jannah, PP. Ulumddin, PP. As Salaam, PP. Hidayatullah, PP. Syifaul Qulub, PP. Miftahul Jannah, PP. Al Jihad, dan PP. Hidayatul Al Muhajirin,. Sementaraq di Di Kabupaten Seruyan PP. As Seruyaniyah., dan Kabupaten Katingan adalah PP. Noor Khair Asem Kumbang. Lihat : *Education Management Information System*, Departemen Agama RI, Tahun 2003-2004.

Sementara, untuk Buddha pemeluknya dipimpin oleh *bikkhu, pendeta*, dan *upaksa*. tokoh mereka sebut. Hindu angkat oleh sebagai pembimbing, pembina, atau penggembala umatnya.

Bagi ummat Islam, mereka memiliki tokoh agama yang disebut sebagai ulama, kyai, muballigh, ustadz, khatib, maupun penyuluh agama. Masing-masing umat beragama di Kalimantan Tengah menjalankan aktivitas keagamaannya sesuai doktrin atau ajaran yang diajarkannya, baik aktivitas peribadatan individual maupun aktivitas kelompok (berjamaah) dalam berbagai aspeknya : pendidikan, dakwah/penginjilan, kesenian, bakti sosial, dsb.

Potensi Konflik dan Rukun

Peristiwa konflik antar etnik yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin, dalam realitasnya, menjadi tragedi historis yang menakutkan bagi masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, dan bagi masyarakat kota Sampit dan Palangka Raya khususnya. Jumlah korban dan modus konflik yang cenderung sadistik dan "*uncivilized*" tampak menjadi pengalaman tersendiri dan pelajaran yang sangat bermakna bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Refleksi, perenungan, dan sikap traumatik masyarakat terhadap peristiwa "barbaristik" yang baru terjadi beberapa tahun lalu, menjadikan semua unsur masyarakat, terutama kelompok-kelompok pelaku konflik, menyadari betapa sebuah konflik berwujud peperangan terbuka secara diametral dengan

pertumpahan darah tak berdosa, dari segi apa pun sangat merugikan semua pihak.

Dalam konflik ini, tidak hanya kehilangan jiwa dan kehancuran infrastruktur yang dalam masyarakat, namun lebih dari itu, "*social-capital*" dan modal integratif lainnya menjadi hancur. Kesadaran sikap masyarakat seperti inilah, yang menyebabkan masyarakat paska-konflik cenderung menjadi lebih hati-hati, lebih mengontrol diri, dan lebih kalkulatif dalam berinteraksi dengan pihakm lainnya. Implikasi berikutnya dari konflik yang terjadi tahun 2001, masyarakat pada dua tahun terakhir ini, mulai menunjukkan sikap untuk kembali membangun atau memperbaiki tata hubungan antar mereka. Masyarakat, dengan kata lain, menghendaki untuk menormalisasi keadaan seperti saat sebelum terjadi konflik.

Masyarakat etnik Madura, mulai kembali ke daerah ini yang sesungguhnya merupakan tanah kelahirannya.[44] Namun, mereka cenderung sangat berhati-hati dalam berkomunikasi dengan kemlompok etnik lainnya. Masyarakat Madura cenderung mengontrol diri dalam berprilaku, tidak seperti saat pra-konflik. Pengalaman pahit dari pembalasan

---

[44] Diinformasikan bahwa warga etnik Madura yang sudah kembali ke Sampit atau daerah sekitar konflik (seperti : Palangka raya, Kapuas) baru dalam jumlah kecil, sekitar 10 % dari seluruh warga Madura yang mengungsi atau diungsikan. Jumlah ini , pada umumnya, adalah warga Madura pendatang kembali yang merasa atau dipandang masyarakat setempat (termasuk oleh warga etnik Dayak, sebagai musuhnya) sebagai orang baik atau warga yang memperoleh pasangan hidup dengan warga Dayak (sebagai suami atau isteri). Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan.

kelompok etnik lain—dalam hal ini etnik Dayak—menjadi pelajaran berharga untuk rekonsiliasi. Masyarakat Madura merasa perlu merefleksi secara komprehensif atas peristiwa tersebut. Sebaliknya, masyarakat etnik Dayak, dengan kerendahan hati dan tradisi kulturalnya, mereka menerima kembali kehadiran etnik Madura sebagai bagian dari warga besar Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat etnik Dayak, menjadi lebih hati-hati dan waspada dalam berinteraksi dengan mereka Madura.

Berdasarkan realitas sosial di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa hubungan antar etnik dan hubungan interen dan antar umat beragama umumnya di Kalimantan Tengah pada tahun 2005 adalah relatif rukun. Pada tahun terakhir ini, masyarakat Kalimantan Tengah hidup rukun, saling menghormati, dan toleran terhadap perbedaan apapun juga—agama, keyakinan, bahasa, dan multikulturalitas lainnya. Walau tentu saja, masih menyimpan daya ingat ikhwal peristiwa silam yang terjadi. Berdasarkan realitas ini pula, terdapat beberapa hal penting yang potensial menjadi unsur integratif kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Pertama, terdapatnya unsur-unsur nilai budaya masyarakat yang fungsional bagi integrasi masyarakat daerah ini. Kearifan lokal, baik nilai bersumber dari tradisi lokal etnik maupun nilai berasal dari agama *samawy.*

Kedua, peran pemerintah yang memungsikan diri sebagai mediator atau "*problem solver*" dalam konflik yang

terjadi serta penataan kembali kondisi paska-konflik. Melalui serentetan pertemuan dan musyawarah seperti : “Konggres Rakyat Kalimantan Tengah” pada 4-7 Juni 2001 di Palangka Raya, “Musyawarah Rakyat Kotawaringin Timur” di Sampit, pada 18-20 Mei 2001, “Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah”, di Ketapang, Sampang, Madura pada tanggal 22 Agustus 2001, “Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan” pada tanggal 3 Februari 2002 di Malang, Jawa Timur, serta “Rapat Kordinasi Penanganan Pengungsi Kalimantan Tengah, pada 13 September 2002 di Kuala kapuaas serta “Rapat terbatas Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah”, pada tanggal 17 September 2002 di Palangka Raya, pada dasarnya merupakan indikator bagaimana intensitas upaya pemerintah dalam menangani kasus konflik berbasis etnik ini. Selain itu, dalam upaya penguatan tata hubungan antar umat beragama, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk **Forum Komunikasi Antar Umat Beragama** (FKUB) di Kalimantan Tengah, pada 24 Maret 2004.

Ketiga, tumbuhnya kesadaran universal tentang kepemelukan pada suatu agama. Sebagai dampak globalisasi, masyarakat, terutama para tokoh agama semakin menyadari bahwa beragama merupakan persoalan pribadi yang sangat asasiah. Pilihan atas agama yang diyakini merupakan hal yang tidak bisa diganggu-gugat siapa pun.

Keempat, peran tokoh agama. Dalam situasi konflik, para tokoh agama, menyadari bahwa perlu peran aktif dari para tokoh agama untuk membatasi konflik agar tidak

melebar baik secara geografis, kultural maupun agama. Dalam hal ini, para tokoh agama (=Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kaharingan) secara aktif meredam, mengontrol, dan menghimbau komunitas/jamaahnya untuk tidak mempertajam konflik.[45] Demikian pula, dalam membangun kembali kerukunan, tokoh agama juga sangat besar perananya. Sebagai contoh, saat terdengar isyu "negatif" pada paska Pilkada tahun 2005, yang mengarah pada disintegrasi umat beragama, maka MUI menyerukan himbauannya kepada kaum Muslimin dan masyarakat Kotawaringin untuk (1) menyikapi secara bijaksana segala permasalahan yang berkembang serta tidak mudah terpancing oleh isyu yang meresahkan dan memecah belah perastuan dan kesatuan, (2) tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan karena pada dasarnya kita semua bersaudara, (3) memelihara keamanan dan ketenteraman di lingkungan masing-masing, dan (4) menyerahkan segala permasalahan yang timbul dalam Pilkada 2005 kepada pihak yang berwenang.[46]

Kasus SARA: Bentuk dan Penyebabnya

Konflik berbasis SARA yang terjadi di Kalimantan Tengah sesungguhnya relatif sangat jarang. Dalam arti bahwa, dilihat dari intensitas atau frekuensi kejadiannya, relatif

---

[45] Wawancara dengan Wilhelmus Y. Ndoa, tokoh Katolik; Drs. Sulman Djungan, tokoh Hindu; Drs. Midday, akademisi; Drs. Abdul Hadi Ridwan, Ketua MUI.

[46] Ditanda-tangani oleh Ketua Umum (KH. Abdul Hadi Ridwan) dan Sekretaris Umum (Drs. HM. Fauzan Nurdin Azis, MM), pada tanggal 5 Juli 2005..

rendah jika dibanding dengan peristiwa yang terjadi di daerah propinsi lain. Apalagi bentuk konflik berbasis agama, dalam kenyataannya, belum pernah terjadi di daerah ini. Konflik yang meletus pada tanggal 17-18 Februari 2001, yang dimulai sejak pukul 00.00 hari Minggu, pada dasarnya merupakan konflik antar etnik (yaitu antara masyarakat Madura, etnik pendatang di Kalimantan Tengah di satu pihak, dengan masyarakat Dayak, etnik asli Kalimantan Tengah). Meletusnya konflik antar kedua etnik tersebut, cenderung disebabkan oleh faktor akumulatif peristiwa perlakuan kriminal yang dilakukan oleh etnik Madura terhadap etnik Dayak.

Berdasarkan "Daftar Kronologis Terjadinya Tindakan Kekerasan/Kejahatan Etnik Madura terhadap Etnik Dayak Warga Kalimantan Tengah" desebutkan serentetan peristiwa yang secara akumulatif menyebabkan meletusnya peristiwa konflik terbuka di beberapa kota Kalimantan Tengah (Sampit, Pangkalan Bun, Kuala kapuas, Barito) yang berakibat hilangnya sejumlah besar warganya. Diantaranya adalah peristiwa-peristiwa berikut ini.

1. Pemerkosaan terhadap seorang gadis Dayak, pada tahun 1982 di Palangka Raya. Peristiwa ini diselesaikan melalui upaya perdamaian menurut hukum adat;
2. Peristiwa pembunuhan terhadap warga etnik Dayak pada tahun 1982. Tidak ada penyelesaian, karena tidak terungkap pelakunya;

3. Pembunuhan terhadap warga Dayak, pada tahun 1983 di Bukit Batu, Kasongan. Seorang dayak dikeroyok oleh 30 orang Madura.
4. Penyelesaian dilakukan melalui perdamaian dan perjanjian untuk keluar dari Kalimantan Tengah bila tindakan serupa terulang lagi;
5. Pemerkosaan dan pembunuhan sadis seorang gadis Dayak oleh seorang Madura di Palangka Raya, pada tahun 1996. Penyelesaiannya dilakukan secara hukum namun sangat ringan hukumannya.
6. Perkelahian tak seimbang antara warga Dayak dikeroyok oleh etnik Madura, di Palangka Raya, pada tahun 1996. Seorang warga Dayak tewas, namun pelakuknya kabur dan tidak jelas proses hukumnya;
7. Pengeroyokan dua warga Dayak oleh 40 orang etnik Madura, di desa Karang Langit, Barito Selatan,pada tahyun 1996. Pengeroyok (40 orang Madura) tewas semua. Kedua warga Dayak dihukum berat, pada hal membela diri;
8. Pembunuhan secara sadis oleh tukang sate Madura terhadap seorang anak laki-laki Dayak di Tumbang samba (tewas dengan 30 tusukan), pada tahun 1997;
9. Pengeroyokan oleh 4 orang Madura terhadap seorang Dayak di Palangka Raya, pada tahun 1998. Pengeroyok melarikan diri, sehingga tidak ada penyelesaian hukum;

10. Penganiayaan/pembacokan seorang petugas keamanan (Tibum—petugas Ketertiban Umum) beretnik Dayak oleh seorang warga Madura., di Palangka Raya pada tahun 1999. Setelah sehari ditahan, pelakunya dilepas.
11. Pembantaian terhadap sekeluarga Dayak oleh orang etnik Madura, di Pangkut Kotawaringin Barat, pada tahun 2000. Pelakunya lari tanpa penyelesaian hukum;
12. Pada tahun 2001, di Sampit (17 Februari 2001) warga Dayak dibantai oleh Etnik Madura. . Warga Dayak banyak mati terbunuh. Peristiwa inilah yang memicu perlawanan oleh Dayak yang berakibat warga Etnik Madura banyak yang tewas terbunuh.

Peristiwa konflik terbuka antara warga masyarakat Etnik Madura dan Dayak di Sampit Kotawaringin Timur yang merembet ke daerah sekitarnya (Palangka Raya, Kuala kapuas, Barito Barat, dsb.) dipicu oleh tindak kerusuhan oleh masyarakat Etnik Madura. Berawal dari minggu malam, tanggal 18 Februari 2001, orang Madura bertindak brutal dengan menyerang, membunuh, membakar hidup-hidup di dalam keluarga Dayak (menewaskan 24 warga Dayak). Sambil sorak-sorai, mereka berarak-arakan menyatakan kemenangannya atas etnik Dayak melewati Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Usman, dan Jl. Iskandar, sembari melontarkan yel-yel "Mana orang Dayak "? "Mana Panglima Perang Dayak "? Dan mengusung spanduk bertuliskan "Kota Sampit, Sampang

Kedua", "Selamat Datang di Kota Madura" dan "Kota Sampit, Serambi Mekkah",[47]

Sejak peristiwa Sampit tersebut, yang berakibat diungsikannya warga Madura, suasana kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di kota-kota konflik, menjadi terkendali dan semakin kondusif terbangunnya geliat dinamika kehidupan yang relatif jauh lebih aman. Penuturan para tokoh masyarakat, warga biasa maupun aparat keamanan, sejak petristiwa Sampit tingkat kejahatan menurun drastis hingga ke tingkat "nol atau nihil". Meskipun demikian, apa pun bentuk warna suasana kehidupan di Kalimantan Tengah, "kewaspadaan akan munculnya konflik baru harus tetap ditingkatkan", demikian Kyai Haji Abdul Hadi Ridwan, ketua MUI Kabupaten Kotawaringin menghimbau umatnya.

Penutup

Kesimpulan.

Berdasarkan temuan di atas, berikut ini dipaparkan beberasa kesimpulan pokok.

Pertama, kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Kalimantan tengah, terutama konflik yang terjadi di Sampit dan kota sekitarnya bukan merupakan bentuk konflik agama (*religiously based-conflict*). Namun, peristiwa konflikm yang

---

[47] Laporan Tim Investigasi LMMDD-KT, tertanda Ketua Presidium dan Sekretaris.

terjadi merupakan konflik berbasis etnik (*ethnic based-conflict*) antara etnik Dayak dengan etnik Madura.

Kedua, faktor penyebab konflik "Sampit" yang meletus pada tanggal 18-20 Februari 2001, cenderung disdebabkan oleh faktor psikologis berupa dendam masyarakat etnik Dayak atas perlakukan etnik Madura yang dinilainya tidak manusiawi dan sangat sadistik melalui perlakuan tindak pembunuhan, pemerkosaan, dan tindak kruiminal lainnya. Selain itu, juga disebabkan oleh perasaan tidak respek terhadap aparat keamaaan yang cenderung bersikap tidak adil dalam menengahi/menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan etnik dayak.

Ketiga, kondisi terakhir paska konflik di Kalimantan Tengah umumnya, cukup kondusif. Faktor-faktor psikologis, seperti perasaan sudah terbalaskan dendamnya, perasaan aman karena ditinggal (mengungsi) oleh etnik Madura, serta trauma akan akibat konflik yang terjadi, merupakan faktor penyebab terbentuknya suasana kondusif pada masa paska konflik. Disamping, faktor intensitas perhatian pemerintah dalam penanggulangan konflik di daerah ini.

Implikasi

Peristiwa konflik "Sampit" yang petrnah terjadi pada beberapa tahun lalu, secara sosio-psikologis, berimplikasi pada tumbuhnya sikap atau perasaan traumatik yang mendalam pada kedua belah pihak yang berseteru khususnya

dan pada masyarakat Kalimantan Tengah umumnya. Perasaan atau sikap seperti ini, walau dalam beberapa tahun mungkin sekali dapat dikontrol oleh berbagai pihak (yaitu pihak yang berkonflik, pihak pemerintah dan masyarakat umumnya), namun dalam rentang waktu panjang dapat tumbuh kembali sebagai bentuk pembalasan dendam etniknya. Untuk itulah, upaya pengontrolan dan pembinaan secara serius, intensif dan ekstensif serta komprehensif perlu dilakukan oleh semua pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan temuan dan analisis implikasi atas realitas yang berkembang, berikut ini dipaparkan beberapa saran.

Pertama, perlu pemerintah melakukan pembinaan melalui program sosialisasi, pengarahan, pembimbingan, atau pengontrolan terhadap masyarakat luas (terutama terhadap etnik-etnik yang berseteru) untuk menciptakan perdamaian, kerukunan, dan keamanan bersama agar tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, dan sejahtera. Untuk ini, pemeranan secara optimal terhadap tokoh agama, tokoh etnik, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah harus dilakukan. Dalam kaitan ini pula, program penyadaran multi-kultural perlu mendapat prioritas.

Kedua, perlu upaya penanggulangan paska konflik secara tepat dan bijak. Pihak yang berkonflik perlu beritikad

baik untuk ishlah atau damai serta melupakan peristiwa lalu tanpa memperhitungkan secara kalkulatif untung-ruginya dalam peristiwa tersebut. Pihak yang berkonflik perlu meningkatkan sikap introspeksi atas peristiwa tersebut, sehingga tidak akan mengulangi kembali. Kemudian, Pemerintah, dalam hal ini, harus adil dan proporsional dalam menegakkan aturan yang diberlakukan.

Ketiga, perlu pengembangan nilai-nilai kearifan budaya lokal, terutama nilai yang fungsional bagi terbentuknya integrasi sosial dalam berbagai aspeknya.(**CFY**)

Pustaka Rujukan

Ahsanul Khalikin, *Agama Kaharingan : Kepercayaan Masyarakat Dayak Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur*., Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, Jakarta, 2002.

BPS Daerah Kalimantan Tengah,[1]*Kalimantan Tengah Dalam Angka 1999*, , 2000.

Departemen Agama RI,*Education Management Information System*, Tahun 2003-2004.

I.Wayan Karya, M.Pd, dkk., *Upacara Ritual Perkawinan Menurut Tata Cara Agama Hindu Kaharingan Di Dusun Hurung Pukung, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas,*

Kalimantan Tengah, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Palangka Raya, 2004.

Kustini, *Kaharingan : Studi Kasus Agama di Desa Warukin , Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan*, Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, Jakarta, 2002.

Nuchrison, *Penelitian Agama Kaharingan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,* Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002.

Laporan Tim Investigasi LMMDD-KT, tertanda Ketua Presidium dan Sekretaris.

(V)

JAWA TENGAH

Kondisi Umum Wilayah

Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 daerah tingkat dua, kota dan kabupaten, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2001, dihuni oleh sebanyak 31,06 juta jiwa, atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menempatkan Jawa Tengah sebagai propinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada umumnya

penduduk menumpuk di daerah perkotaan, belum tersebar secara merata di seluruh wilayah. Secara rata-rata, kepadatan penduduk propinsi ini tercatat sebanyak 954 jiwa setiap kilometer persegi, dan Kota Surakarta merupakan wilayah paling padat dengan rata-rata sekitar 11 ribu penduduk setiap kilometer persegi.

Dari sisi ketenaga kerjaan, pada tahun 2001 tercatat sebanyak 15,64 juta orang angkatan kerja di Jawa Tengah, berarti tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61,61 persen, dengan angka pengangguran terbuka sebesar lebih kurang 3,70 persen. Sebagian besar yakni sekitar 70 persen dari angkatan kerja secara keseluruhan di Jawa Tengah berpendidikan tidak atau belum berijasah Sekolah Dasar. Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menampung tenaga kerja. Tercatat sekitar 45 persen pekerja berkiprah di sektor ini sebagai andalan hidupnya. Sementara ditilik dari sudut status pekerjaan utamanya, sebesar 38,62 persen berstatus sebagai buruh atau karyawan. Sisanya selaku pekerja keluarga 20,49 persen, usaha sendiri 14,39 persen, dan sebagai pekerja tidak tetap sebanyak sekitar 26,50 persen. Besarnya prosentase tenaga kerja memasuki sektor pertanian, sejalan dengan tingkat pendidikannya yang rendah karena sektor ini tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang khusus. Selain pertanian, perdagangan dan industri merupakan sektor-sektor yang cukup banyak menampung tenaga kerja masing-masing sebesar 18,76 persen dan 16,24 persen.

Sosial Ekonomi

Selintas tentang kehidupan ekonomi, krisis yang bertubi-tubi melanda Indonesia tahun 1997, berdampak meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 1998 tercatat sebanyak 6,4 juta atau sekitar 21,61 persen penduduk miskin. Angka tersebut meningkat menjadi 8,8 juta atau sekitar 28,46 persen dari total penduduk Jawa tengah pada tahun 1999. pada tahun 2001 tercatat jumlah keluarga pra-sejahtera sebanyak 39,28 persen dari total keluarga. Sedangkan keluarga sejahtera satu sebesar 19,72 persen, sejahtera dua 20,38 persen, sejahtera tiga 17,16 persen dan sejahtera tiga plus hanyak sejumlah 3,56 persen[48].

Rendahnya tingkat pendidikan dan kehidupan ekonomi, teristimewa banyaknya penduduk yang hidup berada di bawah garis kemiskinan seperti digambarkan di atas, tentu saja sengat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya secara keseluruhan dalam bermasyarakat, bernegara maupun dalam kehidupan beragama. Tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan yang mendera masyarakat setempat, sangat menyulitkan mereka menghadapi persaingan yang makin sengit dalam menjalani hidup kesehariannya karena tidak memiliki akses ke sumber-sumber daya sosial, ekonomi, politik yang dapat menopang suatu bentuk kehidupan yang layak. Pada gilirannya hal tersebut akan memudahkan terjadinya ketimpangan, alienasi dan marginalisasi sosial yang rawan konflik dalam masyarakat setempat.

---

[48] BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2002.

Pengembangan sektor industri, khususnya industri batik di Jawa Tengah, fakta kualitatif menunjukkan menimbulkan dampak pergeseran pemegang kendali ekonomi dari pribumi ke non pribumi (Cina). Selain itu pergeseran kendali ekonomi ini, menyebabkan munculnya kelompok buruh yang berjumlah besar dalam masyarakat, dimana mayoritas mereka adalah warga pribumi, yang tinggal di tempat-tempat pemukiman kumuh di pinggiran kota. Sementara kelompok pengusaha didominasi warga keturunan Cina yang menempati rumah-rumah tempat pemukiman eksklusif perkotaan. Hal ini tentu saja dapat mengundang tampilnya kecemburuan sosial seperti terlihat dalam kasus kerusuhan perusakan pertokoan milik warga keturunan Cina di Pekalongan tanggal 24 Nopember 1995 yang dipicu oleh peristiwa penyobekan Al Qur'an oleh seorang warga etnis Cina[49].

Budaya dan Agama

Mayoritas warga masyarakat jawa tengah, berasal dari etnis Jawa dan menganut keyakinan agama Islam.

Dalam menjalani hidup kesehariannya, mereka menjadikan budaya jawa yang dipadukan dengan ajaran islam yang berbasis pondok pesantren sebagai kerangka acuan yang mengatur tatanan dalam cara-cara berprilaku dan merespon berbagai persoalan yang mereka hadapi. Selaku masyarakat

---

[49] Universitas Gajah Mada dan Departemen Agama, Prilaku Kekerasan Kolektif, 1997.

yang secara kultural berbasis budaya Jawa yang masih kental dan Islami, etika moral, prilaku pergaulan bermasyarakat, maupun terkait dengan permasalahan sosial, politik dan sebagainya, cenderung dilihat dari sudut pandang kacamata etika moral agama dengan kyai diperlakukan sebagai panutan utama. Selain menyangkut masalah agama, kyai juga berpengaruh secara luas dalam kehdupan sosial masyarakat. Begitu juga secara politis, peran seorang kyai senantiasa ikut berperan dan tidak jarang mewarnai dalam proses pengambilan kata putus yang penting-penting menyangkut kehidupan sosial masyarakat mengenai pemerintahan, budaya, maupun hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat setempat. Peran kyai dan tokoh agama sangat nampak dalam berbagai kegiatan upacara tradisi lingkaran hidup yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat.

Penentuan hari perkawinan, pendirian dan penempatan rumah baru, prilaku baik buruk, penyelesaian konflik keluarga dan masyarakat, selalu mendengar dan memperhatikan aspirasi kyai dan tokoh agama. Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya juga dikenal sebagai masyarakat yang sanat terbuka, toleran, mudah rukun dan akrab dalam pergaulan, santun, kekeluargaan, tenggang rasa, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Jawa tersebut, besar pula pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok sosial lain yang berasal dari berbagai daerah dan suku pendatang yang senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan

berprilaku yang bisa diterima oleh warga asli Jawa setempat, sehingga tidak banyak terjadi benturan-benturan dan konflik yang berskala besar dan berlangsung lama.

Selain senang belajar agama masyarakat Jawa juga terpengaruh oleh hal-hal yang bernuansa magis seperti kegemaran mencari dan menuntut kesaktian (ngelmu). Para kyai umumnya dipandang masyarakat banyak menyandang kesaktian tersebut. Selain dalam bidang agama para kyai juga dapat menularkan dan menurunkan kesaktian, menyembuhkan berbagai penyakit, memberikan pertolongan dan berkah kepada seseorang. Prilaku masyarakat Jawa yang tradisional yang mempercayai hal-hal yang gaib (supra natural) di luar ajaran agama nampak menonjol pada situasi-situasi tertentu antara lain seperti dalam kegiatan kampanye tahun 1997, khususnya di kalangan massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tindakan massa yang berkeinginan memiliki kesaktian seperti ilmu kekebalan, banyak terpengaruh dan terdorong antara lain oleh perlakuan kasar dan kekerasan aparat keamanan pada masa kampanye. Dengan memiliki ilmu kekebalan itu, kepercayaan diri mereka meningkat dan semakin berani berhadapan dan menentang perlakuan-perlakuan kasar dan keras para aparat yang dipandang arogan dan tidak adil terhadap mereka lantaran memihak kepada kontestan yang didukung pemerintah. Umat Islam Jawa tengah pada umumnya tergabung dalam kelompok Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadyah yang berpusat di Yogyakarta yang tersebar di setiasp daerah. Di lingkungan propinsi Jawa Tengah, tercatat di kantor Wilayah

Departemen Agama setempat sebanyak 1.946 Pndok Pesantren, 3.024 orang kyai, 14.158 Ustadz dan 432.751 orang santri. Sementara tempat ibadah secara keseluruhan meliputi lima agama tercatat sejumlah 125.695 rumah ibadah yang terdiri dari sebanyak 35.199 buah masjid, 87.523 langgar – 1.925 gereja Kristen Protestan – 608 gereja Katolik – 166 Pure Hindu dan sebanyak 274 buah Vihara umat Budha.

Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi personal maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa. Kerukunan hidup umat beragama ini bisa dilihat dari dua sisi yakni kerukunan antar kelompok yang berbeda agama di satu sisi, sementara dari sisi lainnya adalah suasana kerukunan yang terdapat di lingkungan internal suatu kelompok agama tertentu.

Berkenaan dengan kerukunan antar kelompok keagamaan di lingkungan masyarakat propinsi Jawa Tengah saat ini, secara umum relatif baik dalam pengertian tidak nampak benturan-benturan berskala relatif besar dan

melibatkan massa kelompok keagamaan yang dapat mengundang gajolak sosial akibat konflik antar kelompok umat beragama setempat. Namun demikian bukan berarti bahwa di Jawa Tengah sama sekali tidak pernah terjadi konflik atau tidak berpotensi munculnya konflik kelompok keagamaan. Misalnya diakhir tahun 1980-an, pernah terjadi pembakaran rumah ibadah. Protes umat beragama tertentu terhadap penggunaan rumah tinggal yang dipakai sebagai tempat ibadah yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan tentang kerukunan beragama. Dakwah dan penyiaran agama yang menyinggung atau dianggap menodai agama lain. Sosialisasi ajaran keagamaan yang terfokus pada internal kelompok agama masing-masing cenderung berdampak berkembangnya sikap militansi dan eksklusifitas kelompok keagamaan yang rawan konflik dan merugikan upaya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama setempat. Pendidikan agama disekolah dan lembaga pendidikan umumnya yang kurang menyentuh persoalan kerukunan antar kelompok umat beragama dan seterusnya. Akhir-akhir ini juga muncul ke permukaan perbedaan aspirasi, khususnya antara kelompok Muslim di satu pihak dengan kelompok Protestan dan Katolik di pihak lain tentang pengaturan pendirian rumah ibadah.

Sementara mengenai kerukunan internal kelompok agama menurut pejabat Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah terdapat konflik-konflik berskala kecil, namun tidak sampai ke tingkat benturan massal. Konflik tersebut dipicu dan bermula dari perbedaan paham, aliran atau sekte-

sekte keagamaan internal kelompok. Di lingkungan kelompok Islam, terdapat perbedaan paham antara kelompok arus utama (main stream) dengan aspirasi-aspirasi Ahmadiyah, Syiah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ada juga konflik yang menonjol di kalangan Muslim di Jawa Tengah yang dipicu oleh perbedaan aspirasi politik antar para tokoh seagama dan sekelompok. Misalnya konflik kelompok massa sesama NU, antara warga NU yang mendukung aspirasi Golkar dengan massa pendukung Parta Persatuan Pembangunan (PPP) di Pekalongan pada tahun 1997. Demikian juga heboh bentrok massa sesama Muslim yang melibatkan pendukung PKB, PPP dan Golkar menyongsong pemilihan umum tahun 1999 di beberapa daerah seperti di Kabupaten Jepara, Kudus, Demak, Brebes, Pekalongan.

Di lingkungan kelompok Kristen Protestan, bibit-bibit konflik mengemuka akibat perkembangan sekte-sekte dengan masing-masing gerejanya. Tiap gereja (Protestan) mempunyai otonominya sendiri, tidak ada keterkaitan hirarkis organisatoris maupun ikatan ajaran agama dengan gereja lain. Konflik terkait pengelolaan gereja Huria Kristen Batak penyelesaiannya berlarut-larut. Keberadaan organisasi Persatuan Gereja Kristen Indonesia (PGI) tidak mampu menyatukan atau mengikat seluruh organisasi gereja Protestan. Lebih dari separuh organisasi gereja Protestan berada di luar PGI.

Banyaknya sekte-sekte dalam kelompok Protestan dan kebutuhan masing-masing sekte atau gereja sendiri-sendiri tidak seperti masjid yang bisa dipakai semua Muslim –

menimbulkan kesan di kalangan kelompok Muslim bahwa kelompok Protestan sebagai kelompok agama yang egresif dan rada ekskusif dalam urusan pendirian rumah ibadah. Kesan seperti ini tentu saja bisa menimbulkan kesalahpahaman yang rawan konflik.

Menyangkut masalah ini seorang pendeta Kristen menuturkan antara lain di samping kesenjangan sosial ekonomi, kerusuhan bisa juga disulut faktor lain seperti kegiatan penyebaran iman oleh kelompok fundamentalis agama tertentu dan munculnya gereja-gereja baru yang berada di luar PGI yang merekrut jemaat dari gereja lain. Selain itu adanya kelompok jemaat suatu gereja yang terdiri dari sebagian besar berasal dari etnis tertentu non pribumi, juga berperan memunculkan kesan eksklusif etnis yang merenggangkan hubungan sosial antar sesama warga masyarakat, apalagi bila dalam kebaktian digunakan bahasa khusus yang tidak bisa dipahami oleh warga lain.

Selanjunya di kalangan kelompok Katolik, pembinaan kerukunan internal ini relatif lebih solid dan sewaktu-waktu muncul perbedaan, cepat dapat diselesaikan. Hal ini diduga antara lain lantaran di lingkungan kelompok ini hanya mengenal satu sistem gereja dan tidak semua warganya hanya mengenal satu sistem gereja dan tidak semua warganya boleh menafsitkan ajaran agama di luar tokoh-tokoh atau forum tertentu yang memiliki otoritas khusus di bidangnya. Begitu juga di lngkungan kelompok Hindu setempat, jarang terdengar adanya konflik internal, walaupun pernah muncul kasus Sai baba yang sekarang sudah tidak ada lagi.

Sedangkan di kalangan internal umat Budha, nampaknya perbedaan antara Walubi dengan kelompok Sangha sempat berlarut-larut dan sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas. Perselisihan berawal dari soal kepengurusan tingkat pusat yang kemudian berkembang ke tingkat daerah. Perbedaan tersebut muncul ke permukaan misalnya dalam upacara puncak penyelenggaraan Hari Raya Waisak secara nasional. Di satu pihak Walubi yang memusatkan upacara waisak di candi Borobudur dan Mendut, sedangkan kelompok Sangha di tempat lain (Jakarta). Permasalahan lain yang terdapat dalam kelomppok Budha ini yakni adanya kelompok Kong Hu Cu yang selama ini tergabung dalam kelompok Budha mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar mereka diakui sebagai kelompok agama tersendiri, lepas dan terpisah dari kelompok agama Budha.

Potensi Kerukunan dan Konflik

Berkenaan dengan rukun tidaknya dikaitkan dengan suatu wilayah tertentu, tergantung dan terpengaruh oleh kemungkinan banyak faktor berpotensi; baik yang mendukung kerukunan maupun konflik, yang sewaktu-waktu muncul atau hilang. Makin mantap kerukunan di suatu wilaah, konflik makin kecil atau berkurang. Sebaliknya bila frekuensi dan intensitas konflik meningkat, maka kerukunan menurun dan rendah. Rukun dan konflik bukan merupakan suatu yang sifatnya permanen. Senantiasa berubah sesuai

dengan situasi pada saat tertentu. Tidak ada suatu wilayah yang terus menerus rukun maupun terus menerus berkonflik. Apalagi di suatu kawasan yang sangat luas seperti wilayah propinsi Jawa tengah yang meliputi 35 daerah tingkat dua (Kota/Kabupaten) yang majemuk dalam banyak hal seperti suku, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan, ekonomi, latar belakang sosial budaya dan seterusnya.

Sehubungan hal tersebut, tatkala kajian ini dilakukan pada tahun 2005, secara umum kondisi kerukunan di lingkungan masyarakat Jawa Tengah relatif kondusif. Tidak ada konflik atau kerusuhan yang berskala besar dan melibatkan massa dalam jumlah banyak serta menelan korban yang dipandang relatif besar baik berupa harta benda, maupun korban manusia. Kondisi kerukunan yang dianggap relatif kondusif itu menurut sejumlah tokoh pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat ditunjang oleh berbagai faktor antara lain seperti berikut.

Pertama, kearifan budaya lokal jawa, yang terbuka, tepo seliro atau tenggang rasa, mudah akrab, menghindari konflik, santun, suka bercanda, hormat dan patuh pada orang tua dan pemimpin, agamis dan sebagainya masih sangat kental melekat dalam prilaku keseharian pergaulan sosial. Tatanan pergaulan sosial seperti ini berpengaruh dan diikuti oleh warga pendatang, baik dalam komunikasi personal maupun kelompok. Ajaran agama dan besarnya pengaruh tokoh-tokoh masing-masing kelompok keagamaan, dapat difungsikan sebagai faktor pemersatu khususnya sehubungan dengan dan dalam rangka penyelesaian masalah konflik baik

di lingkungan keluarga, antar kelompok, maupun konflik antar kelompok sosial dan keagamaan. Kedua, adanya dialog dan interaksi sosial antar tokoh dan kelompok lintas agama dan latarbelakang budaya yang berbeda melalui berbagai media dan forum komunikasi. Lewat dialog dan interaksi sosial yang intensif, terjadi proses pendekatan untuk lebih saling memahami dan menerima perbedaan antar kelompok agama, sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlunya kebersamaan dan kerjasama untuk kepentingan semua pihak dalam masyarakat. *Ketiga*, adanya sejumlah tokoh yang mempunyai peran ganda dan aktif berada di lingkungan beberapa satuan sosial yang berbeda (*cross cutting affiliations and loyalities*). Kehadiran tokoh-tokoh seperti ini sangat membantu dalam upaya menetralisir suasana bila terjadi konflik. *Keempat*, ikatan kebangsaan dan kesadaran saling ketergantungan setiap warga dan kelompok sosial termasuk kelompok keagamaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan di manapun kita berada.

Selanjutnya berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang dianggap mengandung muatan potensi konflik dalam masyarakat setempat, terkait dengan norma-norma sosial, etika moral, agama, dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat meliputi hal-hal seperti berikut.

Pertama, kesenjangan ekonomi, khususnya makin terdesaknya pengusaha pribumi, meningkatnya angka kemiskinan serta makin merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat setempat dan dominasi pengusaha dan pedagang etnis Cina, seperti dikemukakan sebelumnya, dapat memicu

munculnya konflik dan menyulut kerusuhan sosial sebagaimana pernah terjadi berupa perusakan dan pembakaran pertokoan milik kelompok Cina di Pekalongan, Solo dan tempat lainnya.

Kedua, praktek-praktek KKN dan lemahnya upaya penegakan supremasi hukum berdampak makin menipiskan kepercayaan dan berkurangnya efektifitas pemerintahan. Kondisi sosial kemasyarakatan yang makin keruh, mengundang munculnya banyak protes massa, tindak kekerasan, kriminalitas yang sulit dikendalikan. Pelayanan publik makin buruk dan mahal, makin menambah tekanan dan beban hidup masyarakat yang sudah tak berdaya, memperparah kekeruhan kondisi sosial kemasyarakatan. Ketiga, persaingan politik yang makin sengit memperebutkan sumber-sumber kekuasaan dan sumberdaya ekonomi, sering dilakukan dengan cara-cara yang kurang sehat, menyimpang dari aturan main dan koridor hukum yang sudah digariskan. Penggalangan kelompok massa di jalan raya dan tempat-tempat umum dalam upaya menghimpun dukungan untuk memenangkan persaingan seperti dalam pilkada, pilihan ketua Parpol, menentang kenaikan harga, menuntut perbaikan gajih buruh/karyawan dan sebagainya yang makin meningkat frekuensinya, tidak jarang diiringi dengan prilaku kekerasan dan anarkhis, dapat memancing kerusuhan. Keempat dampak modernisasi penbangunan dan budaya global seperti pergaulan bebas, peredaran obat-obatan terlarang yang makin meluas dan sangat mencemaskan, merupakan rongrongan keutuhan keluarga yang menjadi basis masyarakat,

menyimpang dan merusak norma-norma sosial dan nilai-nilai ajaran agama yang menjadi acuan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan keresahan sosial, terutama di kalangan kelompok masyarakat santri di Jawa tengah. Gejolak sosial akibat budaya global ini, seperti pergaulan bebas banyak ditentang oleh kelompok santri termasuk oleh para kyai dan tokoh agama lainnya, sehingga menambah runyam dan kompleksitas persoalan serta mempertajam konflik. Kerusakan dan gangguan terhadap tatanan moral serta keutuhan keluarga dan masyarakat setempat meningkatkan labilitas sosial yang mengundang munculnya suasana rawan konflik.

Bentuk Konflik

Sejumlah konflik yang pernah muncul di wilayah propinsi Jawa Tengah yang tergolong relatif besar, melibatkan massa, menimbulkan korban harta yang tidak sedikit, mendapat perhatian banyak kalangan dan liputan media massa secara luas dan menjadi issu nasional antara lain seperti kasus pelecehan Al Qur'an bulan Nopember 1995 – Bentrok massa pendukung Golkar dan PPP tahun 1997 an yang kedua-duanya terjadi di Pekalongan. Selain itu juga pernah mencuat ke permukaan kasus bentrokan massa akibat persaingan politik menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 di beberapa derah yang melibatkan kelompok massa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan kelompok massa pendukung Partai Persatuan pembangunan

(PPP). Di samping tiga kasus ini masih ada beberapa kasus lain yang relatif kecil dan tidak menjadi isu nasional seperti konflik-konflik internal kelompok keagamaan yang sekilas telah disinggung di atas.

Pelecehan Kitab Suci

Kasus yang berlatar belakang SARA ini awalnya berasal dari peristiwa penyobekan Al Qur'an oleh seorang warga keturunan Cina pada tanggal 24 Nopember 1995 di kota Pekalongan pagi hari. Sehabis shalat Jum'at siang hari 26 Nopember 995 ratusan jamaah terus bergerak turun ke jalan-jalan dan merusak toko milik warga Cina yang menjadi tempat tinggal (Ruko)keluarga penyobek Al Qur'an. Massa terus bergerak dan kerusuhan merembet ke seluruh kota Pekalongan. Toko-toko terpaksa tutup dengan tempelan tulisan di depan pintu antara lain "Milik orang Pribumi Asli" dan sebagainya. Aksi perusakan toko dan barang dagangannya, tidak diiringi dengan pembakaran karena beberapa rumah di samping pertokoan merupakan tempat tinggal warga asli setempat.

Sehubungan dengan kasus ini dilaporkan wartawan GATRA (2-12-1995) seperti berikut. Kerusuhan berlatar belakang SARAini bermula dari Yoe Sing Yeng 24 tahun pedagang kelontong di jalan Hayam Wuruk - Kampung Pekauman, Pekalongan yang kedapatan merobek Al Qur'an. Padahal Yoe penderita gangguan jiwa kambuhan (schizofrenia paranoid) yang baru pulang dari Rumah Sakit Jiwa Pusat

Magelang setelah menjalani perawatan intensif selama 4 tahun. Tetapi isu berkembang cepat, menjadi lebih seru dan banyak bumbu-bumbunya. Akibatnya fatal, aksi kerusuhan pecah. Ratusan massa dari berbagai kecamatan mengalir tumplek menuju satu arah jalan Hayam Wuruk. Seorang diantaranya mengatakan, mulanya mereka hanya ingin melihat langsung wajah Yoe Sing Yeng. Tapi kemudian setelah massa kumpul, berubah menjadi aksi perusakan dan kerusuhan. Aparat keamanan yang sudah siap dari awal dan memblokir jalan Hayam Wuruk, tidak berhasil menahan laju barisan pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa melempari toko sambil menyebut takbir. Kerusuhan terus berlanjut hampir empat jam. Tak kurang dari 75 toko milik pedagang nonpri disepanjang jalan-jalan Hayam Wuruk, Cipto, Sudirman, Wahidin, K.H. Mansyur, merdeka dan sultan agung hancur berantakan. Dua mobil dan sejumlah sepeda motor yang diparkir dijalan ringsek. Tak berhenti disitu, seperti air mengucur dari dam terbuka, massa terus bergerak meluas hingga ke luar kota Pekalongan. Pabrik tekstil lokatek dirusak dan sebuah bus milik perusahaan itu dibakar. Pabrik tekstil Kismatik juga dijadikan sasaran. Sejumlah bom Molotov yang siap dengan hulu ledaknya ditemukan. Karena itu aparat keamanan dibantu satuan Batalyon 407 Padmakusuma dari Tegal terus berupaya optimal, sejumlah jalan diblokade. Muspida bekerjasama dengan ormas-ormas islam dan para ulama menghimbau agar masyarakat tenang serta menjaga persatuan dan kesatuan[50].

---

[50] GATRA, Desember, 1995

Mengenai peristiwa ini seorang tokoh agama setempat berkomentar antara lain : masalah itu merupakan pelecehan agama tetapi seharusnya pelaku saja yang dituntut, jangan merembet kemana-mana. Ketika saya ikut memberikan penjelasan dan coba menerangkan massa dengan pihak Muspida di masjid, massa sudah beringas dan mengajukan berbagai tuntutan. Malah saya dituding lemah.

Amuk Massa Politik

- Berawal dari rencana pengajian Golkar di Pondok Pesantren Buaran dengan mendatangkan mbak Tutut, Zaenuddin MZ dan Rhoma Irama pada tanggal 26 Maret 1997, berbarengan dengan acara Halakah Ulama PPP se-Jawa Tengah yang mengambil lokasi hanya beberapa ratus meter dari panggung pengajian Golkar. Kenapa waktunya bersamaan, mungkin itu membuat warga jengkel. Mereka merasa tertantang dengan adanya panggung pengajian Golkar di lokasi mereka. Daerah Buaran secara politis memnag merupakan dan dikenal sebagai basis PPP. Warga setempat yang konon merupakan fans Rhoma Irama dan Zaenuddin MZ yang sebelumnya jurkam PPP, menjadi kecewa dan marah kepada keduanya karena menyeberang ke Golkar dan datang bersama-sama Tutut.
- Antara Golkar dan PPP terjadi persaingan ketat di Pekalongan. Dalam pemilu tahun 1992 PPP berhasil menghimpun suara 66%. Sementara Golkar hanya 21%

suara dan PDI 13%. Oleh karena itu jajaran Golkar berusaha dengan gigih untuk memenangkan pemilu 1997 antara lain dengan merekrut sosok tokoh-tokoh popular yang banyak pendukung seperti Zaenuddin dan Rhoma irama dengan harapan bisa mendongkrak perolehan suara. Isu Golkarnisasi berkembang ke mana-mana antara lain lewat pengajian-pengajian. Di tengah situasi yang sensitive itu ditambah dengan upaya kuningisasi secara luas di jawa Tengah yang banyak diprotes oleh kalangan di luar golkar. Kegiatan kelompok-kelompok pengajian yang merupakan media konsolidasi pembenaran keagamaan, berubah warna menjadi pengajian politik. Dalam pengajian tersebut sering dilemparkan pernyataan-pernyataan keras, saling mengejek, saling menjelekkan dan saling menuding macam-macam. Lontaran-lontaran pernyataan menuding pemerintah tidak adil, memihak, korup dan sebagainya sering mencuat dalam ceramah-ceramah khususnya oleh sebagian okoh yang dipandang beraliran keras dan vokal serta mempunyai kharisma. Tokoh-tokoh agama kharismatik setempat sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menentukan sikap yang dianggap penting, termasuk dalam sikap berpolitik. Suasana persaingan politik antara Golkar dan PPP ini, makin memanas tatkala Golkar merencanakan dakwah di pesantren Buaran tanpa diduga sebelumnya, kemudian bergulir menjadi kerusuhan diawali dengan aksi perusakan dan pembakaran panggung dakwah Golkar. Soalnya pada waktu bersamaan juga berlangsung

pengajian konsolidasi kelompok PPP di Banyu Uri yang jaraknya ratusan meter dari lokasi dakwah Golkar, dihadiri ribuan pengunjung hingga meluber sampai ke jalan raya Buaran. Di sisi lain jumlah aparat diperbanyak untuk mengamankan panggung dakwah Golkar. Menurut laporan majalah Ummat No.21 tahun 1997, tengah malam, ketika pengajian bubar, massa mulai mendekati panggung Golkar. Kemudian sebagian massa merusak kantor BRI tak jauh dari panggung. Tembakan peringatan dilakukan aparat, namun massa terus bergulir ke utara dan merusak toko-toko, mengeluarkan barang-barang dan dibakar di tengah jalan. Kerusakan merambah kewilayah selatan, massa menjarah kios-kios, membakar mobil milik nonpri, membalikkan truk sampai dijalanan. Siangnya bergerak ke utara membakar kendaraan yang mengangkut batik dan beberapa sepeda motor. Hal tersebut menghalangi jalan rombongan mbak Tutut, sehingga batal menghadiri dakwah. Situasi menjadi reda setelah dilakukan tindak pengamanan oleh sejumlah aparat dan didatangi Pangdam Diponegoro.

- Berbagai komentar berkenaan dengan kasus kerusuhan terjadi antara lain sebagai berikut : KSAD Hartono menyatakan kerusuhan terjadi lantaran sikap emosional massa sehingga nalar tak bisa digunakan. Kapuspen ABRI Slamet Supriadi mengganggap kasus ini tidak ada kaitannya dengan salah satu kontestan pemilu. Pelakunya sekelompok anak muda yang tidak bertanggungjawab tanpa tujuan yang jelas. Sementara ketua PPP Buya Ismail

Materium sangat menyesalkan peristiwa itu. Kejadian itu merupakan spontanitas massa yang marah. Ditengah kemarahan, pihak lain masuk dan memanfaatkan situasi. Para perusuh bukan hanya pendukung PPP, tapi dari semua OPP. Namun dalam pandangan Gus Dur kerusuhan itu terjadi lantaran adanya agitasi sebelumnya. Emosi massa dibakar oleh muballiq-muballiq gombal (laporan SCTV). Merka takut popularitasnya turun, maka menyerang Zainuddin MZ dan Rhoma Irama serta OPP lain. Akibat kerusuhan, setidaknya empat korban tertembak termasuk bocah 16 tahun, sejumlah toko dan kendaraan terbakar atau rusak, serta sebanyak 20 orang ditahan.

- Amuk kelompok massa pendukung OPP yang bernuansa agama seperti di Pekalongan, kembali muncul pada tahun 1999 menyongsong pemilu. Massa yang terlibat pada umumnya juga berasal dari kalangan NU yang mendukung kontestan berbeda yakni PKB dan PPP. Amuk massa tidak hanya terbatas di Pekalongan tapi meluas ke beberapa daerah tingkat dua lainnya seperti Tegal, Brebes, Jepara, Kudus dan Demak. Kerusuhan itu juga memakan banyak korban termasuk korban jiwa yang dipicu oleh persaingan politik antar pendukung politik masing-masing, pendukung kontestan pemilu seperti PKB, PPP maupun Golkar. Sejumlah konflik sosial lain juga tak luput dan sesekali muncul di Jawa Tengah, namun relatif kecil dan tidak sampai berkembang menjadi kerusuhan yang luas seperti persoalan tempat ibadah,

perkelahian kelompok kawula muda, perselisihan kelompok internal keagamaan dan sebagainya. Namun demikian dalam perkembangan terakhir ini walaupun masih relatif rukun, ada sejumlah persoalan yang perlu dicermati lebih seksama dan mendapat perhatian semua pihak terutama dari pemerintah dan para elit politik terkait dengan persoalan-persoalan seperti Pilkada dan isu-isu tentang terorisme. Komentar-komentar yang berbeda-beda yang dapat menggiring masyarakat terkooptasi dalam paradigma "Pro-Kontra", hendaknya dibatasi dan dilakukan lebih hati-hati dan arif. Para elit politik, pejabat dan media massa hendaknya lebih menahan diri untuk tidak mempublikasikan secara gampangan dan sembarangan isu-isu yang dapat mengundang kerawanan sosial yang akan merusak kerukunan dan merugikan semua pihak. Apalagi di tengah kondisi sosial masyarakat sekarang ini yang terjepit dan terhimpit oleh dasyatnya belitan hidup, khususnya kesulitan ekonomi akibat krisis yang bertubi-tubi dan berkepanjangan yang melanda sebagian besar masyarakat.

Penyebab Konflik

Berbagai keterbatasan yang dihadapi seperti minimnya data pendukung, singkatnya waktu, terbatasnya kemampuan, tenaga serta fasilitas yang tersedia, tidak memungkinkan menggambarkan secara lebih jelas dan rinci mengenai

kerumitan hubungan antar variable yang saling berkaitan. Aapa yang bisa dilakukan dalam upaya mencari akar permasalahan, terbatas pada penelusuran terhadap sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai konflik sosial yang berbeda atas dasar “sentimen utama mobilisasi konflik” yakni sentimen yang dipandang digunakan untuk menarik minat dan sentimen massa atau mengarahkan energi emosional massa sehingga mendukung kompleksitas konflik. Beberapa aspek yang dianggap berpengaruh dan menjadi penyebab kerusuhan di Jawa tengah seperti yang dipaparkan sebelumnya antara lain meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut.

Kesenjangan Politik dan Ekonomi

Dalam kehidupan politik di hampir setiap negara modern, baik yang bercorak demokratis maupun totalitas kehadiran partai politik tidak mungkin dihindarkan. Dalam negara demokratis, Partai Politik digunakan sebagai sarana untuk menjaring dan mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menentukan tokoh-tokoh yang akan ditampilkan selaku pemimpin. Sementara di negara-negara totaliter partai politik didirikan oleh elit politik dengan pertimbangan bahwa raykat perlu dibina agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan[5]. Dalam konteks Indonesia di zaman pemerintahan Orde Baru digambarkan oleh Afan Gaffar dan Riswandha bahwa sistem kepartaian kita bercorak sistem kepartaian hegemonik. Partai

[5] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1996

hegemonik tak akan membiarkan adanya persaingan sehat dalam memperebutkan kekuasaan baik yang bercorak formal maupun aktual. Partai lain diizinkan berdiri, tapi hanya sebagai partai kelas dua atau partai pajangan. Mereka tidak diperkenankan melakukan persaingan antagonistik. Perubahan tak akan pernah terjadi karena kemungkinan pergantian kekuasaan secara adil tak pernah dipikirkan. Implikasinya adalah partai hegemonik tetap mengenggam kekuasaan terlepas disukai atau tidak.

Dasar sistem kepartaian hegemonik di Indonesia ditemukan dalam empat faktor[6]. Pertama, menciptakan aparat keamanan represif untuk memelihara tertib politik dan stabilitas negara. Kedua, melakukan proses depolitisasi massa (floating massa), agar pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Karena lemah kontrol di luar birokrasi, hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil elit, dan menimbulkan kesenjangan luar biasa antara yang kaya dan miskin. Ketiga, proses dan Undang-Undang Pemilu yang tidak demokratis, cenderung untuk menjamin kemenangan Golkar. Dengan berbagai cara dan intensif pegawai negeri dan masyarakat digiring dan ditekan supaya ikut mendukung dan memenangkan Golkar setiap kali pemilu dilangsungkan. Keempat, faktor yang secara langsung menyentuh kehidupan partai politik yaitu pengebirian dan restrukturisasi partai politik.

---

[6] Affan Gaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru*.

Melalui sistem kepartaian hegemonik ini, terjadi akumulasi kekuasaan di satu tangan secara sistematik lewat ideologi, kelembagaan, maupun individu. Hadiah-hadiah berupa jabatan, posisi-posisi penting dan insentif materi diberikan kepada lembaga, kelompok maupun perorangan yang dianggal loyal. Sementara pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan-lawan yang menjadi pesaing, dilumpuhkan dan disingkirkan. Tekanan pemerintah terhadap semua elemen politik non pemerintah, khususnya tekanan berkepanjangan terhadap kalangan kelompok NU, ditambah suasana yang tidak kondusif yang dialami para politisi NU yang aktif di PPP, berdampak menghasilkan keputusan pada tahun 1984 secara kelembagaan NU keluar dari PPP. Sekaligus memberikan kebebasan kepada warganya untuk bergabung atau mendukung partai politik yang ada sesuai dengan pilihan pribadi masing-masing. Sejak itu warga NU tidak hanya banyak aktif di PPP saja, tapi juga tidak sedikit yang mendukung Golkar dan PDI[7].

Berbarengan dengan itu pemerintah menerapkan kebijakan azas tunggal Pancasila. PPP tidak diperkenankan memakai Islam sebagai dasar partai. Hal ini dinilai oleh banyak pengamat sangat berpotensi menciptakan suasana ketegangan antara komunitas Muslim dan non Muslim, serta ketegangan antara sesama Muslim yang santri dengan Muslim abangan. Oleh kalangan militer banyak anggapan bahwa para politisi Islam berpotensi memicu perlawanan terhadap

---

[7] Zaenal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, LP3ES, 2003.

pemerintah seperti yang dilakukan Masyumi, serta memecah masyarakat politik menurut pengelompokan agama.

Dari sisi lain Affan Gaffar melihat beragam hantaman terhadap partai-partai Islam antara lain : Pertama, adanya kekhawatiran bahwa Partai Islam yang terorganisasi dengan baik akan merupakan saingan berat karena berpotensi mampu menggalang dukungan masyarakat yang lebih besar dibandingkan kelompok lain, mengingat secara statistik umat Islam memang merupakan kelompok sosial terbesar secara nasional. Karenanya kekuatan politik Islam tidak ditolerir untuk memegang kendali kekuasaan karena terlanjur dipandang dapat merusak dan mengancam keutuhan persatuan bangsa.

Tekanan-tekanan secara sistematik terhadap kelompok umat Islam, termasuk kelompok islam di lingkungan NU dan frustrasi yang berkepanjangan dan sangat rawan konflik. Kondisi sosial masyarakat menjadi keruh dan mudah terbakar dan meledak oleh berbagai isu kecil sekalipun.

Politisasi Agama

Sebelum kembali ke khittah, kalangan NU beranggapan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai tempat mereka mengartikulasikan aspirasinya, antara lain lantaran PPP dipandang bisa memperjuangkan nasib umat dan banyak tokoh-tokoh NU berkecimpung dan memegang peran penting didalamnya, termasuk tokoh kyai yang

mempunyai kharisma yang menjadi panutan masyarakat. Kemudian pandangan politik berkembang setelah NU mengeluarkan kebijakan khittah. Sebagian warga NU beranggapan bahwa kebijakan itu kurang tepat. Menurut mereka NU harus terlibat dalam politik, karena politik laksana kendaraan yang bisa digunakan untuk mencapai perjuangan bagi kepentingan umat Islam. Sebagian lagi berpendapat bahwa kebijakan itu tepat agar upaya NU melakukan pembinaan sosial keagamaan umat tidak direcoki atau dihambat oleh kepentingan politik yang runyam. Sehubungan dengan afiliasi politik, menurut Endang Turmudi[8] ada dua kelompok kecenderungan yang berbeda, kelompok pertama terdiri dari kiai dan warga NU yang tetap mendukung PPP yang didasarkan pada kenyataan bahwa NU tidak melarang warganya untuk berafiliasi dengan PPP. Khittah hanya memisahkan NU secara formal organisatoritas dari PPP, tapi tetap mengizinkan warganya berafiliasi dengan partai politik, termasuk PPP. Kelompok kedua terdiri dari Kiai dan warga NU yang mengalihkan dukungannya ke Golkar atau partai lain. Adanya perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Selanjutnya dalam pemilu 1999, selain ditandai antusiasme yang neggelora masyarakat, juga ditandai oleh kehadiran banyak sekali partai politik baru. Dari 140 lebih partai baru yang didirikan menyongsong lahirnya era reformasi, terdapat 48 partai Islam yang didukung para tokoh

---

[8] Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKIS, 2004.

dan pemimpin Islam. Kebanyakan partai islam yang baru tersebut merupakan partai gurem dan berguguran karena tidak mendapatkan kursi di DPR dalam pemilu. Kehadiran partai Islam baru, khususnya hadirnya PKB di Jawa Tengah, mengakibatkan persaingan sesama partai Islam makin sengit. PPP dan PKB yang sama-sama mengandalkan dukungan Kiai dan warga NU berpacu memperebutkan dukungan warga NU dan muslim pada umumnya. Benturan-benrutan massa dalam kampanye sulit dihindarkan dan muncul kerusuhan di beberapa daerah.

Selain itu kehadiran banyak pondok pesantren di Jawa Tengah menyebabkan lahirnya kepemimpinan kiai lokal, sekaligus memunculkan sub-sub kelopmpok sosial di kalangan umat dan NU khususnya. Pengaruh kiai tertentu bisa sangat kuat bagi umat Islam tertentu dan enggan memberikan dukungan kepada kiai lain dalam pemilu. Keakraban dan keterikatan seorang tokoh kiai dengan para pengikutnya lebih kuat dari hubungan antara seorang pengikut kiai dengan NU. Sewaktu terjadi konflik antar kiai, kedekatan seseorang dengan kiai tertentu semakin kuat dan mengakibatkan semakin jauh dari kiai lain.

Adanya sejumlah kiai dengan basis pondok pesantrennya politik tertentu menganggap atau memperlakukan umat pendukung kiyai lain yang berbeda aspirasi politik sebagai lawan. Konflik antar umat Islam yang terjadi di Jawa tengah pada tahun 1997 dan 1999 menjadi sangat kompleks karena adanya saling keterkaitan berbagai kepentingan di lingkungan NU – partai politik yang

mengandalkan dukungan warga NU dan kepentingan tokoh. Tentang bentuk, penyebeb konflik dan rekomendasi solusinya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Bentuk Konflik, Penyebab dan Rekomendasi Konflik di Jawa Tengah

Bentuk Konflik	Penyebab Konflik	Rekomendasi
1. Tindak kekerasan, perusakan, kerusuh an massal (1995-1997-1999)	2. Dominasi sumberdaya ekonomi	1. Diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok ekonomi lemah 2. Mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
	3. Persaingan politik yang tidak sehat	1. Menghentikan sikap arogansi pihak aparat pemerintahan dan elit politik 2. Menghindari prilaku dan tindakan diskriminatif, orientasi individual dan kelompok

		3. Penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN 4. Tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik kelompok 5. Menghindari budaya dan tindak kekerasan kolektif 6. Menggalakkan pemupukan kerukunan dan sikap toleransi melalui lembaga-lembaga pendidikan agama dan sekolah-sekolah
	4. Penyalahgunaan Simbol Keagamaan	1. Menghindari prilaku dan tindakan yang dapat menodai nilai-nilai agama. 2. Menggalakkan aktifitas sosial keagamaan yang berorientasi bagi kepentingan kemanusiaan, bukan orientasi kelompok keagamaan.

Tabel 2

Potensi Kerukunan dan Konflik di Jawa Tengah

Potensi Kerukunan	Potensi Konflik
1. Kearifan budaya lokal 2. Efektifitas pemerintahan 3. Ajaran Agama dan pengaruh tokoh agama 4. Toleransi antar kelompok suku dan agama 5. Peran ganda para tokoh di berbagai satuan sosial 6. Dialog multikultural dan lintas agama melalui berbagai forum dan media	1. Persaingan politik yang meningkat 2. Penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik kelompok 3. Perbedaan paham dan sekte-sekte internal kelompok keagamaan 4. Orientasi kelompok 5. Kesenjangan politik, ekonomi dan sosial 6. Berkembangnya budaya kekerasan kolektif

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertama, konflik yang berkembang menjadi kerusuhan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan agama. Dari segi faktor pemicu, kerusuhan amuk massa tahun 1995 bermula dari peristiwa penyobekan Al-Qur'an atau penodaan agama oleh seorang warga keturunan Cina. Sementara kerusuhan tahun 1997 di Pekalongan diawali dengan aksi perusakan panggung dakwah Golkar oleh sejumlah orang yang tak dikenal identitasnya, dan kerusuhan tahun 1999 di beberapa daerah dipicu oleh benturan massa kampanye pemilu.

Kedua, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dipandang berpengaruh terhadap prilaku kekerasan kolektif, ditandai oleh adanya pergeseran "pemegang kendali" ekonomi khususnya di bidang perbatikan dari kelompok pengusaha pribumi ke kelompok pengusaha non pribumi (Cina), lantaran kalah bersaing. Kondisi sosial ekonomi dan pergeseran tersebut terkait pula dengan kenyataan perbedaan keyakinan agama. Mayoritas pengusaha pribumi beragama Islam, sedangkan kelompok pengusaha Cina mayoritas Kristen. Hubungan di antara kelompok ini kurang kondusif lantaran prilaku kelompok Cina ini terkesan esklusif. Oleh karena itu agar kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial masyarakat tidak makin parah, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, berencana dan terarah oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait agar tercipta suasana persaingan yang adil dan sehat. Perlindungan

dan kemudahan bagi kelompok pengusaha lemah serta peningkatan lapangan kerja merupakan hal yang mendesak.

Ketiga, akumulasi kekuasaan di satu tangan atau kelompok dan mandulnya lembaga-lembaga pengawasan, serta tersumbatnya kontrol sosial, mengakibatkan program-program pembangunan berlangsung tanpa diiringi dengan pengendalian yang memadai sehingga memudahkan terjadinya praktek-praktek KKN yang makin meluas di segala aspek dan lembaga-lembaga sosial di setiap jajaran. Sehubungan dengan hal ini, diperlukan upaya menggalakkan penegakan supremasi hukum secara lebih serius dan kontinu.

Keempat, kecenderungan orientasi kelompok dan individual yang relatif kental di kalangan elit dan kelompok politik serta praktek money politic berdampak pada berkembangnya suasana persaingan politik yang tidak sehat dan menggerogoti tatanan berdemokrasi yang hendak dibangun. Ditambah lagi dengan praktek-praktek penggalangan pendukung kelompok politik dengan cara-cara mobilisasi kelompok massa di tempat-tempat umum yang terbuka seperti jalan raya, sering mengundang munculnya prilaku tindak kekerasan kolektif yang destruktif. Melalui kebijakan dan pengawasan ketat pemerintah serta dukungan pihak-pihak terkait, hendaknya persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang santun sesuai dengan pilar-pilar demokratis.

Kelima, politisasi atau penyalahguaan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan sesaat kelompok politik,

merupakan tindakan yang sangat rentan bagi timbulnya kerawanan-kerawanan sosial di kalangan umat beragama. Semua pihak hendaknya lebih bisa menahan diri dan berupaya bersama-sama senantiasa memelihara kesucian nilai-nilai keagamaan dan menghindari prilaku atau tindakan yang dapat menodai umat beragama lantaran ambisi politis secara tidak proporsional baik yang bersifat komunal maupun individual. Menggalakkan aktifitas sosial keagamaan yang berorientasi bagi kepentingan kemanusiaan.

Pustaka Rujukan

Affan Gaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru*.

BPS, *Jawa Tengah Dalam Angka, 2002.*

Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKIS, 2004.

Gajah Mada dan Departemen Agama, *Prilaku Kekerasan Kolektif*, 1997.

GATRA, Desember, 1995

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1996

Zaenal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, LP3ES, Jakarta, 2003.

(VI)

NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi Umum Wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lazim disebut propinsi kepulauan, terdiri dari 566 buah pulau, diantaranya hanya sebagian kecil yakni sebanyak 42 pulau yang mempunyai penghuni. Selebihnya sejumlah 524 pulau tidak atau belum berpenghuni. Dari pulau-pulau yang banyak itu terdapat tiga pulau besar masing-masing pulau Flores, pulau Timor, dan pulau Sumba. Jarak antara ketiga pulau besar ini relatif jauh, dipisahkan laut. Transportasi antar ketiga pulau bisa ditempuh melalui pesawat udara, kapal laut dan perahu motor. Beriklim tropis kering, berbukit-bukit dan rawan longsor tatkala musim hujan tiba. Berbatasan masing-masing dengan laut Flores di belahan utara, dengan lautan Indonesia dan Australia di selatan, dengan negara Timur Lorosae di sisi timur, sementara bagian barat berbatasan dengan Propinsi Nusa tenggara Barat (NTB).

Secara adminsitratif pemerintah NTT ini terdiri dari 14 daerah tingkat dua atau kabupaten/kota dan dua wilayah Pembantu Bupati. Secara keseluruhan propinsi NTT meliputi 124 wilayah Kecamatan, 309 Kelurahan dan sebanyak 207 desa.

Kependudukan

Berpedoman pada laporan BPS tentang kependudukan, pada tahun 2002, penduduk propinsi NTT secara keseluruhan tercatat sebanyak 4.086.691 jiwa, dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,82 persen pertahun dan tingkat kepadatan penduduk secara rata-rata sebesar 76 jiwa perkilometer bujur sangkar. Sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah ini berasal dari warga asli keturunan setempat yang meliputi puluhan suku dengan menggunakan bahasa kesukuannya masing-masing dalam komunikasi pergaulan hidup keseharian, disamping bahasa nasional Indonesia. Seperti juga di banyak daerah lain di negeri ini, masyarakat NTT merupakan masyarakat yang majemuk atau plural dari sudut suku, latar sosial budaya, maupun keagamaan.

Plurаritas sosial dilihat dari kesukuan ini secara umum seperti berikut. Kelompok suku-Tetum dan Dewan-tersebar di kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan kabupaten Belu. Sementara kelompok suku-Sabu dan Rote-banyak ditemui di pulau Sabu dan pulau Rote. Kelompok suku Alor terkonsentrasi d kabupaten Alor. Suku Sumba banyak terdapat di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Sedangkan kelompok suku- Lamaholot dan Kedang-bisa dijumpai di kabupaten Plores Timur dan kabupaten Lembata. Adapun kelompok suku –Paga, Sikka dan Kangai-banyak terdapat di kabupaten Sikka. Suku-suku –Ende dan Lio- terkonsentrasi di kabupaten Ende.

Selanjutnya di kabupaten Ngada, banyak dijumpai suku- Bajawa, Nagekoe dan suku Riung. Sedangkan diwilayah kabupaten Manggarai, merupakan tempat bermukim suku- Manggarai, Bajo dan Bima-. Sementara kelompok pendatang dari luar Nusa tenggara Timur yang meliputi kelompok etnis Cina, Arab, Bugis, Jawa, Makasar, Buton, Minang, pada umumnya menyebar di perkotaan propinsi, kabupaten, dan kecamatan-kecamatan. Sebagian besar warga pendatang seperti disebutkan diatas, berkiprah di bidang usaha perdagangan dan dalam kehidupan sehari-hari sudah berbaur dengan penduduk asli setempat. Dalam kehidupan ekonomi, sebagian besar para warga kelompok pendatang tersebut menduduki tingkat kehidupan ekonomi yang relatif lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan sebagian besar penduduk asli setempat.

Walaupun masyarakat NTT terbagi-bagi kedalam sub-sub kelompok etnis yang jumlahnya banyk dan beragam, dengan pengaruh kesukuannya masing-masing masih terbilang kental, namun secara keseluruhan mereka memiliki kepribadian khas yang terbangun diatas tugu kebudayaan lokal yang kokoh yakni “Sistem Kekerabatan” yang merupakan suatu kekuatan budaya lokal yang dapat merajut hubungan antar sesama mereka karena ikatan kekeluargaan melalui perkawinan atau keturunan. Sistem kekerabatan ini dapat berfungsi sebagai simbol permersatu yang dapat mencairkan suasana apabila sewaktu-waktu terjadi konflik. Kebiasaan hidup saling menghargai antar suku dan agama yang berbeda di kalangfan masyarakat setempat sudah

berlangsung lama. Kebersamaan lintas suku dan agama tercermin dalam upacara-upacara lingkaran hidup, bakti sosial, pergaulan sosial bertetangga, hubungan kerja lainnya.

Namun, karena pengaruh etnis ini masih melekat secara kental dikalangan masing-msing anggota kelompoknya, maka bila sewaktu-waktu muncul konflik antar individual yang berbeda etnis, sering melibatkan anggota di arus bawah, sehingga dengan cepat berkembang menjadi konflik kelompok atau komunal. Kalau terlanjur menjadi konflik kelompok, persoalannya bisa menjadi rumit dan kompleks, tak gampang diselesaikan, lantaran ekslusifitas etnis dimana tiap kelompok etnis, merasa etnisnya lebih superior. Lazimnya bila sudah demikian, atas dasar sistim kekerabatan yang mengikat semua kelompok, para tokoh berpengaruh dari etnis masing-masng dipanggil dan diadakan perembukan damai sampai ditemukan kesepakatan yang tepat, diterima semua pihak.

Sedangkan komunikasi antara kelompok asli dengan kelompok pendatang berlangsung melalui berbagai media seperti upacara peringatan hari-hari besar nasional, ikatan kerja diperkantoran, ikatan kebangsaan selaku sesama warga negara, ikatan saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, serta ikatan persaudaraan bertetangga ditempat-tempat pemukiman dalam hubungan pergaulan sosial keseharian. Selain itu meskipun dalam jumlah terbatas pembauran lintas etnis dan agama ini juga berlangsung lewat kawin-mawin antar warga.

Ekonomi dan Sosial

Dititik dari sudut pandang kehidupan ekonomi masyarakat setempat, para warga asli yang bermukim didaerah-daerah pedalaman, mereka mengandalkan hidupnya disektor pertanian. Sebagai mesyarakat agraris mereka berkiprah di bidang cocok tanam, berladang, berkebun, beternak serta usaha-usaha lain terkait dengan kehutanan. Umumnya mereka hidup ditempat-tempat terpencil, jauh dari pusat keramaian kota. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang relatif sangat terbatas, mereka menjalani dn mengukir hidup secara sederhana dan seadanya, dan cenderung relatif statis.

Sedangkan warga Muslim yang berdiam di daerah pantai seperti etnis Ende dan Bojo di pulau Flores serta etnis Lama Kolot di Flores Timur, dan etnis Bugis serta Buton dibeberapa tempat, khususnya dikota Kupang, mereka berkecimpung dibidang perikanan selaku nelayan atau pelaut yang relatif mudah dalam pergaulan dan bersikap terbuka dengan para pendatang dengan tingkat kehidupan sosial lebih maju dan dinamis.

Adapun kelompok pendatang diperkotaan baik kota propinsi, kabupaten, maupun kecamatan seperti etnis Cina, Bugis, Makasar, Jawa dan Minang, umumnya bergerak dibidang usaha perdagangan dan relatif dominan dibidang ekonomi dibandingkan dengan sebagian besar etnis setempat. Sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang-

pangan dan keperluan rumah tangga, sebagian besar berada dalam kendali kelompok etnis pendatang.

Selanjutnya berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi penduduk propinsi Nusa Tanggara timur secara menyeluruh, khususnya terkait dengan masalah kemiskinan dari laporan Kajian Analisis Potensi Desa Nusa Tenggara Timur 2002 yang dilakukan BPS, digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2001 adalah 1,28 juta orang. Jumlah ini telah menurun dari 1,39 juta orang pada tahun 2000. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2001 adalah sekitar 33,01 persen, menurun dari 36,52 persen pada tahun sebelumnya.

Walaupun proporsi penduduk miskin pada level propinsi pada tahun 2001 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2000, akan tetapi masih terdapat beberapa kabupaten yang proporsi penduduk miskinnya justru meningkat. Peningkatan proporsi penduduk miskin yang paling tajam adalah di Lembata, yaitu dari hanya 35,24 persen pada tahun 2000 menjadi 43,23 persen pada tahun 2001 (meningkat 7,99 persen). Urutan berikutnya adalah Timor Tengah Selatan (meningkat dari 40,61 persen tahun 2000 menjadi 47,57 persen tahun 2001), Belu (dari 23,40 persen menjadi 29,53 persen), Manggarai (dari 30,31 persen menjadi 34,47 persen), dan Sikka (26,69 persen menjadi 31,35 persen).

Jika diamati lebih jauh, proporsi penduduk miskin antar kabupaten/kota pada tahun 2001 tampaknya cukup bervariasi. Proporsi penduduk miskin di Sumba Barat merupakan yang paling tinggi, mencapai sekitar 54,47 persen dari seluruh jumlah penduduk. Sedangkan proporsi penduduk miskin paling rendah adalah di Ngada, hanya 6,35 persen.

Selain Sumba Barat, terdapat lima kabupaten lain yang proporsi penduduk miskinnya melebihi proporsi penduduk miskin pada level propinsi. Kelima kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan (47,57 persen), Lembata (43,23 persen), Alor (40,34 persen), Kupang (37,67 persen) dan Manggarai (34,47 persen). Sementara itu hanya terdapat dua wilayah yang proporsi penduduk miskinnya kurang dari 15 persen, yaitu Ngada (6,35 persen) dan kota Kupang (10,10 persen).

Gambaran yang telah diuraikan tersebut adalah berdasarkan penduduk miskin yang dihitung dengan menggunakan metedologi BPS, yaitu berdasarkan banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan garis kemiskinan adalah sejumlah nilai rupiah yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum untuk konsumsi makanan dan non makanan. Untuk NTT garis kemiskinan penduduk pedesaan pada tahun 2001 adalah sebesar 73.648 rupiah per kapita sebulan, sedangkan untuk penduduk perkotaan adalah sebesar 98.770 rupiah per kapita sebulan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Penduduk Muslim Menurut Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur 2000 dan 2001

No	Kabupaten	2000				2001			
		Jumlah Penduduk (Orang)	Penduduk Miskin	Proporsi Penduduk Miskin	Peringkat	Jumlah Penduduk (Orang)	Penduduk Miskin	Proporsi Penduduk Miskin	Peringkat
1	Sumba Barat	353.775	202.955	57,37	1	360.814	196.520	54,47	1
2	Sumba Timur	184.475	47.894	25,96	11	188.667	29.647	15,71	12
3	Kupang	399.438	211.172	52,87	2	402.615	151.681	37,67	5
4	Timur Tengah Selatan	389.078	158.009	40,61	6	393.974	187.420	47,57	2
5	Timur Tengah Utara	193.713	91.237	47,10	5	197.175	53.510	27,14	11
6	Belu	277.484	64.924	23,40	12	284.391	83.988	29,53	10
7	Alor	164.042	82.218	50,12	3	166.488	67.158	40,34	4
8	Lembata	89.697	31.612	35,24	7	91.483	39.550	43,23	3
9	Flores Timur	197.241	69.383	35,18	8	199.476	60.642	30,40	9
10	Sikka	263.284	78.177	29,69	10	264.926	83.051	31,35	7
11	Ende	232.270	155.707	49,82	4	233.454	73.161	31,34	8
12	Ngada	223.503	26.827	12,00	13	226.313	14.361	6,35	14
13	Manggarai	603.206	182.839	30,31	9	620.035	213.735	34,47	6
14	Kota Kupang	237.271	27.902	11,76	14	245.376	24.776	10,10	13
	Jumlah	3.808.477	1.390.856	36,52	-	3.875.187	1.279.200	33,01	-

Sumber: *Hasil Olahan Susenas KOR* 2000 dan 2001

Gambaran kemiskinan dengan metodologi BPS tersebut ternyata relatif berbeda dengan gambaran keluarga prasejahtera (PS) dan sejahtera I (KS I). Berdasarkan hasil pengolahan data Podes ST03, jumlah keluarga di NTT pada

tahun 2002 mencapai 854.655 keluarga. Dari sejumlah tersebut yang termasuk ke dalam kategori keluarga PS dan KS I adalah sebanyak 610.722 keluarga (71,46 persen).

Proporsi PS dan KS I yang paling tinggi adalah di kabupaten Sumba Barat,yaitu 82,11 persen dari jumlah seluruh keluarga di wilayah ini. Wilayah lain yang memiliki proporsi keluarga PS dan KS I melebihi proporsi pada level propinsi adalah Kupang (79,42 persen), Rote Ndao (77,27 persen), Belu (76,28 persen), Sumba Timur (76,07 persen), Lembata (75,83 persen), Ngada (75,05 persen), Manggarai (73,19 persen), dan Ende (71,52 persen). Sementara proporsi keluarga PS dan KS I di kota Kupang merupakan yang terendah, yaitu hanya 48,13 persen dari jumlah keluarga di wilayah ini.

Berkenaan dengan proporsi penduduk yang kurang beruntung atau berada dalam lingkaran kemiskinan sebagaimana dinyatakan dalam paparan dan table di atas relatif banyak jumlahnya, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pihak-pihak lain terkait, sebelum kondisinya menjadi bertambah parah. Ketimpangan ini dimungkinkan karena kurangnya pemerataan pembangunan yang berlangsung selama ini. Persoalan kemiskinan ini bila dibiarkan berlarut-larut, sangat berpengaruh dan dapat mengganggu bidang-bidang kehidupan lainnya. Kemiskinan merupakan salah satu tekanan sosial yang berat dirasakan oleh yang bersangkutan dan pada gilirannya bisa mengundang gejolak sosial yang rentan koflik yang akan merugikan berbagai upaya terkait

dengan integrasi masyarakat dan kehidupan sosial yang rukun.

Kehidupan Agama

Dari penduduk propinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan yang tercatat sebanyak 4.086.691 jiwa pada tahun 2002. ditinjau dari kepemelukan keagamaan, kelompok agama Katolik merupakan kelompok mayoritas yakni sebanyak sekitar 52,73 persen. Disusul kemudian kelompok Protestan sejumlah32,74 persen. Kelompok Muslim 8,60 persen – Kelompok Hindu sejumlah 0,26 persen – dan kelompok penganut agama Budha sebanyak kurang lebih 0,03 persen. Untuk lebih jelas mengenai kompossi penduduk menurut agama ini, bisa disimak melalui table berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama, Tahun 2002

No	Kabupaten	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	jumlah
1	Sumba Barat	12.469	157.512	92.797	645	7	72.803	336.233
2	Sumba Timur	13.438	149.237	14.711	334	5	13.155	190.881
3	Kupang	12.132	368.944	24.304	875	79	-	406.334
4	Timur Tengah Selatan	8.029	339.885	43.062	346	-	5,644	396.966
5	Timur Tengah Utara	2.561	12.603	184.263	209	-	-	199.636
6	Belu	4.444	22.121	359.077	288	43	95.910	290.063
7	Alor	35.832	123.136	7.025	187	-	1.899	198.069

8	Lembata	20.611	219	68.089	28	1	1.768	90.716
9	Flores Timur	56.369	693	140.948	237	138	3.255	201.640
10	Sikka	18.280	2.194	242.420	394	-	2.669	265.956
11	Ende	59.961	3.792	167.829	424	236	2.338	234.579
12	Ngada	15.156	2.223	206.206	201	29	4.716	228.531
13	Manggarai	59.352	3.277	552.661	499	96	15.329	631.214
14	Kota Kupang	32.789	152.189	51.613	5.842	508	11.112	254.053
	Jumlah	351.423	1.338.025	2.155.005	10.507	1.143	230.588	4.086.691

Sumber : *Kanwil Departemen Agama Propinsi NTT*

Lebih jauh melalui tabel di atas diketahui bahwa kelompok agama Katolik merupakan kelompok mayoritas di delapan wilayah masing-masing di Kabupaten Timur Tengah Utara – Belu – Lembata – Sikka – Ende – Ngada – Manggarai – dan Flores Timur. Sementara kelompok agama Protestan dominan dalam jumlah penganut di enam daerah masing-masing kabupaten Sumba Barat- Sumba Timur – Kupang – Timor Tengah Selatan. Alor dan Kota Kupang. Sedangkan warga kelompok Muslim kelompok terbesar ketiga setelah Katolik dan Protestan banyak terdapat di tiga wilayah yakni Flores Timur yakni sebanyak sekitar 27.95 persen dari keseluruhan penduduk kabupaten Flores Timur di kabupaten Ende sebesar 25.56 persen – dan di kabupaten Lembata sebanyak 22,72 persen dari pendduk Lembata secara keseluruhan. Adapun para penganut agama Hindu dan Buda lebih banyak terdapat di kota Kupang dibandingkan dengan tiga belas kabupaten lainnya di lingkungan wilayah NTT.

Penyebaran agama di lingkungan wilayah NTT tersebut ternyata sangat bervariasi. Hal ini terjadi tidak terlepas,bahkan sangat erat kaitannya dengan faktor sejarah.

Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda dahulu ke Indonesia, khususnya di NTT, selain melakukan penjajahan, sekaligus juga menjalankan misi dan zending Kristen di wilayah setempat. Tatkala Portugis menguasai Malaka, banyak kapal-kapal mereka berlayar ke pulau Solor di Flores Timur dalam rangka membeli kayu cendana. Kemudian pada tahun 1559 berhasil membujuk Raja Solor dengan segenap keluarganya masuk agama Katolik.

Begitu juga halnya dengan kabupaten Alor yang mayoritas Protestan dan diikuti oleh jumlah kelompok Muslim. Hal tersebut sangat boleh jadi dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan Belanda di kepulauan Maluku yang salah satu pulaunya yakni pulau Kisen berdekatan dengan pulau Alor. Agama protestan berkembang di Alor, kemudian sampai ke pulau-pulau Timor, Sabu dan Rote. Masih di wilayah kabupaten Alor,terdapat umat Islam yang relatif banyak, hampir berimbang dengan jumlah penganut Protestan yaitu di pulau Ternate. Nama Ternate diabadikan untuk dijadikan kenangan dan mengingatkan bahwa mereka merupakan turunan Muslim yang berasal dari Maluku (Ternate) yang mengungsi ke wilayah stempat karena terusir oleh penjajah di Maluku.

Terkait dengan penyebaran agama yang sangat bervariasi di NTT ini menurut pejabat Bimas Kristen dan Bimas Katolik di lingkungan Kanwil Departmen Agama NTT, dalam perkembangan dua kelompok. Agama Protestan-Katolik ini, terdapat kesepakatan untuk membagi peta wilayah penyebaran agama seperti pola yang ada di NTT

sekarang ini. Lebih jauh menurut Bele Antonius (Katolik) sudah ada perjanjian Lisabon-Portugis tahun 1918 untuk membagi wilayah Indonesia bagian timur (Ambon) dan Sumatera wilayah Protestan sementara Manado-Sulawesi Utara dan Flores menjadi wilayah penyebaran Katolik.

Berikut berkenaan dengan perkembangan Islam di NTT, berlangsung setelah penjajahan Belanda di Indonesia. Di belahan timut pulau Flores seperti di kepulauan Solor dan Alor, agama Islam tersebar melalui keturunan kesultanan Maluku Utara yang memegang kekuasaan di kawasan pulau Flores bagian timur. Di daratan pulau Sumba penyebaran Islam melalui keturunan Etnis Arab. Di wilayah pesisir seperti kota Kupang, memang sejak dahulu terdapat tempat pemukiman komunitas Muslim yang bersal dari keturunan Muslim di kepulauan Solor yang mengungsi ke Kupang. Warga turunan Arab dan Sumatera,sampai sekarang bisa dijumpai keberadaan mereka di kelurahan Bonipoi. Di Ende dan pinggiran pulau Flores terdapat kelompok Muslim yang berasal dari etnis Bajo dan Bima.

Dalam pergaulan hidup keseharian kelompok Muslim ini sudah membaur dan menyatu dengan kalangan kelompok Katolik setempat. Mereka berdampingan secara harmoni, penuh semangat kekeluargaan, serta tidak saling mengganggu. Dalam acara-acara yang bersifat kekeluargaan,sulit dibedakan antara warga Muslim dan Katolik lantaran keduanya sama-sama memakai songkok tenunan khas Manggarai.

Beragam kegiatan keagamaan sehari-hari yang berlangsung di lingkungan masing-masing kelompok antaranya: Di kalangan kelompok Kristen terdapat aktivitas-aktivitas rutin keagamaan berupa kebaktian Minggu, kebaktian Keluarga, kebaktian Pemuda, sekolah Minggu, bagi anak-anak. Selain itu ada juga beberapa kegiatan sosial keagamaan yang bersifat kemanusiaan seperti memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang kurang beruntung di bidang sosial ekonomi, penddikan,kesehatan seperti bantuan modal kerja, bea siswa, pengobatan murah atau cuma-cuma, pesan-pesan keagamaan, disampaikan tokoh-tokoh agama setempat baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat kecamatan. Khusus mengenai pesan-pesan kerukunan, sangat menonjol disosialisasikan sekitar tahun 2000-2002, saat memuncaknya konflik sosial bernuansa agama di beberapa daerah seperti Maluku, Ambon, Poso, Kalimantan dan lainnya. Pesan serupa tentang kerukunan ini disampaikan oleh semua kelompok agama setempat kepada umatnya masing-masing di lingkungan tempat ibadah, tempat pemukiman dan di kalangan masyarakat luas.

Di kalangan kelompok Muslim, secara rutin berlangsung ceramah agama, dakwah, pengajian, tahlilan, yasinan dan beragam upacara selamatan lingkaran hidup, syukuran, perayaan hari-hari besar agama. Santunan kepada anak yatim, dan kaum papa juga dilakukan melalui media-media seperti perkumpulan zakat, infak oleh lembaga keagamaan, panti asuhan dan perorangan, karena jumlah umatnya relatif kecil pembinaan konsolidasi mudah

dilakukan. Sehingga kerukunan internal boleh dikatakan kondusif.

Untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan umat beragama khususnya dalam beribadah, di NTT secara keseluruhan terdapat sarana ibadah berupa masjid dan mushalla sebanyak 819 buah, gereja dan Kapela Katolik 2.772, Gereja Protestan 3.257 buah, dan sebanyak 17 Pura buat kelompok agama Hindu.

Selain kelompok-kelompok agama yang resmi, juga terdapat kelompok kepercayaan lokal terutama di daerah-daerah pedalaman. Mereka percaya kepada roh nenek moyang yang sudah meninggal, serta kehadiran makhluk-makhluk halus yang menjaga rumah dan halaman, menjaga desa, menjaga tanah pertanian dan sebagainya. Ruh halus itu disebut "ata palestina" atau makhluk yang berada di dunia lain. upacara keagamaan menurut adat Manggarai dilakukan dan dipimpin oleh seorang yang disebut "ata Mbako". Selain upacara yang bersifat umum seperti peresmian balai desa, upacara kesuburan tanah dan yang berhubungan dengan pertanian. "ata mbako" juga bisa diundang untuk mengerjakan aktivitas perdukunan, menyembuhkan penyakit, meramal nasib orang, memberi kesaktian dengan jimat dan air sakti, terkadang juga melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk merugikan atau mencelakakan orang lain melalui guna-guna.

Kerukunan

Komunikasi dan interaksi sosial antar warga lintas agama dan suku, sudah terjalin sejak lama melalui pergaulan sosial, baik hubungan bersifat personal, maupun hubungan antar kelompok. Saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Toleransi dan pesan kerukunan, tahun-tahun terakhir ini makin nyaring didengungkan dimana-mana oleh para tokoh agama, adat, pejabat pemerintahan di semua tingkat. Kebersamaan banyak dilakukan di tempat-tempat pemukiman dalam bentuk saling membantu dalam pendirian tempat ibadah, hubungan ketetanggaan, kekerabatan dan kekeluargaan serta sikap keterbukaan yang didasari oleh budaya kearifan lokal seperti sistim kekerabatan.

Di NTT, terdapat lembaga komunikasi antar umat beragama yang disebut Forum Komunikasi (FORKOM) antar umat beragama yang anggotanya meliputi tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat. Kegiatan Forkom ini difokuskan pada pembinaan kerukunan lewat dialog-dialog lintas agama, penyebaran brosur-brosur yang berisi pesan-pesan kerukunan. Dalam hubungan ketetanggaan mereka saling membantu bila ada warga yang kena musibah. Jika ada keluarga Kristen baik Katolik maupun Protestan yang hajatan, mereka minta bantuan Muslim memotong hewan, memasak dan menghidangkannya, sehingga warga muslim yang hadir tidak ragu-ragu menyantapnya.

Dalam peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal, mereka saling berkunjung. Dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir ini, di Kupang dilakukan upacara Natal, Idul Fitri dan Galungan bersama-sama. Pemerintah setempat berinisiatif menyelenggarakan halal bihalal bersama di tempat-tempat ibadah. Pembacaan doa dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing kelompok, juga dilengkapi dengan acara-acara kesenian seperti kasidahan, paduan suara ibu-ibu, kesenian Bali dan seterusnya, secara bergantian digelar.

Kerukunan bermasyarakat ini tentu akan lebih mantap bla dilakukan secara lebih terarah, berencana dan terprogram dalam bentuk kerjasama yang bersifat kemanusiaan menyangkut kepentingan publik secara lebih konkrit. Tidak terbatas hanya aktifitas-aktifitas temporer dan seremonial yang banyak dilakukan sekarang-sekarang. Termasuk penjajagan bagi kemungkinan masuknya masalah kerukunan ini dalam proses belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Potensi Kerukunan

Menurut Atho Mudzhar, ada dua teori besar sosiologi yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu masyarakat di dunia ini dapat bertahan dan terus menerus berkembang dari generasi ke generasi. *Pertama*, masyarakat tetap bertahan karena para anggotanya bersepakat mengenai berbagai macam hal, termasuk berbagai macam nilai. Misalnya kesepakatan untuk tidak saling membunuh dan menjunjung nilai-nilai tertentu seperti kejujuran, toleransi, kerjasama dan

seterusnya. Dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut maka keutuhan masyarakat dapat diperlihara, senantiasa rukun dan tenteram, dan dalam waktu yang sama antar sesama warganya terjadi pembagian tugas dan fungsi untuk menopang tugas dan fungsi masyarakat secara keseluruhan (teori sensus).

Kedua, masyarakat tetap bisa bertahan lantaran para anggotanya senantiasa berkonflik sebagai inti eksistensi dari setiap satuan sosial. Konflik-konflik tersebut berimbas pada munculnya bentuk-bentuk hubungan baru sebagai sintesa. Masyarakat manusia bertahan karena adanya tumpukan sintesa-sintesa itu. Manusia bisa rukun bukan lantaran konsensus, melainkan karena adanya unsur "*coersion*" atau pemaksaan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang lemah. Ketika pemaksaan itu "diterima" tidak ada perlawanan karena memang tak berdaya melawan kelompok pemaksa dalam kurun waktu tertentu, maka terjadilah kerukunan.

Dua teori tersebut memang mengandung kebenaran, namun tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Konsensus dan konflik, rukun dan tidak rukun sering silih berganti terjadi. Karena itu perlu difahami dan dijelaskan kapan dan mengapa terjadi konflik dan kapan serta bagaimana kerukunan terjalin[2]. Rukun dan tidak rukun suatu masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat positif atau potensi kerukunan, maupun faktor berpengaruh

---

[2] Atho Mudzhar, *Konflik Etno-Religius Indonesia Kontemporer*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

negatif menghambat kerukunan yang biasa disebut potensi konflik. Dari telaah sejumlah dokumen dan wawancara dengan para nara sumber setempat, diperoleh gambaran yang bersifat umum bahwa kondisi relatif rukun di lingkungan kehidupan sosial di NTT akhir-akhir ini ada kaitannya dengan hal-hal berikut.

Pertama, sistim kekerabatan yang terbentuk melalui ikatan garis keturunan atau hubungan darah dan ikatan melalui peristiwa kawin-mawin antar warga, merupakan salah satu budaya kearifan lokal setempat yang mengikat mereka seantiasa berada dalam kesatuan sosial. Dikuatkan lagi oleh kebiasaan rasa hormat kepada orang tua, tokoh adat, pemimpin dan norma-norma sosial seperti adat gotong royong, toleran serta nilai-nilai positif lainnya yang berpengaruh terhadap prilaku warga yang dapat menunjang kerukunan. Pranata-pranata lokal tersebut dapat berfungsi selaku simbol "pemersatu" yang efektif dalam rangka mencairkan suasana atau meredam konflik. Seiring dengan itu dalam ajaran agama-agama yang diyakini masyarakat banyak mengandung pesan dan nilai-nilai yang menganjurkan bahkan terkadang memaksa pemeluknya untuk menghindari konflik dan mewujudkan prilaku yang menopang kerukunan. Peran para tokoh yang menduduki posisi-posisi penting dan aktif dalam berbagai satuan sosial berbeda (cross catting loyalities) lintas suku dan agama, dapat berfungsi sebagai "lem perekat" dalam komunikasi dan interaksi sosial pergaulan sehari-hari antar sesama warga yang berlainan latar

belakang sosial, budaya ataupun keyakinan keagamaannya. *Kedua*, akibat konflik yang pernah dialami, dan pelajaran sangat berharga dari berbagai kerusuhan di tempat-tempat lain, berdampak pada para tokoh di segenap lapisan sosial yang mendorong mereka untuk selalu bersungguh-sungguh memperhatikan persoalan kerukunan, bersikap lebih arif, menghindarkan konflik, dan sewaktu-waktu konflik muncul segera berupaya bersama mencari solusinya supaya tidak mengakibatkan korban yang akan merugikan semua pihak, menjaga jangan sampai konflk berkembang dan bertambah kompleks. *Ketiga*, Ikatan kebangsaan sebagai sesama warga negara dan sesama anggota satuan sosial setempat, yang satu dengan lainnya mempunyai saling keterkaitan dan saling ketergantungan mendorong kebersamaan karena setiap orang membutuhkan kehadiran orang lain tanpa memandang agama atau sukunya. Untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan hdup, seseorang atau sekelompok orang tak mungkin mampu melakukannya sendiri tanpa kehadiran dan kerjasama dengan orang lain, baik secara individual maupun komunal. Kemmpat, tersedianya forum-forum atau media komunikasi dan interaksi lintas suku dan agama di tempat-tempat pemukiman, perkantoran, dan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatan dan keagamaan mendorong terjadinya proses tawar menawar dan kompromi-kompromi yang dibutuhkan buat tercapainya konsensus dan bentuk-bentuk kerjasama dan kebersamaan.

Potensi Konflik

Suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu bersamaan. Keempat elemen tersebut meliputi kontek pendukung (*facilitating contexts*) – akar konflik (*core of conflict*) – sumbu pembakar (*fuse factor*) – dan pemicu (*triggering factors*)[3]. Kontek pendukung dalam suatu konflik bisa bermacam-macam seperti segregasi pola pemukiman menurut agama atau suku, persaingan sosial tidak sehat sehingga terjadi kepincangan. Hadirnya kontek pendukung ini lazimnya berperan selaku tempat berseminya potensi-potensi konflik, menunggu saat atau situasi yang tepat untuk meledak, bukan penyebab, sementara akar masalah konflik umumnya berbentuk suatu tekanan sosial (*sosial deprivacation*) atau aliensi sosial dalam persaingan memperebutkan sumber-sumber daya ekonomi, politik dan sebagainya yang sudah tidak bisa ditolerir.

Sumbu konflik, bisa dalam bentuk sentimen-sentimen kesukuan, keagamaan, kedaerahan dan seterusnya. Sewaktu-waktu sumbu konflik ini terbakar, atau sengaja dibakar, maka bisa muncul konflik. Sedangkan faktor pemicu adalah peristiwa atau momentum di mana semua elemen-elemen di atas berakumulasi atau diakumulasikan untuk menghadirkan konflik. Momentum itu, bisa saja berupa ha-hal kecil dan sepele seperti perkelahian anak muda, pertengkaran mulut,

---

[3] Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

tapi berperan sebagai alasan pembenar bagi bermulanya suatu konflik yang berskala lebih besar.

Selanjutnya berkenaan dengan berbagai persoalan yang dipandang mengandung potensi konflik dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat yang berkembang di lingkungan NTT meliputi hal-hal diantaranya; Pertama, perbedaan paham dan aspirasi keagamaan dalam kelompok sosial suatu agama seperti sekte-sekte dalam kelompok Protestan yang berada di luar kendali. Sebagian besar organisasi gereja berada di luar PGI yang dipandang sebagai kelompok arus utama. Hal ni bisa menjadi benih konflik internal kelompok keagamaan, khususnya internal Protestan. Konflik internal kelompok itu bisa berkembang dan meluas dan berimbas ke luar kelompok. Misalnya kebutuhan sub-sub kelompok Protestan akan gereja dalam jumlah yang banyak ditafsirkan oleh kelompok agama lain sebagai suatu sikap agresif dan ekslusif sehingga muncul konflik tentang tempat ibadah seperti sekarang yang menjadi isu nasional. Konflik antar agama di NTT, bisa juga muncul antara kelompok Protestan dan Katolik mengingat jumlah penganut dua kelompok ini agak berimbang, masing-masing sekitar 32,74 persen berbanding dengan 52,73 persen. *Kedua*, rendahnya tingkat penddikan dan keterampilah masyarakat, menyulitkan mereka untuk ikut bersaing dalam memperoleh atau memiliki akses-akses ke sentra-sentra sumberdaya sosial. Ketiadaan akses sumberdaya ini mengakibatkan kelompok lemah menjadi tidak berdaya melawan tekanan-tekanan sosial persaingan yang makin sengit. Muncul kemiskinan dan

ketimpangan sosial lainnya, dan pada gilirannya bisa berujung pada marginalisasi. Ketiga, sentimen kesukuan yang beragam dan relatif kental, ditambah otonomi daerah yang terkadang ditafsirkan menjadi “politik kedaerahan”, yang seakan –akan lepas dari kebijakan “politik nasional”, merupakan salah satu faktor yang dapat menyulut timbulnya konflik antar kelompok lintas suku maupun agama, khususnya konflik antar kelompok asli dan kelompok pendatang, di samping konflik antar suku setempat. Keempat, persaingan politik dan sosial yang senantiasa meningkat, banyaknya partai-partai politik yang terlibat persaingan, mendorong kelompok-kelompok kepentingan dan elit politik berupaya sekuat tenaga dan segala cara untuk memenangkan pertarungan, bila perlu dengan cara-cara yang tidak adil, tidak sesuai dengan aturan main seperti melakukan penekanan, pemaksaan, money politics dan sebagainya. Diperparah dengan praktek-praktek KKN yang terus berlangsung, membuat kondisi sosial masyarakat setempat menjadoi tambah keruh.

Tabel 2

Potensi Kerukunan dan Konflik di Nusa Tenggara Timur

Potensi Kerukunan	Potensi Konflik
1. Ikatan sejarah, budaya dan kekerabatan 2. Efektifitas pemerintahan dan	1. Inklusifisme agama dan suku 2. Melemahnya institusi lokal 3. Kesenjangan sosial , ekonomi, politik dan kemiskinan

ikatan kebangsaan 3. Konsolidasi internal kelompok keagamaan 4. Upaya Penyesuaian diri kelompok pendatang, toleransi penduduk lokal. 5. Dialog-dialog melalui Forum Komunikasi lintas agama dan etnik	4. Pengungsi korban kerusuhan Timor-Timur 5. Perbedaan paham dan sekte-sekte keagamaan 6. Budaya kekerasan kolektif 7. Dampak budaya global dan media massa

Kasus SARA

Selama kurun waktu 1990-2000, tidak kurang dari sembilan kasus konflik umat beragama setempat muncul ke permukaan yang sebagian besar merupakan konflik penodaan keagamaan dalam kelompok keagamaan di samping kerusuhan yang melanda umat Islam di Kupang. Sejumlah konflik keagamaan tersebut meliputi peristiwa-peristiwa berkut[4].

1. Pada tanggal 8 Desember 1990, terjadi pencemaran atau penodaan upacara kebaktian (Hostia) di gereja Katolik Noalin, Kabupaten Belu, Pelaku pencemaran bernama

[4] Choirul Fuad Yusuf, Konflik Sosial dan Reconsiliasi Nasional, sebuah Glosari, Harmoni, Balitbang Agama, 2002.

Sulaiman Kause seorang penganut Protestan, dijatuhi hukuman penjara empat tahun akibat perbuatannya.

2. Penodaan agama berupa pencemaran Hostia di gereja Katolik Bajawa, Kabupaten Ngada, terjadai 19 Januari 1992. Pelakunya Yusuf Ahmad beragama Islam, divonis dua tahun penjara.
3. Tanggal 10 Januari 1992, pencemaran Hostia di gereja St Maria Asumpta Kabupaten Kupang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, beragama Kristen Protestan.
4. Pencemaran Hostia tanggal 26 Desember 1993 terjadi di gereja Katolik Onekore, Kabupaten Ende. Muncul kemarahan amuk massa umat Katolik, mengakibatkan kantor Kejaksaan dan dua buah rumah dinas terbakar.
5. Penodaan agama berupa pencemaran Hostia kembali terjadi di gereja Katedral Christeragi Kabupaen Ende pada tanggal 8 Mei 1994, satu orang korban meninggal akibat amuk massa Katolik.
6. Pada tanggal 28 April 1995, kasus pencemaran Hostia di gereja Katolik Wairpelit Maumere, Kabupaten Sikka, tiga orang korban meninggal, 6 sepeda motor hancur, dan tiga kendaraan roda empat rusak berat akibat amuk massa.
7. Kasus pencemaran Hostia di gereja Katedral Renha Resari Larantuka Flores Timur, 11 Juni 1995. Massa Katolik mengamuk, satu orang korban meninggal dunia, puluhan kios, pertokoan, rumah makan (milik Muslim) disepanjang

jalan niaga di pinggir pantai dibakar massa. Turut terbakar sebuah losmen, sebuah rumah penduduk dan dua buah sepeda motor.

8. Pada tanggal 26 Desember 1995, pecah kembali kasus pencemaran Hostia di gereja Katedral Atambua, Kabupaten Belu dua orang korban meninggal akibat amuk massa.

9. Kasus kerusuhan amuk massa melanda umat Islam di Kupang pada tanggal 30 Nopember 1998 paling sedikit sebanyak 38 buah bangunan termasuk lembaga-lembaga keagamaan hangus terbakar. Sejumlah perumahan dan kios tempat usaha milik kelompok Muslim Bugis dan Makassar luluh lantak.

Penyebab Konflik

Berbagai konflik yang pernah berlangsung di NTT sebagaimana disebutkan di atas, tentu saja tidak bisa lepas dari kondisi dan situasi yang berkembang di lingkungan sosial setempat, baik yang bersifat lokal maupun eksternal. Berpedoman dari informasi yang diperoleh dari beberapa sumber berkenaan dengan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik sosial itu, secara umum dan garis besar seperti berikut.

Pertama, terdapatnya kesenjangan sosial, terutama kesenjangan sosial di bidang ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata. Rendahnya tingkat pendidikan dan

kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di pinggiran perkotaan dan di wilayah-wilayah pedalaman, merupakan beban dan tekanan sosial yang terlalu memberatkan bagi mereka. Dalam kondisi seperti itu mereka berada dalam keadaan serba tak berdaya dan sangat rentan terpancing oleh su-isu rawan seperti persoalan kesukuan, keagamaan dan sosial lainnya. Suatu peristiwa yang dipicu oleh tindakan atau prilaku perorangan berkembang dan dikembangkan menjadi isu kelompok dan massal.

Kedua, dari sejumlah perkembangan keagamaan di NTT, sudah sejak lama, terbilang sudah ratusan tahun, sejak kedatangan Portugis kemudian Belanda, terjadi persaingan perebutan pengaruh wilayah agama antara kelompok Katolik dan Protestan. Selain menjajah, kedua bangsa itu sekaligus juga membawa missi keagamaan masing-masing. Portugis dengan missi Katolik, sedangkan penjajah Belanda membawa missi Kristen Protestan. Persaingan perebutan wilayah agama antara dua kelompok tersebut, berlanjut setelah kemerdekaan dan terus berlangsung sampai sekarang, walaupun pada tahun 1918 sudah ada perjanjian Lisabon yang mengatur wilayah penyebaran ke dua kelompok agama antara Katolik dan Protestan.

Ketiga, seperti halnya masyarakat Indonesia bagian timur lain pada umumnya, kondisi sosial masyarakat NTT mempunyai banyak suku. Tiap suku mempunyai ikatan kekerabatan dan ikatan adat istiadatnya sendiri bnerdasarkan garis keturunan di lingkungan sub kelompok sukunya. Karena ikatan kesukuan ini relatif maih kental, maka sering

terjadi suatu konflik yang tadinya berasal dari konflik individual, berkembang dan dikembangkan menjadi konflik komunal. Peristiwa perkelahian anak-anak muda yang berlainan suku, dapat berkembang dan dikembangkan menjadi bentrokan kelompok penduduk antar kampung dan seterusnya.

Tabel 1

Bentuk Konflik, Penyebab dan Rekomendasi Konflik di Nusa Tenggara Timur

Bentuk Konflik	Penyebab Konflik	Rekomendasi
1. Tindak kekerasan kolektif, perusakan, pembakaran yang sering dipicu oleh kasus-kasus pencemaran Hostia atau penodaan agama (Atambua – Kefamenamu-Larantuka-Ende-Maumere-Sikka	1. Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik	1. Menyediakan lapangan kerja, memberantas pengangguran dan kemiskinan. 2. Pemerataan pembangunan terutama di pedesaan 3. Menghindari tindak kekerasan kolektif dalam politik dan sikap arogansi kekuasaan 4. Penegakan hukum dan pemberantasan KKN
	2. Melemahnya institusi-isntitusi lokal	1. Refungsionalisasi lembaga sosial budaya lokal 2. Partisipasi tokoh-tokoh lokal dalam proses

		pengambilan keputusan kepentingan publik
	3. Ekslusivitas keagamaan	1. Pengembangan wawasan multikultural 2. Sosialisasi nilai-nilai toleransi beragama dan kerukunan melalui lembaga-lembaga agama, pendidikan dan media lainnya 3. Meningkatkan aktifitas forum komunikasi dan proyek kerjasama sosial lintas agama

Penutup

Dari hasil penelusuran dan telaah yang dilakukan terhadap berbagai informasi terbatas yang dihimpun dalam kajian ini, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus konflik yang pernah muncul di lingkungan kehidupan umat beragama di wilayah Nusa tenggara Timur, diperoleh beberapa temuan yang bersifat pokok-pokok secara umum seperti berikut.

1. Konflik sosial yang berbentuk kerusuhan massal merupakan fenomena yang sangat kompleks. Penjelasan persoalan ini tidak mungkin menggunakan perspektif tunggal, karena banyak sekali faktor kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya, baik politik, ekonomi, sosial, etnisitas maupun agama.

2. Masyarakat pedesaan yang tinggal di pedalaman maupun yang pindah ke tempat-tempat pinggiran perkotaan sebagian besar relatif rendah tingkat pendidikannya dan tidak memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan pembangunan yang dlancarkan pemerintah. Akibatnya fasilitas fisik dan perkembangan material hasil pembangunan yang dilancarkan pemerintah, hanya mampu dijangkau dan dinikmati oleh hanya sebagian kecil elit kelompok pemilik modal, kelompok professional dan kelompok penguasa, sementara kebanyakan masyarakat makin terpinggirkan. Hanya sedikit saja hasil pembangunan yang bisa mereka nikmati. Hal ini menyebabkan timbulnya jarak dan kesenjangan sosial yang merongrong tatanan hubungan sosial antar sesama warga negara yang berujung pada munculnya keresahan, kegalauan dan ketegangan serta kerawanan-kerawanan termasuk kerawanan di lingkungan umat beragama.
3. Persaingan perebutan dan penyebaran wilayah keagamaan antara kelompok Katolik dan Protestan bermula sejak zaman penjajahan Portugis dan Belanda. Selain melakukan penjajahan, kedua bangsa tersebut sekaligus juga membawa missi keagamaan. Portugis dengan missi Katolik, sedangkan Belanda membantu penyebaran Kristen Protestan di NTT. Persaingan tersebut berlanjut selepas penjajahan, bahkan sampai sekarang dalam bentuk persaingan memperebutkan dan mempertahankan wilayah pengaruh keagamaan,

termasuk persaingan perebutan sumber-sumber daya ekonomi, politik dan sosial. Dalam suatu persaingan, lazim lantas muncul berbagai problem yang mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial yang melibatkan umat beragama masing-masing kelompok. Pada gilirannya ketegangan sosial tersebut berbuah menjadi konflik bahkan kerusuhan sosial. Tambahan pula pengajaran resmi melalui lembaga-lembaga pendidikan ternyata lebih fokus pada penekanan keyakinan keagamaan masing-masing kelompok yang dapat berdampak pada peningkatan militansi dan eksklusifitas kelompok keagamaan masing-masing. Muatan kurikulum pengajaran agama di sekolah-sekolah, sangat kurang menekankan hal-hal yang mendorong toleransi beragama.

4. Terkait dengan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan dan keagamaan ini, hendaknya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit, aktual terprogram, terarah dan kontinu, lebih sungguh-sungguh berupaya melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang, khususnya dalam rangka meningkatkan martabat kehidupan sosial masyarakat setempat, lepas dari belitan kepapaan dan kebodohan yang menghimpit masyarakat. Kesempatan dan peluang yang memungkinkan masyarakat lapisan bawah ikut memiliki akses-akses ke sumber-sumber daya yang menopang kehidupan sosial mereka, merupakan sesuatu yang sudah sangat mendesak kebutuhannya.

5. Pengajaran keagamaan di sekolah-sekolah hendaknya lebih banyak berisi penekanan pada toleransi beragama, kerjasama yang bersifat kemanusiaan menyangkut kepentingan umum setiap warga negara, serta upaya ke arah pengembangan komunikasi dan interaksi sosial budaya multicultural sesuai dengan corak masyarakat kita yang serba majemuk.
6. Mengkaji ulang produk-produk menyangkut kehidupan beragama pada umumnya, dan produk hukum tentang kerukunan hidup umat beragama khususnya. Sementara itu dialog-dialog yang bersifat multikultural lintas suku, agama, latar budaya, profesi dan lintas generasi, perlu senantiasa makin digalakkan

Pustaka Rujukan

Atho Mudzhar, *Konflik Etno-Religius Indonesia Kontemporer*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

Choirul Fuad Yusuf, *Konflik Sosial dan Reconsiliasi Nasional*, sebuah Glosari, Harmoni, Balitbang Agama, 2002.

Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

(VII)

MALUKU UTARA

Kondisi Umum Wilayah

Propinsi Maluku Utara yang terbentuk tanggal 16 September 1999 mempunyai wilayah seluas 2.269.840 kilometer bujur sangkar,, pada awalnya terbagi ke dalam tiga wilayah pemerintahan kabupaten/kota, masing-masing: Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate, meliputi 27 kecamatan, 698 kelurahan/desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 825.533 jiwa jiwa (Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2001).

Seperti masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Maluku Utara meliputi beragam suku/etnis, budaya dan keyakinan agama. Menurut Agus Salim Bujang Dosen STAIN Ternate, mobilitas sosial suku-suku tersebut menyebabkan mereka hidup berpencar atau menyebar dan mengelompok serta saling membaur dengan warga lain yang berbeda-beda suku dan keyakinan agama dalam suatu wilayah pedesaan atau kecamatan di lingkungan Halmahera atau Maluku Utara. Kawin-mawin sesama Muslim baik intern maupun antar suku, bahkan perkawinan antar penganut agama berbeda – meskipun langka – sehingga salah satu pihak ada yang pindah agama mengikuti agama suami/isterinya. Sampai sekarang di Maluku Utara mash terdapat ikatan kekerabatan antara warga

Muslim dan Kristen, baik melalui perkawinan maupun garis keturunan.

Beberapa suku yang besar dan berpengaruh di Maluku Utara meliputi etnis Makian, Tidore, Sanana, Ternate, dan etnis Halmahera Utara yang terdiri dari suku Galela dan Tobelo. Berbeda dengan empat etnis (Makian, Tidore, Sanana, Ternate) yang seluruhnya Muslim, Halmahera Utara sebagian besar penduduk (68%) beragama Kristen, sisanya lebih kurang 30 % Muslim,. Dan lainnya Hindu serta Buddha. Dalam satu marga yang sama di Halmahera Utara terdapat keluarga campuran, sebagian keluarga beragama Kristen, sementara sebagian lagi penganut Islam.

Selain beberapa etnis dominan yang merupakan penduduk asli Maluku Utara, juga terdapat etnis yang berasal dari Sulawesi, Jawa, Sumatera serta Cina. Diduga sekitar 70% sektor perdagangan dikuasai etnis Cina dan sisanya oleh etnis Bugis, Makasar, Tidore dan Minang. Menurut penuturan Rivai Umar (Dosen Universitas Khairun) para pendatang Jawa terkonsentrasi di sektor tanaman pangan, khususnya di lokasi transmigrasi di samping sektor informal lain selaku penjual bahan makanan di beberapa kota.

Etnis Bugis – Makasar, cukup dominan di sektor perdagangan terutama di lingkungan pasar-pasar serta sektor angkutan, khususnya angkutan darat. Etnis Buton relatif berhasil sebagai petani di pulau Obi sekaligus juga sukses dalam usaha transportasi laut. Sementara etnis Gorontalo cukup eksis sebagai pedagang pakaian jadi bersama-sama

etnis Bugis – Makasar di pasar-pasar. Selanjutnya Etnis Minahasa, Sangir Talaud yang datang dari Sulawesi Utara, lebih terkonsentrasi di bidang-bidang pertukangan, pedagang, pekerja, dan sektor pertanian khususnya di perkampungan Kristen.

Secara keseluruhan, umat Islam di daratan Halmahera lebih cepat beradaptasi antara satu dengan lainnya tanpa memandang etnis. Perilaku adaptasi tersebut melahirkan dinamika hidup yang terus berkembang. Sukses di sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan lainnya, mendorong dan memberikan peluang bagi kelompok Muslim untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui beragam jalur dan jenjang pendidikan. Kesuksesan di bidang pendidikan tersebut, menopang kelompok Muslim setempat memegang peranan dan menempati posisi-posisi penting di pemerintahan dalam tahun-tahun terakhir ini yang pada tahun sebelum 1970-an lebih banyak didominasi kelompok Kristen[51]. Keberhasilan dan dominasi kelompok Muslim ini diduga merupakan salah satu akar permasalahan terjadinya kerusuhan di Maluku Utara.

Di samping itu menurut Tamrin Amal Tamagola, di Maluku sejak dari pulau Morotai dan Halmahera di Maluku Utara sampai dengan pulau-pulau Kai dan Tanimbar di Maluku Tenggara rakyat bertempat tinggal mengelompok menurut suku dan agama. Satu desa eksklusif suku dan

---

[51] Rivai Umar, *Menelusuri Jejak Konflik Halmahera Utara*, Kelompok Studi PODIUM, Madina Press, 2000.

agama tertentu. Bahkan dalam satu kecamatan di sana, bisa ditemukan kecamatan eksklusif satu suku atau agama tertentu dengan beberapa kantong perkampungan dari suku dan agama yang berbeda[52].

Sehubungan dengan persoalan segregasi pola pemukiman penduduk tersebut ditambahkan oleh Rivai Umar antara lain; di Kota Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Bacan, Obi dan Kepulauan Sula serta Morotai, umumnya didominasi oleh desa-desa Muslim. Sementara di daratan Halmahera Utara yang terdiri dari delapan kecamatan dan 258 desa, sebagian besar yakni lebih kurang 62 % merupakan desa Kristen. Selebihnya desa Muslim 27 %, dan 11 % lainnya merupakan desa campuran. Untuk lebih jelas tentang pola pemukiman ini digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Pola Pemukiman Menurut Agama di Halmahera Utara [53]

No	Kecamatan	Desa Muslim	Desa Kristen	Desa Campuran	Jumlah
1	Jailolo	17	25	5	47
2	Kao	2	36	-	38
3	Sahu	5	22	1	28
4	Ibu	7	29	-	36
5	Tobelo	2	16	7	25

[52] Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesi*a, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

[53] Sumber : Kasman Ahmad dkk, *Damai yang Terkoyak, Catatan Kelompok Dari Bumi Halmahera*, 2000. Keterangan : Tidak termasuk Transmigran dari Jawa.

6	Galela	6	8	13	27
7	Loloda	10	23	4	37
8	Makian	20	-	-	20
	Jumlah	69	159	30	258

Potensi Kerukunan

Selain beragam potensi konflik seperti di atas, juga terdapat sejumlah faktor yang dipandang sebagai hal-hal menmguntungkan bagi upaya pembinaan kerukunan. Hubungan sosial kemasyarakatan yang rukun dan penuh kekeluargaan sebelum pecah kerusuhan, selalu terpelihara, baik antar warga maupun antar kelompok keagamaan. Hal ini ditopang beberapa aspek seperti kearifan budaya lokal, ikatan bernegara (nasionalisme) penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan dan sebagainya.

1. Kearifan Budaya Lokal

Masyarakat Maluku Utara yang terdiri dari beragam macam suku dan bahasa lokal, menurut catatan sejarahnya merupakan wilayah beberapa monarki yang cikal-bakalnya satu keturunan atau bersaudara. Ada empat kesultanan yang terikat partalian darah, Jailolo – Tidore – Bacan – dan Ternate yang disebut Maluku Kie Raha, penguasa empat gunung atau empat negeri. Ibnu Batutah menyebut kawasan ini sebagai tanah Raja-raja (jaziratul Mulk).

Dalam falsafah lokal setempat, empat raja bersaudara tersebut dianggap sebagai konfigurasi atau paduan empat

unsur pembentukan manusia yakni udara yang dilekatkan pada Jailolo – air untuk Tidore – tanah untuk Bacan – dan unsur api dilekatkan pada si bungsu Ternate. Selain penguasa Kie Raha, ada raja-raja kecil seperti Loloda, Morotai, Morotia dan Obi. Penyatuan kawasan ini dikukuhkan dalam konferensi raja-raja para tahun 1322. Setelah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku, akhirnya status Maluku Utara dijadikan propinsi di penghujung masa pemerintahan Haibie (1999)[54]. Dengan demikian masyarakat Maluku Utara yang sekarang sangat majemuk menurut suku, bahasa agama tersebut, masih mempunyai ikatan sejarah dan pertalian darah yang kental, merupakan salah satu potensi bagi upaya kerukunan. Lembaga kesultanan yang secara kultural sampai sekarang masih eksis seperti Bacan, Tidore dan Ternate dengan gezag dan pengaruh terhadap masyarakat pendukungnya masing-masing, bila tidak disalahgunakan untuk kepentingan politis sesaat, sangat mungkin dimanfaatkan sebagai pemersatu dan integrasi masyarakat serta upaya kesejahteraan sosial masyarakat lintas agama, etnis dan budaya.

2. Ketergantungan Sosial

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugas-tugas keseharian masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, terdapat saling ketergantungan sosial antar warga yang berbeda-beda suku, agama, status,

---

[54] Iqbal Setyarso, *Empat Potret Halmahera*, 2000.

profesi dan seterusnya. Saling ketergantungan dari saling berinteraksi yang berlangsung secara alamiah ini di lingkungan masing-masing merupakan proses yang efektif untuk mencairkan ketegangan, kecurigaan, permusuhan dan menjalin kembali kebersamaan antar warga seperti di tempat kerja, di pasar, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat.

Keberadaan tokoh-tokoh yang aktif di berbagai kesatuan sosial (croos – cutting affiliations) bisa membantu menetralisir suasana bila timbul konflik. Selain itu, dari kerusuhan yang berkecamuk di samping meninggalkan trauma, masyarakat sekaligus juga memperoleh pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan kehabisan energi untuk meneruskan pertikaian kembali.

3. Rasa Nasionalisme

Keterikatan setiap warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari merupakan salah satu media penting untuk memupuk rasa kebersamaan dan menetralisir sikap etnosentris, streotype kelompok etnis, agama secara berlebihan. Pendidikan nasionalisme melalui berbagai media terhadap segenap lapisan masyarakat perlu lebih digalakkan dan diberikan porsi perhatian yang lebih serius.

Potensi Konflik

Dalam setiap konflik komunal biasanya terdapat berbagai aspek kontektual yang berpengaruh dan memudahkan terjadinya konflik (facilitating contexts). Berbagai faktor baik yang bersifat lokal maupun eksternal saling terkait dan tumpang tindih yang merupakan sumbu pembakar yang mudah disulut dan berkembang menjadi konflik dan ledakan kerusuhan.

1. Isu Kristenisasi Maluku Utara

Isu tentang adanya usaha Kristenisasi Maluku Utara, mencuat dalam masyarakat, khususnya kelompok Muslim seiring dengan gerakan kelompok mayoritas Kristen Kao merangsek keluar warga Muslim dari Malifut. Halmahera Utara akan dijadikan basis dan sentra Kristenisasi Maluku Utara. Isu tersebut makin kental melekat dalam masyarakat tatkala ditemukan dokumen yang berjudul "Sosol Berdarah" yang berisi skenario pembantaian suku Makian Malifut. Beberapa lembar surat dalam bentuk copyan yang memuat upaya Kristenisasi Maluku Utara ditemukan dalam rumah keluarga Kristen di desa Kayu Merah dan Ubo-Ubo Ternate. Ketika meledak pertikaian tangalo 6 Nopember 1999 di Ternate[55].

Tokoh-tokoh Kristen dan pihak Gereja, membantah dokumen "Sosol Berdarah" tersebut berasal dari Gereja

[55] Kasman Hi Ahmad, Herman Oesman, Damai Yang Terkoyak, Cacatan Kelam dari Bumi Halmahera, 2000.

Masehi Injil Halmahera (GMIH)[56]. Kemudian suasana keruh tersebut menjadi makin parah oleh pernyataan Benny Doro di hadapan Komandan Sektor Lektol Sutrisno yang dikutip berbagai media nasional – meskipun kemudian dibantahnya sendiri – bahwa ia mengharamkan kehadiran kembali umat Islam di Halmahera Utara[57].

Pertikaian yang berlarut-larut ditambah berbagai isu yang tidak sedap seperti di atas mengakibatkan hancurnya jalinan rasa saling percaya, saling menghormati dan rasa kebersamaan yang terbina secara turun temurun sebelum kerusuhan. Lebih jauh hilangnya saling kepercayaan yang merupakan modal dasar paling vital dalam berkomunikasi antar sesama ini, tentu saja akan sangat menyulitkan upaya ke arah rekonsiliasi.

2. Segregasi Pemukiman

Seperti dikemukakan sebelumnya di Maluku Utara, warga setempat banyak yang bermukim mengelompok menurut suku dan agama, satu desa tertentu secara eksklusif terdiri dari warga yang berasal dari suku dan agama tertentu. Bahkan dalam satu kecamatan di Maluku Utara bisa ditemukan kecamatan eksklusif satu suku atau agama tertentu dengan beberapa kantong perkampungan dari suku dan agama yang berbeda.

Konsentrasi pemukiman menurut suku atau agama ini, tentu saja sangat memudahkan dan menguntungkan bagi

---

[56] Tabloit Adil, No. 11, tanggal 10 – 16 Desember 1999

[57] Ternate Pos, 29 Februari – 6 Maret 2000.

upaya pembinaan internal (konsolidasi) kelompok suku dan agama masing-masing. Mudah menarik garis pemisah antara *ingroup- outgroup* antara kelompok suku atau agama yang satu dengan kelompok lain yang berbeda agama atau suku, atau antar desa yang berbeda suku dan agama. Orientasi kelompok suku atau agama bisa menyebabkan menipisnya sikap keterbukaan dan solidaritas sosial antar kelompok yang berbeda. Bila sewaktu-waktu terjadi konflik atau kerusuhan antar kelompok, rasa permusuhan, gampang ditularkan secara massal di lingkungan internal masing-masing kelompok, sekaligus juga sangat gampang menentukan dan memilih kelompok lain yang ingin dijadikan target sasaran pertikaian.

3. Persaingan Agama

Dalam masyarakat yang terbuka dan majemuk, khsusnya majemuk dalam beragama, baik secara terselubung maupun terbuka terjadi persaingan antar lembaga-lembaga keagamaan lokal dalam upaya meningkatkan jumlah pengikut dan memperluas teritori serta peran agama. Pewrsaingan antara Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) dengan lembaga-lembaga Islam setempat sudah berlangsung sejak GMIH didirikan satu setengah abad silam.

Persaingan agama ini secara nasional tercermin antara lain pro-kontra sikap khususnya antara kelompok Muslim dengan Kristen terhadap UU Diknas yang mengharuskan setiap lembaga pendidikan/sekolah melaksanakan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agama siswa. Demikian pula pro-kontra terhadap SKB No. 1/1999 yang antara lain berisi

ketentuan pendirian rumah ibadah yang akhir-akhir ini sangat gencar dilancarkan kelompok Kristen. Beberapa waktu yang lalu juga pernah muncul polemik di media massa mengenai pro-kontra perlu tidaknya Undang-Undang Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Di satu sisi kelompok Kristen antara lain beranggapan bahwa masalah agama merupakan wilayah privat setiap warga yang tak perlu diatur pemerintah. Sementara di sisi lain kelompok Muslim berpendapat bahwa yang diatur itu bukan soal keyakinan atau ajaran agama tapi menayngkut hubungan, interaksi, kebersamaan dan saling keterkaitan kepentingan antar sesama umat beragama selaku warga negara yang bila tidak diatur dikhawatirkan munculnya sikap anarkhis masyarakat yang dapat memicu konflik-konflik yang tidak perlu.

4. Kelompok Pendatang

Para pendatang di Maluku Utara berasal dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sangir Talaud, Jawa dan Minang. Selain migran dari Sangir Talaud yang Kristen Protestan, para migran lainnya pada umumnya Muslim yang berbaur dengan 87 % Muslim penduduk Maluku Utara di beberapa wilayah seperti Tobelo, Ternate, Masahi, Tual dan lainnya. Sementara pendatang dari Sangir Talaut bermukim di desa Makate dan desa Galela.

Secara umum kedatangan migran Muslim yang berbaur dengan muslim setempat tidak menimbulkan gejolak. Berbeda dengan para migran yang berasal dari Sangir Talaud

yang berada di Galela yang mayoritas Muslim. Menurut Tamrin Amal Tamagola, paling kurang pernah terjadi dua gejolak lokal yaitu para tahun 1955 ketika terjadi pemberontakan DI-TII dan pada saat G 30 S PKI 1965 terjadi konflik terselubung bernuansa agama dan suku antara pendatang Protestan dengan Muslim lokal.

Selain itu, kehadiran para migran tersebut apalagi dalam jumlah yang banyak sering dianggap oleh penduduk asli setempat, bisa mempersempit ruang gerak penduduk asli setempat. Keberhasilan para migran di bidang ekonomi khususnya di bidang pertanian dan perdagangan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan warga Kristen setempat terhadap kelompok Muslim.

5. Erosi Budaya Lokal

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang menyeragamkan tatanan kehidupan sosial di pedesaan di seluruh Indonesia, mengakibatkan mandulnya lembaga-lembaga tradisional pedesaan. Perangkat desa lebih loyal dan berorientasi ke atas dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan tatanan sosial tradisional yang berlaku sebelumnya secara turun temurun. Budaya lokal sering ditafsirkan sebagai hal yang tidak sesuai dengan masyarakat modern termasuk juga tidak selaras dengan ajaran agama. Oleh karena itu untuk mengembangkan kehidupan sosial dan keagamaan yang lebih maju sesuai dengan perkembangan modernisasi, kearifan dan budaya lokal banyak ditinggalkan dan tergusur dari kehidupan sosial keseharian masyarakat

setempat. Tergusurnya budaya dan kearifan lokal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas, seperti budaya “Hibua Lamo (rumah besar) yang merupakan simbolisasi paguyuban sosial masyarakat Tobelo- Galela yang melintasi batas-batas iman dan suku yang sebelumnya sangat bermanfaat buat kerukunan, kini menjadi mandul lebih kurang senasib dengan Pela Gandong di Ambon. Mandulnya budaya dan kearifan lokal ini, lebih jauh menyebabkan renggangnya ikatan kekeluargaan, kebersamaan serta menipisnya kepercayaan masyarakat dan efektifitas pemerintahan.

6. Persaingan Politik

Suasana reformasi pemekaran wilayah dan status pemerintahan, otonomi daerah, banyaknya partai-partai politik, banyak memicu persaingan dalam memperebutkan sentra-sentra kekuasaan. Jabatan dan peran-peran penting di daerah dijadikan ajang persaingan yang terkadang berlangsung sengit, nakal bahkan liar tanpa menghiraukan rambu-rambu dan kesantunan berpolitik. Kesemuanya itu berakibat bermunculan konflik-konflik politik yang kurang sehat. Masing-masing pihak berusaha mendulang-dukungan massa dengan segala cara demi kepentingan individual dan kelompoknya, tanpa menghiraukan bagi kepentingan umum. Suasana yang kurang kondusif bagi kerukunan akibat persaingan politik ini, diperparah oleh upaya penegakan supremasi hukum yang masih tumpul dan praktek-praktek KKN yang masih terus berlangsung.

Tabel 2

Potensi Kerukunan dan Konflik di Maluku Utara

Potensi Kerukunan	Potensi Konflik
1. Latar belakang sejarah yang berasal dari satu keturunan 2. Ikatan kekerabatan dan pertalian darah antar warga yang berbeda suku dan agama 3. Kearifan budaya lokal seperti Hibualamo dan lembaga kesultanan, adat. 4. Ajaran agama dan pengaruh tokoh-tokoh agama 5. Pengalaman dan pelajaran berharga dari kerusuhan serta kehabisan energi untuk meneruskan pertikaian. 6. Efektifitas pemerintahan dan aparat keamanan menghenti-kan kerusuhan fisik 7. Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penggunaan bahasa nasional dalam berkomunikasi sehari-hari.	1. Kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan, politik 2. Sentimen etnosentris dan relogiosentrisme yang sempit. 3. Tumpulnya penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN, menggerogoti wibawa pemerintahan 4. Masyarakat yang rawan isu akibat tingkat pendidikan relatif rendah 5. Persaingan kurang sehat di kalangan elit lokal 6. Tergusurnya fungsi dan peran lembaga-lembaga dan para tokoh tradisional 7. Merebaknya budaya kekerasan 8. Dampak globalisasi dan media massa yang sering mengekspose nuansa paradigma pro-kontra, terkadang partisan, nakal dan liar. 9. Konsentrasi penduduk menurut suku dan agama di tempat-tempat pemukiman 10. Trauma mendalam dan frustasi berkepanjangan akibat kerusuhan 11. Fungsi-fungsi keamanan yang belum maksimal lantaran terbatasnya sumberdaya, kemampuan, sarana, prasarana, tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerusuhan dan tingkat kesulitan di lapangan

Bentuk Konflik

Menurut penuturan Yusnirsyah Sirin dan tokoh-tokoh setempat, sebelum kerusuhan, kehidupan sosial yang damai dan rukun antara komunitas Kristen dan Islam di Maluku Utara sudah terjalin sangat kental dan pekat. Saking ingin memelihara dan mewujudkan kerukunan, terdapat kelaziman di kalangan warga Kristen setempat untuk tidak menyembelih sendiri ternak yang akan dimasak dan dimakan bersama warga Muslim. Mereka (warga Kristen) minta bantuan warga muslim supaya hewannya dipotong secara Islam, baru kemudian dibawa pulang untuk dimasak. Sebaliknya pada saat awal Ambon rusuh, ketika perayaan Natal berlangsung, para pemuda Muslim secara tulus menjaga keamanan sekitar.

Karenanya banyak kalangan sangat tercengang dan terheran-heran, sekaligus terguncang tatkala kerusuhan berkembang dan menjelma menjadi ajang pembantaian tak berprikemanusiaan, saling membunuh hancur-hancuran, bertaburan fitnah dan mengumbar nafsu angkara. Amat sulit dicerna akal sehat, suasana dan kondisi kehidupan sosial yang tadinya nyaman, akrab dan rukun yang sudah terjalin sangat kental turun-temurun melalui ikatan sejarah, tali kekerabatan, garis keturunan, kearifan budaya lokal yang mendalam, serta ikatan kebangsaan secara tiba-tiba dalam waktu sangat singkat serta-merta semuanya terjungkir-balik seratus delapan puluh derajat berubah menjadi arena peperangan dan permusuhan teramat sengit, penuh kobaran nafsur angkara, penghinaan, penyiksaan, penghianatan, membunuh dan

menghabiskan sesama warga yang dianggap lawan dan dibikin menjadi musuh .

Kehidupan sosial antara komunitas Kristen dan Islam di Maluku Utara yang harmonis dan rukun, mulai terganggu dan menjadi kacau setelah warga Malifut yang muslim dirangsek paksa sehubungan dengan penolakan kelompok Kristen terhadap pemberlakuan PP 42/99, tentang status definitif kecamatan Malifut. Menurut Tamrin Amal Tamagola (Tragedi Maluku Utara)[58], Kecamatan Malifut yang seyogyanya diresmikan itu terdiri dari 16 desa suku Makian pendatang beragama Islam – 5 desa suku asli Kao dan 6 suku asli Jailolo yang mayoritas beragama Kristen. Kalompok Kristen menolak lantaran bila kecamatan Malifut yang meliputi 27 desa tersebut jadi dibentuk, maka kelompok Kristen yang merupakan suku asli, akan merupakan minoritas dibandingkan kelompok muslim suku Makian pendatang.

Penolakan tersebut mengakibatkan terkatung-katungnya status wilayah Malifut dan mencemaskan masyarakat pendatang Suku Makian, baik yang berada di Malifut maupun yang bermukim di kota Ternate. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1999 terjadi pertikaian di Malifut yang dipicu oleh kerkelahian antar anak-anak muda yang berbeda suku dan agama. Saling serang menyerang antara dua kelompok yang bertikai ini berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1999. Akibat kerusuhan tersebut menimbulkan

[58]Tamrin Amal Tumagola, *Tragedi Maluku Utara, Konflik Sosial, Demokrasi dan Rekonsiliasi*, Badan Litbang Agama, 2000.

korban jiwa dan harta terhadap pihak-pihak yang terlibat. Arus pengungsi suku Makian – Malifut mengalir ke Ternate dan Tidore sejak 20 sampai 25 Agustus 1999. Kerusuhan tersebut berhasil diredam berkat kerjasama Pemda setempat, para tokoh masyarakat dan Sultan Ternate. Penyelesaian yang dilakukan hanya terbatas para penghentian pertikaian tanpa menyentuh dan menyelesaian, akar permasalahan. Perhatian para pejabat, tokoh dan elit masyarakat setempat, lebih terkonsentrasi pada persoalan pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi daerah propinsi.

Kemudian, pada tanggal 24 Oktober 1999 sampai awal tahun 2000, muncul lagi serentetan kerusuhan yang lebih besar, lebih lama dan meluas ke berbagai daerah di lingkungan Maluku Utara. Kerusuhan gelombang ke dua ini mengakibatkan skala kerusakan jauh lebih besar dari kerusuhan sebelumnya. 16 desa suku Makian yang Muslim, diratakan dengan tanah, kebun cengkeh dan kelapa dibabat habis. Akibat kerusuhan secara keseluruhan meliputi ribuan manusia menjadi korban, harta benda yang bernilai ratusan milyar rupiah ludes puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke berbagai tempat atau wilayah termasuk mengungsi ke Manado dan Bitung di Sulawesi Utara.

Selain korban pisik yang besar, kerusuhan tersebut ,mengakibatkan rontoknya tatanan kerukunan dan pupusnya rasa saling percaya antara dua kelompok yang bertikai. Rasa sakit hati, perih, pedih, cemas, ngeri, dendam dan frustasi, bergumpal menjadi satu, menyebabkan trauma

berkepanjangan khususnya terhadap para korban kerusuhan. Menghilangkan trauma dan membangun kembali saling kepercayaan antara dua komunitas yang berbeda agama ini, jauh lebih sulit daripada membangun kembali korban pisik. Membenahi faktor-faktor psikologis yang hancur berantakan akibat kerusuhan, merupakan beban yang beratnya berlipat-lipat. Penanganannya memerlukan proses yang panjang, kerja keras, kesabaran, keseriusan, dan kearifan semua pihak secara terus menerus, terutama oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan kerusuhan ini, Pemda setempat mencanangkan langkah dan program yang disebut dengan singkatan 3 R meliputi : 1) rehabilitasi yaitu memperbaiki dan membangun kembali rumah-rumah penduduk yang menjadi korban kerusuhan, gedung sekolah, rumah ibadah dan Sarana Publik; 2) Repatriasi yakni serangkaian program yang bertujuan mengembalikan para pengungsi ke tempat asal dengan kesiapan tempat tinggal serta keamanan, dijamin oleh pemerintah; 3) Rekonsiliasi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi kerukunan dan kedamaian secara kontinyu di lingkungan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Secara umum kondisi terakhir Maluku Utara sekarang makin membaik, kerusuhan sudah reda, kehidupan sosial dan roda pemerintahan sehari-hari makin normal. Hal tersebut tercapai berkat kerjasama pemerintah, aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat serta dukungan politis dari berbagai kalangan, baik pusat maupun daerah. Selain itu faktor yang terpenting yang mendukung tercipta suasana kedamaian itu

adalah adanya kesadaran dan keinginan damai dari kelompok yang bertikai sendiri yang mungkin sudah kelelahan dan kehabisan energi serta amunisi untuk meneruskan pertikaian.

Namun begitu seperti juga di tempat yang pernah rusuh lainnya, kerusuhan yang sudah mereda di Maluku Utara ini masih ,minyisakan beragam persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dan masyarakat setempat, khususnya persoalan pengungsi yang masih berada di tempat penampungan sementara, serta ihwal rehabilitasi mental masyarakat yang mengalami trauma akibat kerusuhan.

Berkenaan dengan masalah mengungsi yang masih belum kembali ke tempat asalnya, diungkapkan oleh para pejabat dan tokoh masyarakat setempat antara lain lantaran; 1) Belum tersedia atau masih terbatasnya rumah penampungan dan sarana publik yang pendukung (seperti listrik, air, transportasi) agar korban pengungsi bisa segera mulai mengukir kehidupan keluarga secara normal kembali; 2) Sebagian pengungsi merasa enggan kembali ke tempat asal karena trauma akibat kerusuhan dan ragu terhadap jaminan keamanan. Selain itu ada pula sementara pengungsi yang memang tidak berkeinginan kembali lantaran sudah mendapatkan sumber nafkah di tempat baru, atau pulang kampung, serta ada juga yang ditampung atau mendapat bantuan dari anggota kerabatnya; 3) Pendataan pengungsi yang kurang rapih, tidak utuh serta kinerja aparat yang terkesan kurantg serius tentang masalah ini, mengakibatkan timbulnya berbagai hambatan dalam upaya penanganannya.

Penyebab Konflik

Awal pertikaian Maluku Utara bermula di kecamatan Malifut, kemudian merembet dan meluas sehingga secara geografis kerusuhan meliputi wilayah Halmahera Utara, Halmahera Tengah – dan kota Ternate. Beberapa hal yang dipandang sebagai akar masalah atau penyebab utama terjadi kerusuhan menurut Tamrin Amal Tamagola meliputi persoalan-persoalan antara lain perebutan wilayah agama, persaingan penguasaan suber daya ekonomi dan persaingan politik.

1. Persaingan Wilayah Agama

Persaingan perebutan pengaruh wilayah agama antara komunitas Islam dan kristen setempat, telah berlangsung sejak lama, lebih dari seratus lima puluh tahun silam, sejak Utreche Zending Genootschop (UZG, Perhimpunan Zending Utrecht) mengirim misi Kristen ke Halmahera Utara. Pada tanggal 14 April 1866 sejumlah pendeta UZG yang dipimpin HH Bode dan Van Dijken tiba di Galela dan Tobelo bertujuan melakukan upaya Kristenisasi di wilayah Maluku Utara yang umumnya beragama Islam di bawah pengaruh kesultanan setempat (Ternate – Tidore – Bacan – Jailolo)[59].

Persaingan antar lembaga-lembaga agama lokal baik dalam upaya memperbesar pengaruh, memperbanyak pengikut maupun memperluas teritori agama, terus berlangsung sampai menjelang kerusuhan bahkan sampai

[59] Adnan Amal, *Sejarah Islam – Kristen di Halmahera Utara*.

sekarang. Persaingan terjadi misalnya antara Gereja Protestan Maluku dengan Majelis Ulama Indonesia serta Ormas-ormas Islam seperti NU- Muhammadiyah. Begitu pula antara Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) dengan lembaga-lembaga Islam setempat[60].

Selain itu pada tahun 1975 atas dasar pertimbangan para pakar bahwa gunung "Kie Besi" akan meletus, melalui SK Pemda No. 9/10/1/MU/75, rakyat sekitar gunung yang meliputi 16 desa suku Makian melakukan bedol desa dan dimukimkan di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Malifut bagian selatan Halmahera Utara. Kelompok Kristen merasa keberatan dan menolak penggabungan 16 desa Makian yang muslim dengan 11 desa penduduk asli yang Kristen ke dalam Kecamatan Malifut. Penggabungan tersebut menurut kelompok Kristen akan merubah komposisi penduduk menurut agama sehingga mereka menjadi kelompok minoritas, sekaligus juga akan menyumbat gerak ekspansi mereka ke Halmahera Tengah dan Selatan.

2. Sumber Daya Ekonomi

Kesenjangan sosial – ekonomi antara kelompok Muslim dan Kristen yang tumpang tindih dengan batas-batas sentimen agama dan suku tersebut, kemudian diperparah dengan ditemukan dan eksploitasi tambang emas di Malifut yang secara kebetulan berada di desa-desa penduduk asli suku Kao. Karena itu penolakan penduduk asli terhadap PP 42/99, disamping dilatarbelakangi oleh pertimbangan

---

[60] Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik di Indonesia*.

kuantitas antar umat beragama, juga didorong oleh keinginan memonopoli berkah tembang emas yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kecamatan Kao. Penolakan kelompok Kristen terhadap PP 42/99 ini mengakibatkan terkatung-katungnya status definitif kecamatan Malifut dan meresahkan kelompok Muslim.

Persaingan Politik

Dari latar belakang sejarahnya, di Maluku Utara terdapat persaingan hegemoni politis antara kesultanan Ternate di satu pihak dengan kesultanan Tidore dan Bacan di pihak yang lain. Masing-masing kesultanan mendapat dukungan dari suku-suku yang berbeda. Sehubungan dengan peningkatan status Maluku Utara menjadi propinsi terjadi persaingan dalam perebutan jabatan Gubernus. Di satu pihak Sultan Ternate yang dudukung suku-suku di Halmahera Utara yang beragama Kristen dan suku Ternate Utara yang Muslim, berhadapan dengan tokoh suku Makian (Thaib Armain) yang mendapat dukungan dari suku-suku Makian, Kayoan dan Tidore yang Muslim.

Dalam konflik Maluku Utara, Sultan Ternate secara cerdik mencari dukungan politis dengan tampil sebagai pembela kelompok Kristen. Perhatian dan bantuan banyak diberikannya kepada pengungsi Kristen baik ditampung di Bitung – Manado, maupun di Tobelo. Sementara pengungsi Muslim suku Makian yang tersebar di Ternate, Tidore dan Makian diabaikannya. Tentang bentuk konflik, penyebab dan

bagaimana cara solusi disarankan penelitian ini, kiranya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Bentuk Konflik, Penyebab dan Rekomendasi Konflik di Maluku Utara

Bentuk Konflik	Penyebab Konflik	Rekomendasi
1. Konflik Horizontal bernuansa agama dalam bentuk tindak kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penyiksaan, perkosaan dan pembunuhan di picu oleh isu agama (Kristenisasi) di suku (1999-2000)	1. Perebutan tambang emas di Malifut dan sentimen sosial ekonomi antara kelompok yang beda suku dan agama	1. Pemda bersama pengusaha dan DPRD menyusun kebijakan dan menciptakan kondisi dan suasana agar tambang emas dan sumber daya ekonomi lainnya bermanfaat buat masyarakat setempat secara luas dan adil 2. Mengatasi pengangguran dan mencip-takan lapangan kerja, terutama bagi para korban kerusuhan 3. Fokus pembangunan lebih diarahkan pada pemerataan dan social develop-ment
	2. Persaingan politik antar elit dan kelompok sosial setempat	1. Menghentikan dan menghindari tindak kekerasan 2. Penegakan supremasi hukum dan pemberantasan praktek KKN 3. Dialog dan Rekonsiliasi

		4. Tidak menyalahgunakan isu agama dan suku dalam menggalang dukungan 5. Mutasi aparat dan pejabat secara demokratis, berkala dan obyektif 6. Peningkatan sikap nasionalisme melalui berbagai media 7. Menghindari praktek-praktek dan kebijakan yang diskriminatif dan marginalisasi kelompok 8. Peningkatan efektifitas pemerintahan, melanjutkan penyelesian konflik dan pembinaan kerukunan
	3. Persaingan kelompok agama	1. Menggalakkan dialog, rekonsiliasi, pengembangan wawasan dan komuni-kasi multikultural di kalangan masya-rakat luas. 2. Sosialisasi sikap dan kesadaran sosial keagamaan untuk tidak saling mengganggu. 3. Menggali dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari ajaran masing-masing agama yang dapat dijadikan acuan bersama dalam kehidupan sosial beragama,

		bermasyarakat dan ber negara 4. Merumuskan formula dan model-model program kerjasama konkrit lintas agama, suku dan profesi, berpedoman pada prinsip-prinsip dasar keagamaan yang difasilitasi pemerintah 5. Menata pola pemukiman yang memudahkan terjadinya pembauran lintas agama, suku dan profesi, dan proses pengembangan komunikasi multikultural. 6. Partisipasi pemerintah daerah dan kelompok keagamaan setempat secara lebih luas dalam penataan pendirian rumah ibadah dan kerukunan hidup umat beragama
	4. Menipisnya fungsi lembaga tradisional akibat sistem pemerinta han dan moder-nisasi	1. Refungsionaisasi mekanisme lembaga-lembaga tradisional 2. Membangun kembali kesadaran dan sikap toleransi, saling menghormati dan saling mempercayai antar kelompok suku dan agama 3. Menghilangkan sikap etnosentris kedaerahan dan etnoreligius sempit dan menggalakkan interaksi multikultural

Penutup

Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun melalui telaah literatur, penelusuran dokumen dialog atau wawancara serta observasi sekilas di lapangan, berikut ini dikemukakan beberapa pemikiran pokok bersifat umum terkait dengan solusi dan rekomendasi berikut.

Pertama, kondisi dan situasi umum terakhir Maluku Utara, secara pisik relatif aman dan kondusif. Roda pemerintahan dan kehidpan sosial ekonomi masyarakat ini dicapai berkat kerja keras semua pihak seperti aparat keamanan, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Namun begitu kerusuhan Maluku Utara tahun 1999 – 2000 tersebut, masih menyisakan berbagai persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat setempat seperti sejumlah pengungsi yang belum kembali ke tempat semula dan belum dapat menjalani hidup secara normal. Perasaan terluka, duka dan frustasi yang mendalam serta trauma berkepanjangan akibat kerusuhan, memerlukan waktu lama, keseriusan, kearifan dan tindakan konkrit, dari semua pihak terkait, khususnya dari pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencairkannya.

Kedua, solusi kerusuhan yang dilakukan, terkesan lebih fokus kepada menghentikan praktek kerusuhan secara pisik, dan kurang fokus kepada upaya mencari dan menyelsaikan akar permasalahan pertikaian yang bersifat strategis berlandaskan prinsip-prinsip dasar keadilan dan penegakan supremasi hukum di berbagai bidang. Sangat

diperlukan adanya kemauan, keberanian dan tindakan tegas terhadap setiap pelaku pelanggaran HAM dan praktek KKN secara lebih serius dan kontinu.

Ketiga, karena berbagai keterbatasan sampai sekarang masih tersisa sejumlah persoalan menyangkut para pengungsi belum terselesaikan secara tuntas. Sejumlah pengungsi belum dapat menjalani hidup kesehairan keluarganya secara normal, masih tinggal di barak-barak penampungan seperti di Ternate, Bitung, Manado dan tempat lainnya. Perlu dilakukan berbagai upaya lanjutan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait membangun kembali rumah-rumah para korban di tempat asalnya atau di tempat baru (relokasi) yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti air, listrik, transportasi, sekolah, Puskesmas tempat ibadah dan lain-lain. Selain itu bagi korban yang harta bendanya habis ludes akibat kerusuhan, hendaknya diberikan konpensasi secara lebih pantas dan adil agar mereka dapat mulai menata kembali dan melanjutkan kehidupan keluarganya. Selain itu rehabilitasi mental dan advokasi para korban yang mengalami frustasi dan trauma berkepanjangan hendaknya terus dilakukan secara lebih serius, terencana dan berkala, teristimewa terhadap para ibu dan anak-anak, melalui berbagai pendekatan, khususnya pendekatan keagamaan.

Keempat, peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial tradisional dan keagamaan, perlu direfungsionalisasi dan reaktualisasi khususnya di kalangan kawula muda yang mengarah kepada pengembangan nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan, saling menghargai, jujur, adil,

bertanggungjawab, cinta tanah air, lebih berorientasi ke masa depan dan kepentingan umum. Dialog dan tatap muka lintas etnis, agama dan profesi dan berwawasan multikultural perlu digalakkan dengan melibatkan kalangan yang lebih luas, termasuk generasi muda dan lembaga pendidikan serta media massa.

Menghadapi berbagai kegiatan pembangunan di bidang politis seperti Pilkada yang sekarang banyak digelar, perlu dijaga agar tidak melakukan praktek-praktek penyanyalahgunaan agama dan etnik untuk kepentingan kelompok.

Kelima, kebijakan pemerintah di bidang pendirian rumah ibadah dan kerukunan hidup umat beragama yang sekarang sering dipersoalkan, hendaknya ditata secara lebih konprehensif dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan setempat untuk berperan dan berkontribusi.

Keenam, untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial, perlu dilakukan pemantauan, pengawasan secara kontinu terhadap peluang, akses dan aset yang dimiliki semua kelompok sosial setempat. Berpedoman pada hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, kemudian disusun kebijakan dan tindakan secara bertahap dalam rangka mengikis dan memelihara jangan terjadi proses marginalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hukum dan agama.

Ketujuh, diperlukan penataran pola pemukiman penduduk yang lebih kondusif dan berencana sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, yang lebih memungkinkan terjadinya perbauran masyarakat lintas etnis, agama, profesi dan status sosial yang dapat menopang berkembangnya interaksi budaya multikultural dan kerukunan beragama.

Pustaka Rujukan

Adnan Amal, *Sejarah Islam – Kristen di Halmahera Utara*.

Iqbal Setyarso, *Empat Potret Halmahera*, 2000.

Kasman Ahmad dkk, *Damai yang Terkoyak, Catatan Kelom Dari Bumi Halmahera*, 2000.

Rivai Umar, *Menelusuri Jejak Konflik Halmahera Utara*, Kelompok Studi PODIUM, Madina Press, 2000.

Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia*, Balitbang Agama, 2003.

Tamrin Amal Tumagola, *Tragedi Maluku Utara, Konflik Sosial, Demokrasi dan Rekonsiliasi,* Badan Litbang Agama, 2000.

Tabloid Adil, No. 11, tanggal 10 – 16 Desember 1999

Ternate Pos, 29 Februari – 6 Maret 2000.

BAB IV
ANALISIS

Berdasarkan deskripsi tentang kehidupan bermasyarakat umumnya dan kehidupan beragama khususnya di berbagai daerah yang diteliti, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur, dan Maluku Utara, dapat kiranya diredeskripsi secara konklusif, sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari kualitas interaksi atau derajat integrativitas antara unsur masyarakat di propinsi-propinsi yang diteliti—berdasarkan kriteria : soliditas, toleransi, sikap saling menghargai, kerjasama, kesetiakawanan, kebersamaan—maka wilayah-wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1 :
Interaksi Sosial dan Hubungan antar Umat Beragama Tahun 2005

NO	PROVINSI	KATEGO RI SITUASI	POTENSI RUKUN	POTENSI KONFLIK	KETE RANGAN
1	Sumut	Rukun	Kearifan budaya lokal; Kekerabatan; Kesadaran global; Peran tokoh masyarakat; Tioleransi tinggi;	Persaingan elit lokal. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.	

2	Sumbar	Berpotensi Konflik	Kontrol pemerintah; Peranan Tokoh; Toleransi kelompok mayoritas;	Kristenisasi; Dominasi Budaya lokal; Etnosentrisme;	
3	Kalbar	Rukun Traumatik/ Paska konflik	Kearifan Budaya lokal; Ikatan nasionalisme; Ikatan kekerabatan; Toleransi beragama tinggi; Dialog lintas SARA; Ajaran agama; Pengaruh tokoh setempat.	Eklusivisme agama; Etnosentrisme; Kompetisi tak sehat; Segregasi pemukiman; Kelompok-isme; Budaya kekerasan; Dampak negatif globalisasi; Kesenjangan sos, ekonomi dan politik; Trauma/ pengalaman konflik berkepanjangan.	Sering terjadi konflik berbasis etnik (Dayak dengan Madura)
4	Kalteng	Rukun Traumatik/ Paska konflik	Kearifan Budaya lokal; Ikatan nasionalisme; Ikatan kekerabatan; Toleransi beragama tinggi; Dialog lintas SARA; Ajaran agama;	Eklusivisme agama; Etnosentrisme; Kompetisi tak sehat; Kelompok-isme; Budaya kekerasan; Dampak negatif globalisasi;	

			Pengaruh tokoh setempat.	Kesenjangan sosek; Isyu Kristenisasi.	
5	Jateng	Rukun	Kearifan budaya lokal; Toleransi SARA; Peran tokoh masyarakat/agama; Dialog Multikultural.	Persaingan politik; Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik; Orientasi kelompok; Tumbuhnya budaya kekerasan; Penyalah-gunaan simbol keagamaan untuk politik; Perbedaan internal agama/sekte.	
6	NTT	Berpotensi Konflik	Ikatan historik; Ikatan kekerabatan; Ikatan budaya; Kontrol pemerintah; Dialog Multikultural; Konsolidasi internal kelompok agama; Adaptabilitas pendatang; Toleransi tinggi.	Ekslusivisme agama; Lemahnya institusi lokal; Kesenjangan sosial, ekonomi, politik; Budaya kekerasan; Pengungsi Timtim; Perbedaan internal agama (antar sekte); Dampak negatif budaya global.	
			Latar historik tunggal; Ikatan	Kesenjangan sosial, ekonomi, politik;	

7	Maluku Utara	Rukun Traumatik /paska konflik	kekerabatan; Kearifan budaya lokal; Ajaran Agama; Pengalaman ber-konflik; Ikatan nasionalisme; Peran pemerintah.	Etnosentrisme; Rendahnya penegakan hukum; Rendahnya latar pendidikan masyarakat; Melemahnya lembaga tradisional; Merebaknya budaya kekerasan; Dampak negatif globalisasi; Segregasi pemukiman; Trauma dan frustrasi berkepanjangan akibat konflik; Persaingan tidak sehat elite lokal; Belum maksimalnya fungsi keamanaan.; Isyu Kristenisasi.	

Analisis di atas menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Jawa Tengah memperlihatkan situasi interaksi sosial umumnya dan interaksi antar umat beragama khususnya terkategori rukun, dimana hubungan antar anggota masyarakat atau antar pemeluk agama baik seagama maupun berbeda agama terjadi secara kondusif,

rukun, saling berdampingan, saling toleran terhadap perbedaan, saling menghormati dan saling koperatif. Di kedua propinsi ini, terlihat jelas bahwa kesadaran beragama dan kesadaran akan hak-hak dasar sudah tumbuh di kedua wilayah ini. Selain itu, faktor kearifann lokal juga sangat berpengaruh. Perbedaannya antar kedua wilayah tersebut, adalah bahwa bila pertalian kekerabatan dan pandangan hidup yang"*economic oriented*" di Sumatera sangat dominan dalam terbentuknya kerukunan (integrasi) sosial di daerah ini, sedang sikap toeleransi yang sangat tinggi dan kesadaran kebebasan beragama merupakan faktor dominan penentu kerukunan antar umat beragama di Jawa tengah.

Kemudian, propinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, keduanya memiliki kesamaan situasional. Kedua propinsi, terkategori berpotensi konflik (*potentially conflictual*), dimana secara fisikal tidak terjadi konflik terbuka antar umat beragama khususnya atau antar warga masyarakat umumnya. Namun demikian, di kedua wilayah ini syarat dengan sumber-sumber konflik, yang pada suatu waktu ketika kontrol masyarakat atau pemerintah lemah maka konflik terbuka (*open conflict*) dapat terjadi. Sumber-sumber konflik di kedua wilayah juga hampir sama. Di Sumatera Barat yang berpenduduk mayoritas beretnik Minang dan (hampir seluruhnya) beragama Islam, maka isyu Kristenisasi dengan berbagai modus-operandinya menjadi sumber paling potensial pemicu konflik serta isyu sulitnya mendirikan rumah ibadah (gereja) bagi orang Kristiani yang dipersepsi sebagai tindak diskriminatif dan intoleran. Sebaliknya, di

Nusa tenggara Timur, isyu Islamisasi dan kesulitan mendirikan mesjid/mushala merupakan isyu rawan konflik, disamping persoalan sosial-ekonomi yang juga merupakan potensi konflik di daerah gersang ini.

Sementara, untuk daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara, ketiganya dapat dikategorikan sebagai daerak “rukun traumatik/rukun paska konflik”, dalam arti bahwa pada saat diteliti, kualitas hubungan antar masyarakat atau antar umat beragama khususnya menunjukkan kondisi “sedang tidak berkonflik”. Di ketiga daerah ini, menunjukkan situasi “rukun” tanpa konflik terbuka, tanpa “pergesekan fisik”. Namun demikian, tak dapat dipungkiri, karena faktor sejarah sebelumnya, ternyata kualitas integrasi sosialnya terkategori “integrasi terstruktur” atau “kedamaian terkondisikan” (*conditional peace*) oleh kontrol diri “terpaksa” dari kelompok-kelompok yang “baru saja” berseteru/berkonflik secara terbuka. Kerukunan atau kedamaian yang terjadi cenderung dibangun atas pertimbangan kejeraan atau kebosanan untuk saling berkorban jiwa. Bentuk integrasi sosial ini, secara sosio-psikologik, sangat potensial menjadi sumber konflik terbuka jikalau tingkat keamanan dan kontrol melemah. Dengan kata lain, di ketiga daerah ini sangat potensial untuk berkonflik kembali. Karena itulah, pemerintah perlu memberikan perlakuan ekstra haqti-hati terhadap ketiga propinsi ini.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan wilayah yang diteliti, maka upaya pembinaan keamanan, kedamaian, kerukunan, atau pencegahan konflik menjadi sebauah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua pihak.

Pertama, secara politik, Pemerintah pusat maupun Daerah perlu secara intensif dan ekstensif dituntut melakukan program-program penguatan NKRI. Program-program seperti "Penyadaran pentingnya menjaga keutuhan NKRI", "Penguatan nasionalisme" pada semua lapisan masyarakat", "Pengembangan budaya multikultural", "Penguatan Pancasila sebagai dasar negara, "*way of life*" bangsa", "Penguatan sekuritas nasional", disamping pengembangan konsep dan praktek keadilan masyarakat—baik keadilan hukum, keadilan distributif, maupun keadilan sosial-ekonomi. Dalam konteks pendidikan politik ini, hal yang tak bisa dihindari adalah perlunya pemosisian (*positioning*) para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh pemerintahan untuk secara sadar, tulus, dan sungguh-sungguh menjadi teladan (*model persons*) dan memerankan diri sebagai aktor pendukung program-program penguatan NKRI. Tanpa pemeranan tokoh kunci ini, secara sosio-kultural dan sosio-politik akan sulit untuk mencapai tujuan pemeliharaan kedamaian dalam pemeliharaan NKRI sebagai keutuhan bangsa besar.

Kedua, secara kultural, Pemerintah dan masyarakat, perlu melakukan penguatan pengembangan kearifan lokal (*local wisdom)*. Kekayaan nilai, norma, tradisi, atau adat-istiadat bernuansa agama maupun budaya asli (*indigeneous culture*) perlu dikembangkan, direvitalisasi, serta dijadikan sebagai instrumen kultural untuk pembinaan kerukunan, kedamaian, atau eliminasi konflik dalam masyarakat apapun motifnya. Dengan kata lain, kearifan budaya lokal merupakan potensi kerukunan yang cukup kuat dalam pengendalian konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah atau

masyarakat luas perlu melakukan upaya pembinaan terhadap keberadaan kearifan lokal, baik melalui upaya pelestarian (konservasi) maupun upaya pengembangan (*development*). Perkembangan maksimal kearifan budaya lokal, disamping berfungsi bagi pengendalian konflik sosial, juga dapat berfungsi sebagai *safety valve* bagi kehancuran budaya nasional sekaligus sebagai pengontrol budaya global yang kian berpengaruh terhadap segenap dimensi kehidupan masyarakat dewasa ini

Ketiga, secara edukatif, pendidikan berbasis nilai-nilai multikultur, harmoni, kedamaian, toleransi, dan menghormati perbedaan (respect for the difference) merupakan keniscayaan politis dan kultural yang harus diajarakan, didisseminasikan, dibinakan pada generasi muda, sejak pendidikan usia anak dini, pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan masyarakat luas. Sudah saatnya, kini hingga ke depan menghindari pendidikan yang potensial melahirkan prilaku "radikal" atau "ekstrim), seperti : fanatisme (fanatisme agama, budaya, kelompok, suku, dsb.), etnosentrisme, rasisme, xenophobianisme, dan prilaku ekstrim lainnya. Dalam konteks ini, keamanan sosial harus diposisikan pada tingkat kebutuhan terpenting sebagai persyaratan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa. Sebaliknya, konflik--apa pun bentuk, motif, modus, dan tingkat intensitas konfliknya—merupakan faktor destruktif dan disintegratif bangsa (ummat) dan menjadi faktor kendala dominan pembangunan nasional.

BAB V

MODEL PENGEMBANGAN WADAH KERUKUNAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

Pendahuluan

Terdapat beberapa *rationale* mengapa diperlukan upaya pengembangan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal.

Pertama, pada tataran kebijakan nasional bahwa salah satu upaya penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peningkatan kualitasejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan integrasi masyarakat melalui penguatan kerukunan hidup umat beragama. Disadari bahwa, pembangunan agama merupakan upaya pemenuhan salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Bab IX Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keagamaan masyarakat Indonesia, maka pembangunan agama diorientasikan pada upaya pewujudan peningkatan

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas keimanan, pemahaman, peribadatan, penghayatan, pengamalan, dan pelayanan keagamaan. Selain itu, pembangunan agama juga diorientasikan pada pengembangan dimensi relasional keagamaan yaitu penguatan kualitas kerukunan hidup umat beragama dalam rangka meningkatkan pola interaksi sosial yang didasarkan pada prinsip rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati antar sesama umat beragama serta memiliki kesadaran multikulturalisme dan kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, tenggang rasa, tanggung jawab serta memiliki "*sense of togetherness*". Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Berpijak pada orientasi pembangunan agama tersebut, maka berbagai upaya pengembangan potensi kerukunan dilakukan seoptimal mungkin di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang potensial berkonflik atau daerah paska konflik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka ini, adalah pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaman yang memfokus pada pengembangan kerukunan umat beragama.

Program pengembangan institusional ini, secara sosio-teologik, diharapkan mampu memerankan diri sebagai wadah untuk (a) meningkatkan kesadaran multikulturalisme dan pluralisme, (b) meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai internen sesama umat beragama, (c) mengurangi

ekslusivisme agama, sebaliknya meningkatnya inklusivisme beragama, (d) meningkatkan tata hubungan yang harmonis, aman dan damai baik hubungan interen maupun antar umat beragama (e) mengurangi dan meredam gejala konflik sosial berbasis agama, dan (f) meningkatkan sikap kebersamaan dalam mengatasi masalah sosial, serta (g) memperkuat program kerjasama antar umat beragama dalam penguatan moralitas, spiritualitas dan integrasi bangsa.

Kedua, pada tataran sosio-politis, masyarakat Indonesia, terutama pada dekade terakhir, muncul berbagai fenomena konflik sosial dan gejala disintegrasi bangsa. Kemunculan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya, dipengaruhi oleh pemahaman dan penafsiran ekslusif dan ekstrem terhadap ajaran agama yang diyakini dan dipeluknya. Ekslusivitas dan esktremitas pemahaman dan penafsiran ajaran agama ini, pada tataran sosial, dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Peristiwa pembakaran atau pemboman beberapa tempat ibadah dan sarana keagamaan, pembunuhan sadistik oleh dan kepada kelompok keagamaan, hubungan konfliktual sesama umat beragama, penyitraan negatif agama dan pemeluknya dan berbagai perilaku beragama esklusif dan ekstrem lainnya, serta munculnya berbagai aliran keagamaan baru yang memaksakan diri untuk diakui sebagai agama yang sah merupakan permasalahan krusial yang mutlak perlu diantisipasi dan diatasi secara sistemik agar terwujud struktur suasana kehidupan beragama yang rukun, aman, damai, dan sejahtera.

Dalam hal ini, pengembangan wadah kerukunan dan ketahahan masyarakat lokal, atau pemungsian lembaga sosial keagamaan secara optimal perlu dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun pemahaman keagamaan inklusif (*religious inclusivism*) yang komprehensif sekaligus mengurangi dan menghilangkan munculnya ekslusivisme agama (*religious exclusivism*) yang kerap menjadi penyebab konflik sosial berbasis agama (*religious based conflicts*). Dengan kata lain, pengembangan lembaga sosial kegamaan, khususnya wadah kerukunan yang dijadikan fokus riset aksi ini, diharapkan dapat difungsikan sebagai wadah yang menjembatani dan memfasilitasi program peningkatan dan penguatan kerukunan hidup beragama masayarakat lokal. Secara rinci, diharapkan terbentuknya wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal, diharapkan mampu memfasilitasi atau mewujudkan program-program berikut.

1) Peningkatan pemeliharaan dan penguatan harmoni sosial umat beragama dengan memanfaatkan kearifan lokal;
2) Penguatan interaksi sosial umat beragama yang kondusif berdasarkan ajaran agama inklusif;
3) Pencegahan kecenderungan berkembangnya potensi konflik dalam masyarakat dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik dalam masyarakat lokal;
4) Penyelesaian konflik sosial berbasis agama melalui program resolusi konflik berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian dan

ketahanan masyarakat pada skala lokal khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

5) Pemulihan kondisi sosio-psikologik masyarakat paskakonflik melalui pendekatan keagamaan, yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat lokal (masyarakat yang berkonflik);
6) Peningkatan kerjasama interen dan antarumat beragama di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain dalam rangka penguatan ketahanan masyarakat lokal;
7) Pemberdayaan lembaga sosial-keagamaan dan lembaga pendidikan agama untuk mendukung upaya pemapanan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan multikutural.

Potret Masyarakatn Kecamatan Pahandut : Selayang Pandang

Potensi Konflik dan Kerukunan

Kecamatan Pahandut—satu dari 5 kecamatan[61] di Wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah—pada tahun 2004 berpenduduk 66.351 jiwa. Dengan sebaran kepemelukan agama sebagai berikut : Ialam 38.039 (57,25 %), Kristen 21.627 (32,60 %), Katolik 2.764 (4. 26 %), Hindu 3.076 (4,62 %) dan

---

[61] Kecamatan Pahandut meliputi 6 kelurahan : Pahandut (lama), Pahandut Seberang, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang.

Budha 845 (1, 27 %),[62] dengan latar etnik majemuk pula, yang meliputi suku Dayak, Banjar, Madura Jawa, Batak, Sunda, Melayu dan lain sebagainya.. selain latar organisasional yang majemuk pula.[63]agama yang dipeluk masyarakat Pahandut relatif berimbang dalam arti tidak terdapat *"over-majority"*, mayoritas tunggal, katrena antara pengikut Muhammad dan Jessus cukup beimbang.

Kondisi sosio-demografik, sosio kultural. dan sosio-religius Pahandut majemuk. Nmun sebenarnya hingga kini belum pernah terjadi konflik antar umat beragama. [64] Kejadian

---

[62] Pada tingkat propinsi, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang terdiri dari 13 Kabupaten dan satu kota yaitu kiabupaten : Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Sukamara, Lamndau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya, berluas 153.664 km2 Tu 1,2 luaS Pulau Jawa dan berpenduduk 1.912.788.333 jiwa (pada 2003). Dari jumlah tersebut dilihat dari kepenganurtan agama, sebanyak 1.462.88 (71, 65 %) memeluk Islam, 14, 78 penganut kristen, 2,11 % Katolik, 11,25 % penganut Hindu/Kaharingan, 0,20 Budha, dan sebesar 0,1 % pemeluk kepecayaan. Adapun rumah ibadat di di Kalteng (pada tahun 2004) terdapat 1641 masjid dan 2459 mushola bagi muslim, 1097 gereja bagi umat Kristen Protestan. 249 gereja Ktolik, 97 pura umat Hindu-Budha, 13 Vihara dan 212 balai Kaharingan

[63] Tak kurang dari 40 organisasi sosial-keagamaan ada dan hidup secara berdampingan di daerah kecamatan Pahandut. Diantaranya adalah : Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, Muslimat NU, IPMU, IPPNU, FKDMI, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Remaja Mesjid (IRM) Nasyiyatul Aisyiah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII), Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI), Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kesatuan Nahasiswa Nuslim Indonesia (KAMMI), Yayasan Alhidayah, Wanita Tarbiyah, Pemuda Islam, Hizbut Tahrir, Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) Muda Mudi Katolik (MUDIKA), Wanita Katolik Tepublik Indonesia (WKRI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) LPTQ, Majlis Dakwah Indonesia (MDI), Tarikat Al-Mutabarah, PHDI, PGI, PII, Yayasan Yusuf Arimater, Yayasan Perguruan Eka Sinta, Yayasan Pendidikan Kristen. Sumber Data : Kasntor Departemen Agama Kota Palangka Raya, 2003

[64] Drs. H Ardiansyah (tokoh Islam dan tokoh Masyarakat Wihelmus Y. Ndoa (Pastur dan tokoh umat Katolik), dan Drs. Salman Djungan (Tokoh umat

kerusuhan "Minggu Kelabu" pada tanggal 18 Februari 2001 di Sampit dan sekitarnya, merupakan konflik yang berlatar kriminal, bukan konflik berbasis agama atau kepercayaan yang kemudian mengkristal menjadi konflik antar etnik (*ethnic-based conflik*) antara suku Madura dengan suku Dayak di Palangka Raya dan sekitarnya.[65]Namun demikian, karena ulah provokator mosus konflik pada akhirnya menjadi kurang jelas kategori basisnya, apakah konflik berbasis etnik atau berbasis lainnya.

Secara bersamaan waktunya, pada tahun-tahun terakhir, isyu-isyu sara menjadi populerr dalam konteks politik untuk kepentingan PILKADA, Pemilu, dan kepentingan pribadi.

Kecamatan Pahandut terletak di daerah pusat kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Gedung-gedung perkantoran provinsial maupun kabupaten, serta pusat perdagangan dan kegiatan berskala provinsial banyak berlokasi di daerah Kecamatan Pahandut. Oleh karena itulah, Pahandut dapat dijadikan sebagai barometer kondisi sosial-

---

Hindua) dalam makalah yang berjudul sama "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Pahandut Palangka Raya, pada Juli 2005. disajikan pada *Pertemuan Antar Umat Baragama se-Kacamatan Pahandut,* Palangka Raya, pada bulan Juli 2005.

[65] Sebetulnya, konflik berupa perang terbuka disertai pembunuhan/pembantaian awalnya meletus di Kabupaten Kota Waringin Timur (sampit) yang merembet ke ibukota Kalteng (Palangka Raya) dan kabupaten Kapuas. Sumber konflik cenderung disebabkan oleh tindak kriminal (oleh suku Madura) terhadap suku lain berupa pembunuhan penyerobotan hhak atas tanah serta berbagai tumpukan persoalan yang secara akumulatif belum terselesaikan secara hukum.

politik, maupun sosio-kultural masyarakat Kalimantan Tengah. Pada saat terjadinya konflik etnik antara etnik Dayak dan Madura, pada awal tahun 2001 di Sampit, misalnya, kecamatan Pahandut yang berada di tengah ibukota Kalimantan Tengah, Palangka Raya, terimbasi oleh peristiwa tersebut.

Peristiwa Sampit, dengan demikian, juga berpengaruh terhadap kondisi Pahandut khususnya dan Palangka Raya pada umumnya. Penggambaran tentang situasi sosial-budaya dan sosial-politik Pahandut, sebenarnya, merupakan representasi situasi Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.

Peristiwa konflik antar etnik yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kotawaringin, dalam realitasnya, menjadi tragedi historis yang menakutkan bagi masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, dan bagi masyarakat kota Sampit dan Palangka Raya khususnya. Jumlah korban dan modus konflik yang cenderung sadistik dan "*uncivilized*" tampak menjadi pengalaman tersendiri dan pelajaran yang sangat bermakna bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Refleksi, perenungan, dan sikap traumatik masyarakat terhadap peristiwa "barbaristik" yang baru terjadi beberapa tahun lalu, menjadikan semua unsur masyarakat, terutama kelompok-kelompok pelaku konflik, menyadari betapa sebuah konflik berwujud peperangan terbuka secara diametral dengan pertumpahan darah tak berdosa, dari segi apa pun sangat merugikan semua pihak.

Dalam konflik ini, tidak hanya kehilangan jiwa dan kehancuran infrastruktur yang dalam masyarakat, namun lebih dari itu, "*social-capital*" dan modal integratif lainnya menjadi hancur. Kesadaran sikap masyarakat seperti inilah, yang menyebabkan masyarakat paska-konflik cenderung menjadi lebih hati-hati, lebih mengontrol diri, dan lebih kalkulatif dalam berinteraksi dengan pihak lainnya. Implikasi berikutnya dari konflik yang terjadi tahun 2001, masyarakat pada dua tahun terakhir ini, mulai menunjukkan sikap untuk kembali membangun atau memperbaiki tata hubungan antar mereka. Masyarakat, dengan kata lain, menghendaki untuk menormalisasi keadaan seperti saat sebelum terjadi konflik. Masyarakat etnik Madura, mulai kembali ke daerah ini yang sesungguhnya merupakan tanah kelahirannya.[66] Namun, mereka cenderung sangat berhati-hati dalam berkomunikasi dengan kemlompok etnik lainnya. Masyarakat Madura cenderung mengontrol diri dalam berprilaku, tidak seperti saat pra-konflik. Pengalaman pahit dari pembalasan kelompok etnik lain—dalam hal ini etnik Dayak—menjadi pelajaran berharga untuk rekonsiliasi. Masyarakat Madura merasa perlu merefleksi secara komprehensif atas peristiwa tersebut. Sebaliknya, masyarakat etnik Dayak, dengan kerendahan hati

[66] Diinformasikan bahwa warga etnik Madura yang sudah kembali ke Sampit atau daerah sekitar konflik (seperti : Palangka raya, Kapuas) baru dalam jumlah kecil, sekitar 10 % dari seluruh warga Madura yang mengungsi atau diungsikan. Jumlah ini , pada umumnya, adalah warga Madura pendatang kembali yang merasa atau dipandang masyarakat setempat (termasuk oleh warga etnik Dayak, sebagai musuhnya) sebagai orang baik atau warga yang memperoleh pasangan hidup dengan warga Dayak (sebagai suami atau isteri). Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan.

dan tradisi kulturalnya, mereka menerima kembali kehadiran etnik Madura sebagai bagian dari warga besar Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat etnik Dayak, menjadi lebih hati-hati dan waspada dalam berinteraksi dengan mereka Madura.

Berdasarkan realitas sosial di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa hubungan antar etnik dan hubungan interen dan antar umat beragama umumnya di Kalimantan Tengah pada tahun 2005 adalah relatif rukun. Pada tahun terakhir ini, masyarakat Kalimantan Tengah hidup rukun, saling menghormati, dan toleran terhadap perbedaan apapun juga—agama, keyakinan, bahasa, dan multikulturalitas lainnya. Walau tentu saja, masih menyimpan daya ingat ikhwal peristiwa silam yang terjadi. Berdasarkan realitas ini pula, terdapat beberapa hal penting yang potensial menjadi unsur integratif kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Pertama, terdapatnya unsur-unsur nilai budaya masyarakat yang fungsional bagi integrasi masyarakat daerah ini. Kearifan lokal, baik nilai bersumber dari tradisi lokal etnik maupun nilai berasal dari agama *samawy.*

Kedua, peran pemerintah yang memungsikan diri sebagai mediator atau "*problem solver*" dalam konflik yang terjadi serta penataan kembali kondisi paska-konflik. Melalui serentetan pertemuan dan musyawarah seperti : "Konggres Rakyat Kalimantan Tengah" pada 4-7 Juni 2001 di Palangka Raya, "Musyawarah Rakyat Kotawaringin Timur" di Sampit,

pada 18-20 Mei 2001, "Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah", di Ketapang, Sampang, Madura pada tanggal 22 Agustus 2001, "Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan" pada tanggal 3 Februari 2002 di Malang, Jawa Timur, serta "Rapat Kordinasi Penanganan Pengungsi Kalimantan Tengah, pada 13 September 2002 di Kuala kapuaas serta "Rapat terbatas Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah", pada tanggal 17 September 2002 di Palangka Raya, pada dasarnya merupakan indikator bagaimana intensitas upaya pemerintah dalam menangani kasus konflik berbasis etnik ini. Selain itu, dalam upaya penguatan tata hubungan antar umat beragama, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk **Forum Komunikasi Antar Umat Beragama** (FKUB) di Kalimantan Tengah, pada 24 Maret 2004.

Ketiga, tumbuhnya kesadaran universal tentang kepemelukan pada suatu agama. Sebagai dampak globalisasi, masyarakat, terutama para tokoh agama semakin menyadari bahwa beragama merupakan persoalan pribadi yang sangat asasiah. Pilihan atas agama yang diyakini merupakan hal yang tidak bisa diganggu-gugat siapa pun.

Keempat, peran tokoh agama. Dalam situasi konflik, para tokoh agama, menyadari bahwa perlu peran aktif dari para tokoh agama untuk membatasi konflik agar tidak melebar baik secara geografis, kultural maupun agama. Dalam hal ini, para tokoh agama (=Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kaharingan) secara aktif meredam, mengontrol, dan menghimbau komunitas/jamaahnya untuk tidak

mempertajam konflik.[67] Demikian pula, dalam membangun kembali kerukunan, tokoh agama juga sangat besar perananya. Sebagai contoh, saat terdengar isyu "negatif" pada paska Pilkada tahun 2005, yang mengarah pada disintegrasi umat beragama, maka MUI menyerukan himbauannya kepada kaum Muslimin dan masyarakat Kotawaringin untuk (1) menyikapi secara bijaksana segala permasalahan yang berkembang serta tidak mudah terpancing oleh isyu yang meresahkan dan memecah belah perastuan dan kesatuan, (2) tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan karena pada dasarnya kita semua bersaudara, (3) memelihara keamanan dan ketenteraman di lingkungan masing-masing, dan (4) menyerahkan segala permasalahan yang timbul dalam Pilkada 2005 kepada pihak yang berwenang.[68]

Kasus SARA Palangka Raya

Konflik berbasis SARA yang terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sesungguhnya relatif sangat jarang. Dalam arti bahwa, dilihat dari intensitas atau frekuensi kejadiannya, relatif rendah jika dibanding dengan peristiwa yang terjadi di daerah propinsi lain. Apalagi bentuk konflik berbasis agama, dalam kenyataannya, belum pernah terjadi di daerah ini. Konflik yang meletus pada tanggal 17-18 Februari

---

[67] Wawancara dengan Wilhelmus Y. Ndoa, tokoh Katolik; Drs. Sulman Djungan, tokoh Hindu; Drs. Midday, akademisi; Drs. Abdul Hadi Ridwan, Ketua MUI.

[68] Ditanda-tangani oleh Ketua Umum (KH. Abdul Hadi Ridwan) dan Sekretaris Umum (Drs. HM. Fauzan Nurdin Azis, MM), pada tanggal 5 Juli 2005..

2001, yang dimulai sejak pukul 00.00 hari Minggu, pada dasarnya merupakan konflik antar etnik (yaitu antara masyarakat Madura, etnik pendatang di Kalimantan Tengah di satu pihak, dengan masyarakat Dayak, etnik asli Kalimantan Tengah). Meletusnya konflik antar kedua etnik tersebut, cenderung disebabkan oleh faktor akumulatif peristiwa perlakuan kriminal yang dilakukan oleh etnik Madura terhadap etnik Dayak.

Berdasarkan "*Daftar Kronologis Terjadinya Tindakan Kekerasan/Kejahatan Etnik Madura terhadap Etnik Dayak Warga Kalimantan Tengah*" desebutkan serentetan peristiwa yang secara akumulatif menyebabkan meletusnya peristiwa konflik terbuka di beberapa kota Kalimantan Tengah (Sampit, Pangkalan Bun, Kuala kapuas, Barito) yang berakibat hilangnya sejumlah besar warganya. Diantaranya adalah peristiwa : (1) Pemerkosaan terhadap seorang gadis Dayak, pada tahun 1982 di Palangka Raya. Peristiwa ini diselesaikan melalui upaya perdamaian menurut hukum adat; (2) Pembunuhan terhadap warga Dayak, pada tahun 1983 di Bukit Batu, Kasongan. Seorang dayak dikeroyok oleh 30 orang Madura. Penyelesaian dilakukan melalui perdamaian dan perjanjian untuk keluar dari Kalimantan Tengah bila tindakan serupa terulang lagi; (3) Pemerkosaan dan pembunuhan sadis seorang gadis Dayak oleh seorang Madura di Palangka Raya, pada tahun 1996. Penyelesaiannya dilakukan secara hukum namun sangat ringan hukumannya; (4) Perkelahian tak seimbang antara warga Dayak dikeroyok oleh etnik Madura,

di Palangka Raya, pada tahun 1996. Seorang warga Dayak tewas, namun pelakuknya kabur dan tidak jelas proses hukumnya; (5) Pengeroyokan oleh 4 orang Madura terhadap seorang Dayak di Palangka Raya, pada tahun 1998. Pengeroyok melarikan diri, sehingga tidak ada penyelesaian hukum; (6) Penganiayaan/pembacokan seorang petugas keamanan (Tibum—petugas Ketertiban Umum) beretnik Dayak oleh seorang warga Madura., di Palangka Raya pada tahun 1999. Setelah sehari ditahan, pelakunya dilepas; (7) Pada tahun 2001, di Sampit (17 Februari 2001) warga Dayak dibantai oleh Etnik Madura.

Dalam peristiwa Sampit, warga Dayak banyak mati terbunuh. Peristiwa inilah yang memicu perlawanan oleh Dayak yang berakibat warga Etnik Madura banyak yang tewas terbunuh. Peristiwa konflik terbuka antara warga masyarakat Etnik Madura dan Dayak di Sampit Kotawaringin Timur yang merembet ke daerah sekitarnya (Palangka Raya, Kuala kapuas, Barito Barat, dsb.) dipicu oleh tindak kerusuhan oleh masyarakat Etnik Madura. Berawal dari minggu malam, tanggal 18 Februari 2001, orang Madura bertindak brutal dengan menyerang, membunuh, membakar hidup-hidup di dalam keluarga Dayak (menewaskan 24 warga Dayak). Sambil sorak-sorai, mereka berarak-arakan menyatakan kemenangannya atas etnik Dayak melewati Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Usman, dan Jl. Iskandar, sembari melontarkan yel-yel "Mana orang Dayak "? "Mana Panglima Perang Dayak "? Dan mengusung spanduk bertuliskan "Kota Sampit,

Sampang Kedua", "Selamat Datang di Kota Madura" dan "Kota Sampit, Serambi Mekkah",[69]

Sejak peristiwa Sampit tersebut, yang berakibat diungsikannya warga Madura, suasana kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di kota-kota konflik, menjadi terkendali dan semakin kondusif terbangunnya geliat dinamika kehidupan yang relatif jauh lebih aman. Penuturan para tokoh masyarakat, warga biasa maupun aparat keamanan, sejak petristiwa Sampit tingkat kejahatan menurun drastis hingga ke tingkat "nol atau nihil". Meskipun demikian, apa pun bentuk warna suasana kehidupan di Kalimantan Tengah, "kewaspadaan akan munculnya konflik baru harus tetap ditingkatkan", demikian Kyai Haji Abdul Hadi Ridwan, ketua MUI Kabupaten Kotawaringin menghimbau umatnya.

Pentingnya Wadah Kerukunan dan Ketahanan Tingkat Lokal

Wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat, baik dalam skala global, regional, maupun nasional, secara sosiologik maupun manajerial, merupakan tuntutan bersama dalam upaya mencipta dan membangun perdamaian global.[70]

---

[69] La[poran Tim Investigasi LMMDD-KT, tertanda Ketua Presidium dan Sekretaris.

[70] Wadah yang berfungsi penguatan kerukunan dan perdamaian atau ketahanan bertataran internasional sangat banyak jumlahnya. Hampir setiap negara membentuk jenis forum atau wadah sejenis ini. Diantara wadah/forum internasional

Dalam konteks ini, pertanyaan muncul adalah "Apakah wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal" juga diperlukan ? Pertanyaan ini sudah barang tentu memiliki jawaban yang dipijakkan pada argumen sama dengan kebutuhan global, regional maupun nasional. Dengan kata lain, kecamatan Pahandut, Kota Palangkaa Raya, Kalimantan Tengah sebagai bagian dari ruang global, regional, dan nasional, perlu sebuah wadah kerukunan dan ketahanan. Namun demikian, wadah ini, sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata kedaerahan itu sendiri. Untuk ini, penggambaran analitik terhadap kondisi nyata Kecamatan Pahandut mutlak perlu dalam rangka "memilih, menentukan, dan mengembangkan" yang fungsional bagi penguatan integrasi dan ketahanan lokal.

Wadah kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Pahandut

Salah satu aspirasi yang menjadi kesepakatan bersama umat beragama di Pahandut dalam rangka membangun, memelihara, menguatkan, dan mengembangkan situasi kondusif bagi kedamaian, kerukunan, dan kerukunan hubungan antar umat beragama yang sudah terbina hingga

---

yang aktif dalam program penguatan kerukunan atau perdamaian diantaranya adalah : *Security Counsil of United Nation (UN-SC), Stanford University Center for International Security and Cooperation, ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Center for Combating Terrorism (ACCT), Organization of Islamic Conference (OIC)*. Sedang wadah bertaraf nasional, diantaranya adalah Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), dll.

kini, adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan.

Forum diketuai dan beranggotakan semua agama yang ada di daerah Pahandut yaitu dari unsur umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha serta Kaharingan. Berdasarkan kesepakatan, baik melalui kertas kerjanya maupun gagasan baru dalam pertemuan (dialog) mereka merencanakan wadah ini untuk menjadi pusat kegiatan untuk mengembangkan: dialog/musyawarah, komunikasi/ konsultasi, kerjasama, pengkajian, agama secara bersama (mendalami atau mempelajari agama lain), mengpersoalan dan pemecahan masalah bersama, serta mengembangkan nilai-nilai yang berorientasi pada penguatan kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian, seperti mengembangkan nilai dan sikap toleran terhadap sesama umat, keterbukaan, saling menghargai dan gotong royong.

Melalui pengembangan program tersebut, diharapkan, Forum Komunikasi Antar Umat beragama di Pahandut mampu membangun dan memperkuat suasana deamai, aman, tenteram, dialogal, saling kasih, dan toleran sekaligus menghindari dan mengeleminasi percekcokan, perseteruan, perselisiha , rasa dendam-dengki, diskriminasi, dan persaingan tak sehat. Bila program ini berhasil, kerukunan dalam pengertian seluasnya akan dapat membentuk ketahanan masyarakat lokal, yang berkontribusi pada penciptaan pada kerukunan dan ketahanan nasional.

PUSTAKA RUJUKAN

A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Aksara, jakarta, 1984.

Achmad Fedyan Saefuddin, *Konflik dan Integrasi : Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit rajawali, Jakarta, 1986.

Adnan Amal, *Sejarah Islam – Kristen di Halmahera Utara*.

Affan Gaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru*.

Ahsanul Khalikin, *Agama Kaharingan : Kepercayaan Masyarakat Dayak Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur*, Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, Jakarta, 2002.

Ardiansyah, "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama : Dari Perspektif Agama Islam", disajikan pada *Pertemuan Antar Umat Baragama se-Kacamatan Pahandut,* Palangka Raya, Juli 2005.

Atho Mudzhar, *Konflik Etni Religius Indonesia Kontemporer*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

Balitbang Agama, *Prilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Jakarta, 1999.

Biro Pusat Statistik, *Kalimantan Barat Dalam Angka, Jakarta, 2002*

BPS, *Jawa Tengah Dalam Angka, 2002.*

BPS Daerah Kalimantan Tengah,[1]*Kalimantan Tengah Dalam Angka 1999*, 2000.

Choirul Fuad Yusuf, "Agama dan Integrasi Sosial ", Kata Pengantar pada *Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Banssa Di Masa Depan*, (Muchlis, ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999.

Choirul Fuad Yusuf, *Konflik Sosial dan Reconsiliasi Nasional*, sebuah Glosari, Harmoni, Balitbang Agama, 2002.

Data Lembaga Dakwah/Ormas Islam Tingkat I Propinsi Sumatera Utara 2004-2005, Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Depag Sumatera Utara;

Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2000, Ditsospol Sumatera Utara.

Departemen Agama RI,*Education Management Information System*, Tahun 2003-2004.

David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999.

David L. Sill (Ed.), *International Encuclopedia of the Social Sciences, Vol 11* Simon & Schuster and Prentice Hall International, London, 1968.

Edi Patembang, "Masalah Kependudukan di Kalimantan", *Kalimantan Review, No. 19*, 1996.

Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKIS, 2004.

Gajah Mada dan Departemen Agama, *Prilaku Kekerasan Kolektif*, 1997.

GATRA, Desember, 1995

Georg Simmel, *Conflict : The Web of Group Affiliations*, The Free Press Publications, Glencoe, Ill, 1955.

Ilham Nasution (2000), dalam Dr. Ismail , "*Potensi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Kinali, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat*", makalah dipresentasikan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 29 September 2005, di Jakarta.

Iqbal Setyarso, Empat Potret Halmahera, 2000.

I.Wayan Karya, M.Pd, dkk., *Upacara Ritual Perkawinan Menurut Tata Cara Agama Hindu Kaharingan di Dusun Hurung Pukung,* Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Palangka Raya, 2004.

John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta, 1994.

Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya, *Data Keagamaan Tahun 2003.*

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuranji *Surat Himbauan* yang ditujukan kepada P3N se-kecamatan Kuranji.

Kasman Ahmad dkk, Damai yang Terkoyak, Catatan Kelom Dari Bumi Halmahera, 2000.

Kustini, *Kaharingan : Studi Kasus Agama di Desa Warukin , Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan*, Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, Jakarta, 2002.

Laporan Tim Investigasi LMMDD-KT, tertanda Ketua Presidium dan Sekretaris, 2001.

Laporan Kepala Bidang Pekapontren dan Penamas, Kanwil Depag Sumut, 2005..

Laporan Pembimas Kristen Kanwil Depag Sumatera Utara, 2004.

Max Weber, *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, transled by Edward A. Shill and H.A Finch, The Free Perss, Illinouis, 1949.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1996.

Nuchrison, *Penelitian Agama Kaharingan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,* Puslibang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002.

Pembimas Katolik, Kanwil Departemen Agama, Sumatera Utara, *Data Tahun 2004*.

Pembimas Kristen, Kanwil Depag Propinsi Sumateera Utara, *Data Tahun 2004*.

Pembimas Hindu dan Buddha, Kanwil Departemen Agama , Sumatera Utara, *Data Umat Buddha Tahun 2004*.

Pimpinan Pusat Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM), *Pernyataan Sikap* dari ditanda tangani oleh Mayor Purn) H. Maat Acin RB dan Sekretaris M. Yunus, tertanggal 29 Juli 2002.

Parsudi Suparlan, Konflik Antar Sukubangsa Melayu dan Dayak Dengan Madura di Sambas Kalbar, 2002.

Ridwan Lubis, dkk. (Eds.), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung, 2004.

Rivai Umar, *Menelusuri Jejak Konflik Halmahera Utara*, Kelompok Studi PODIUM, Madina Press, 2000.

Tamrin Amal Tamagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.

Tamrin Amal Tumagola, *Tragedi Maluku Utara, Konflik Sosial, Demokrasi dan Rekonsiliasi*, Badan Litbang Agama, 2000.

Tabloid Adil, No. 11, tanggal 10 – 16 Desember 1999.

Ternate Pos, 29 Februari – 6 Maret 2000.

Salman Djungan, "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama : Dari Perspektif Hindu", disajikan pada *Pertemuan Antar Umat Baragama se-Kacamatan Pahandut*, Palangka Raya, Juli 2005.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969.

Stepanus Djueng, Manusia Dayak Orang Kecil Yang Terperangkap Modernisasi, IDRD, 1996.

Wilhelmus Y. Ndoa, "Peningkatan Kerukunan Umat Beragama : Dari Perspektif Katolik", makalah disajikan pada *Pertemuan Antar Umat Baragama se-Kacamatan Pahandut,* Palangka Raya,Juli 2005.

W. Wallace (Ed.), *The Dynamics of European Integration*, Pieter, Inc., London, 1990.

W.J.S. Poerwadarminta, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia,* J.B. Walters, Djakarta, 1954.

Zaenal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, LP3ES, Jakarta, 2003

TENTANG PENULIS

Choirul Fuad Yusuf, adalah peneliti pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Gelar sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris diperoleh dari IKIP Bandung dan belajar Bahasa Arab (1 tahun) pada institut yang sama. Kemudian, melanjutkan belajar Filsafat di Universitas Indonesia dan program S-2 dan program doktor Sosiologi pada universitas sama. Pernah belajar "*Educational Planning and Management*", di Melbourne University, dan short course on Recognition and Combating Terrorism--program kerjasama Wollongong University, Center for Strategy, dan Interpol Indonesia. Karya ilmiah yang diterbitkan, diantaranya : *Menyingkap Rahasia Kehidupan* (Risma Pers Jakarta, 1987), *Psikoanalisa dan Agama* (terj., Atisa Press, Jakarta, 1988), *Negara dan Revolusi Sosial* (terj., bersama Prasetya Utama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990), *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek* (terj., Penerbit Intermasa, Jakarta, 1992), *Manusia dan Budaya* (Usakti Press,1993), *Peran Agama dalam Masyarakat :Studi Awal Sekularisasi pada Komunitas Muslim Kelas Menengah di Jakarta* (Diterbitkan oleh Balitbang Agama, 2001) dan sejumlah artikel untuk jurnal ilmiah dan media massa lainnya. Sejak awal 2006-2009, ditugasi sebagai Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Pada tahun 2009 awal hingga Oktober 2011 menjabat sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, dan kini kembali ke Badan Litbang dan Diklat sebagai Kepala Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.

Pada penghujung memasuki abad XXI muncul berbagai fenomena krisis sosial yang secara linear mengarah pada proses disintegrasi sosial di Indonesia. Meski sesungguhnya fenomena ini telah mulai menampakkan diri ke permukaan waktu jauh sebelumnya, namun agaknya fenomena tersebut yang kini banyak menggumpal menjadi berbagai bentuk konflik sosial tampak menonjol sejak 1997-an.

Diawali dengan konflik antar ras berupa penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan nonpribumi bulan Mei 1998 di Jakarta, yang disusul daerah-daerah, konflik antar kelompok beragama berupa pembakaran Gereja (Peristiwa Ketapang, Jakarta) dan pembakaran Mesjid di Kupang yang menyebar ke Ambon (Januari 1999), dan Ujung Pandang (1 April 1999), disusul konflik antar suku berupa pembunuhan/perkelahian di Sambas Kalimantan Barat pada 1999 dan bentuk konflik sosial lainnya, seperti konflik antar daerah dan Pusat (Aceh, Riau, Irian Jaya), konflik Poso, Maluku Utara, konflik antar partai dsb.

Konflik sosial yang meletus, sebenarnya, berakar pada sumber sangat kompleks, tumpang tindih, berkelindan dan sangat sulit diidentifikasi secara jelas dan akurat. Emil Salim, mengkategorikan konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya merupakan bentuk konflik "dwiminoritas" dan "triminoritas", lantaran terbentuk atas himpitan dua atau tiga konflik seperti antar suku dan agama, atau antar ras, suku, dan agama sekaligus

ISBN 978-602-8766-74-6
9 786028 766746 >